

BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas;
g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 3.434.925.995.303,17	
b. belanja	Rp 3.457.550.201.497,00	
defisit		Rp 22.624.206.194,23
c. pembiayaan		
- penerimaan	Rp 290.345.329.675,23	
- pengeluaran	Rp 25.016.000.000,00	
pembiayaan netto		Rp 265.329.329.675,23

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp25.291.907.740,83 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan		Rp3.460.217.903.044,00
2. realisasi		Rp3.434.925.995.303,17
	selisih lebih/(kurang)	(Rp 25.291.907.740,83)

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp255.913.031.221,60 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah perubahan		Rp3.713.463.232.719,00
2. realisasi		Rp3.457.550.201.497,40
	selisih lebih/(kurang)	Rp 255.913.031.221,60

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp230.621.123.480,77 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan		(Rp 253.245.329.675,00)
2. realisasi		(Rp 22.624.206.194,23)
	selisih lebih/(kurang)	Rp 230.621.123.480,77

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,23 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 290.345.329.675,00
2. realisasi		Rp 290.345.329.675,23
	selisih lebih/(kurang)	(Rp 0,23)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp12.084.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp 37.100.000.000,00
realisasi		Rp 25.016.000.000,00
	selisih lebih/(kurang)	Rp 12.084.000.000,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp12.084.000.000,23 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan		Rp 253.245.329.675,00
2. realisasi		Rp 265.329.329.675,23
	selisih lebih/(kurang)	(Rp 12.084.000.000,23)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp290.345.329.675,23
b. penggunaan saldo anggaran lebih	Rp290.345.329.675,23
c. sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp242.705.123.481,00
d. saldo anggaran lebih akhir	Rp242.705.123.481,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. jumlah asset	Rp6.226.652.415.512,68
b. jumlah kewajiban	Rp 48.022.508.588,25
c. jumlah ekuitas	Rp6.178.629.906.924,43

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp3.155.067.201.939,07
b. beban	Rp3.103.073.456.911,36
c. surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional	(Rp 6.000.559.192,00)
d. pos luar biasa	(Rp 533.870.074,00)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.	saldo kas awal per 1 Januari tahun 2019	Rp 290.443.701.985,23
b.	arus kas dari aktivitas operasi	Rp 455.080.024.449,77
c.	arus kas dari aktivitas investasi	(Rp500.923.686.599,00)
d.	arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp 1.581.000.000,00)
e.	arus kas dari aktivitas transitoris	Rp 11.292.587,00
f.	kas di bendahara penerimaan	Rp 66.419.848,00
g.	kas di bendahara pengeluaran	Rp 151.925.856,00
h.	kas lainnya	Rp 244.210.579,00
i.	saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2019	Rp 243.492.888.706,00

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp6.372.280.602.025,72
b.	surplus/ (defisit)-LO	Rp 45.459.315.761,71
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp (239.110.010.863,00)
d.	ekuitas akhir	Rp6.178.629.906.924,43

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : rekapitulasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran I.5 : daftar piutang daerah;

Lampiran I.6 : daftar penyertaan modal (investasi daerah);

Lampiran I.7 : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran I.8 : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya;

Lampiran I.9 : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I.10 : daftar dana cadangan daerah;

Lampiran I.11 : daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

b. Lampiran II : neraca;
c. Lampiran III : laporan arus kas;
d. Lampiran IV : catatan atas laporan keuangan;
e. Lampiran V : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
f. Lampiran VI : laporan operasional;
g. Lampiran VII : laporan perubahan ekuitas.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a. laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturah Daerah ini.
b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah Kabupaten Banyumas tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 18 AUG 2020

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 18 AGUSTUS 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020
NOMOR 4

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH : (4-169/2020)

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

	Catatan	Anggaran 2019 (Perubahan) Rp	Realisasi 2019 (Audited) Rp	%	Realisasi 2018 (Audited) Rp
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.A.1.a	219.150.000.000,00	229.377.285.773,00	104,67	211.550.291.844,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.A.1.b	31.263.553.000,00	32.644.361.735,00	104,42	32.451.215.298,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.A.1.c	12.958.407.448,00	12.907.559.398,00	99,61	24.789.507.343,00
yang Sah	5.1.A.1.d	398.065.543.120,00	411.876.305.420,17	103,47	379.535.899.549,83
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**661.437.503.568,00**	**686.805.512.326,17**	**103,84**	**648.326.914.034,83**
PENDAPATAN TRANSFER					
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan					
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.A.2.a	40.179.521.000,00	27.188.633.700,00	67,67	41.388.138.494,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.A.2.a	2.484.663.000,00	1.467.574.212,00	59,07	1.520.017.322,00
Dana Alokasi Umum	5.1.A.2.a	1.442.330.354.000,00	1.437.036.239.000,00	99,63	1.373.971.809.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.A.2.a	486.312.268.476,00	474.659.908.721,00	97,60	477.533.051.326,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		**1.971.306.806.476,00**	**1.940.352.355.633,00**	**98,43**	**1.894.413.016.142,00**
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya					
Dana Otonomi Khusus	5.1.A.2.b	0,00	0,00	~	0,00
Dana Penyesuaian	5.1.A.2.b	44.828.869.000,00	44.828.869.000,00	100,00	34.250.000.000,00
Dana Desa	5.1.A.2.b	360.743.521.000,00	360.743.521.000,00	100,00	295.876.047.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		**405.572.390.000,00**	**405.572.390.000,00**	**100,00**	**330.126.047.000,00**
Transfer Pemerintah Provinsi					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.A.2.c	217.121.483.000,00	215.847.778.602,00	99,41	211.522.699.165,00
Pendapatan Bagi Hasil lainnya		0,00	0,00	~	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		**217.121.483.000,00**	**215.847.778.602,00**	**99,41**	**211.522.699.165,00**
Jumlah Pendapatan Transfer		**2.594.000.679.476,00**	**2.561.772.524.235,00**	**98,76**	**2.436.061.762.307,00**
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	5.1.A.3	184.509.720.000,00	167.439.942.427,00	90,75	169.332.334.519,00
Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	~	0,00
Pendapatan Lainnya	5.1.A.3	20.270.000.000,00	18.908.016.315,00	93,28	12.205.641.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		**204.779.720.000,00**	**186.347.958.742,00**	**91,00**	**181.537.975.519,00**
JUMLAH PENDAPATAN		**3.460.217.903.044,00**	**3.434.925.995.303,17**	**99,27**	**3.265.926.651.860,83**

	Catatan	Anggaran 2019 (Perubahan) Rp	Realisasi 2019 (Audited) Rp	%	Realisasi 2018 (Audited) Rp
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	5.1.B.1.a	1.428.457.095.473,00	1.317.180.709.881,00	92,21	1.279.343.072.051,00
Belanja Barang	5.1.B.1.b	1.026.247.690.836,00	949.470.698.650,40	92,52	844.054.267.149,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	~	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	~	0,00
Belanja Hibah	5.1.B.1.c	48.456.270.000,00	40.857.344.650,00	84,32	77.228.833.298,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.B.1.d	16.061.681.200,00	13.859.458.800,00	86,29	14.968.241.200,00
Jumlah Belanja Operasi		**2.519.222.737.509,00**	**2.321.368.211.981,40**	**92,15**	**2.215.594.413.698,00**
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah	5.1.B.2	13.627.540.000,00	8.168.354.576,00	59,94	23.525.790.031,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.B.2	113.757.598.063,00	93.368.565.888,00	82,08	79.351.637.733,00
Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.B.2	116.240.915.316,00	112.662.636.972,00	96,92	136.742.721.339,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.B.2	272.429.140.930,00	263.219.979.395,00	96,62	279.281.890.886,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.B.2	1.584.228.001,00	1.377.960.440,00	86,98	6.514.899.625,00
Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	~	0,00
Jumlah Belanja Modal		**517.639.422.310,00**	**478.797.497.271,00**	**92,50**	**525.416.939.614,00**
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	5.1.B.3	3.000.000.000,00	533.870.074,00	17,80	130.545.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		**3.000.000.000,00**	**533.870.074,00**	**17,80**	**130.545.000,00**
JUMLAH BELANJA		**3.039.862.159.819,00**	**2.800.699.579.326,40**	**92,13**	**2.741.141.898.312,00**
TRANSFER					
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN					
Bagi Hasil Pajak	5.1.C.1	21.915.000.000,00	21.915.000.000,00	100,00	16.957.392.011,00
Bagi Hasil Retribusi	5.1.C.1	3.126.355.300,00	3.126.355.300,00	100,00	2.352.483.814,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	~	0,00
Jumlah Transfer/ Bagi Hasil Pendapatan		**25.041.355.300,00**	**25.041.355.300,00**	**100,00**	**19.309.875.825,00**
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	~	200.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.C.2	647.263.623.800,00	630.524.389.419,00	97,41	557.112.891.106,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.C.2	1.296.093.800,00	1.284.877.452,00	99,13	1.296.093.800,00
Transfer Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	~	0,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		**648.559.717.600,00**	**631.809.266.871,00**	**97,42**	**558.608.984.906,00**
JUMLAH TRANSFER		**673.601.072.900,00**	**656.850.622.171,00**	**97,51**	**577.918.860.731,00**
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		**3.713.463.232.719,00**	**3.457.550.201.497,40**	**93,11**	**3.319.060.759.043,00**
SURPLUS/(DEFISIT)		**(253.245.329.675,00)**	**(22.624.206.194,23)**	**8,93**	**(53.134.107.182,17)**

	Catatan	Anggaran 2019 (Perubahan) Rp	Realisasi 2019 (Audited) Rp	%	Realisasi 2018 (Audited) Rp
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SiLPA	5.1.D.1	290.345.329.675,00	290.345.329.675,23	100,00	382.315.707.328,40
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	~	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	~	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	~	6.123.649.529,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**290.345.329.675,00**	**290.345.329.675,23**	**100,00**	**388.439.356.857,40**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	~	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.D.2	34.600.000.000,00	23.435.000.000,00	67,73	43.184.920.000,00
Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00	~	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.D.2	0,00	0,00	~	0,00
Pengeluaran Investasi Non Permainen Lainnya	5.1.D.2	2.500.000.000,00	1.581.000.000,00	63,24	1.775.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		**37.100.000.000,00**	**25.016.000.000,00**	**67,43**	**44.959.920.000,00**
PEMBIAYAAN NETO		**253.245.329.675,00**	**265.329.329.675,23**	**104,77**	**343.479.436.857,40**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		**0,00**	**242.705.123.481,00**	**~**	**290.345.329.675,23**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

Lampiran I.1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Tahun Anggaran 2019

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN**	**3.460.217.903.044,00**	**3.434.925.995.303,17**	**(25.291.907.740,83)**	**(0,73)**
4.1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	373.875.543.120,00	383.202.416.227,00	9.326.873.107,00	2,49
4.1.01	**Pendidikan**	0,00	1.410.374.318,00	1.410.374.318,00	100,00
4.1.01 . 1.01.01.001	Dinas Pendidikan	0,00	1.410.374.318,00	1.410.374.318,00	100,00
4.1.01 . 1.01.01.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	1.410.374.318,00	1.410.374.318,00	100,00
4.1.01 . 1.01.01.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	17.227.000,00	17.227.000,00	100,00
4.1.01 . 1.01.01.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	1.393.147.318,00	1.393.147.318,00	100,00
4.1.02	**Kesehatan**	373.225.543.120,00	380.310.331.557,00	7.084.788.437,00	1,90
4.1.02 . 1.02.01.001	Dinas Kesehatan	0,00	121.136.221,00	121.136.221,00	100,00
4.1.02 . 1.02.01.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	121.136.221,00	121.136.221,00	100,00
4.1.02 . 1.02.01.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	121.136.221,00	121.136.221,00	100,00
4.1.02 . 1.02.01.002	Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini	2.027.212.000,00	846.427.013,00	(1.180.784.987,00)	(58,25)
4.1.02 . 1.02.01.002.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.027.212.000,00	846.427.013,00	(1.180.784.987,00)	(58,25)
4.1.02 . 1.02.01.002.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.027.212.000,00	846.427.013,00	(1.180.784.987,00)	(58,25)
4.1.02 . 1.02.01.003	Balai Kesehatan Mata Masyarakat	8.159.563.000,00	6.989.627.658,00	(1.169.935.342,00)	(14,34)
4.1.02 . 1.02.01.003.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.159.563.000,00	6.989.627.658,00	(1.169.935.342,00)	(14,34)
4.1.02 . 1.02.01.003.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.159.563.000,00	6.989.627.658,00	(1.169.935.342,00)	(14,34)
4.1.02 . 1.02.01.004	Balai Kesehatan Paru Masyarakat	4.275.420.000,00	4.225.239.597,00	(50.180.403,00)	(1,17)
4.1.02 . 1.02.01.004.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.275.420.000,00	4.225.239.597,00	(50.180.403,00)	(1,17)
4.1.02 . 1.02.01.004.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.275.420.000,00	4.225.239.597,00	(50.180.403,00)	(1,17)
4.1.02 . 1.02.01.005	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1.197.817.000,00	1.554.711.402,00	356.894.402,00	29,80
4.1.02 . 1.02.01.005.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.197.817.000,00	1.554.711.402,00	356.894.402,00	29,80
4.1.02 . 1.02.01.005.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.197.817.000,00	1.554.711.402,00	356.894.402,00	29,80

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.02 . 1.02.01.006	Puskesmas Ajibarang I	3.457.285.000,00	3.606.814.327,00	149.529.327,00	4,33
4.1.02 . 1.02.01.006.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.457.285.000,00	3.606.814.327,00	149.529.327,00	4,33
4.1.02 . 1.02.01.006.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.457.285.000,00	3.606.814.327,00	149.529.327,00	4,33
4.1.02 . 1.02.01.007	Puskesmas Ajibarang II	3.111.393.996,00	2.986.942.126,00	(124.451.870,00)	(4,00)
4.1.02 . 1.02.01.007.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.111.393.996,00	2.986.942.126,00	(124.451.870,00)	(4,00)
4.1.02 . 1.02.01.007.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.111.393.996,00	2.986.942.126,00	(124.451.870,00)	(4,00)
4.1.02 . 1.02.01.008	Puskesmas Banyumas	3.125.958.000,00	2.831.319.146,00	(294.638.854,00)	(9,43)
4.1.02 . 1.02.01.008.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.125.958.000,00	2.831.319.146,00	(294.638.854,00)	(9,43)
4.1.02 . 1.02.01.008.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.125.958.000,00	2.831.319.146,00	(294.638.854,00)	(9,43)
4.1.02 . 1.02.01.009	Puskesmas Baturraden I	1.768.266.840,00	1.749.242.100,00	(19.024.740,00)	(1,08)
4.1.02 . 1.02.01.009.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.768.266.840,00	1.749.242.100,00	(19.024.740,00)	(1,08)
4.1.02 . 1.02.01.009.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.768.266.840,00	1.749.242.100,00	(19.024.740,00)	(1,08)
4.1.02 . 1.02.01.010	Puskesmas Baturraden II	1.255.604.000,00	1.199.182.451,00	(56.421.549,00)	(4,49)
4.1.02 . 1.02.01.010.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.255.604.000,00	1.199.182.451,00	(56.421.549,00)	(4,49)
4.1.02 . 1.02.01.010.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.255.604.000,00	1.199.182.451,00	(56.421.549,00)	(4,49)
4.1.02 . 1.02.01.011	Puskesmas Cilongok I	6.165.555.000,00	4.953.429.606,00	(1.212.125.394,00)	(19,66)
4.1.02 . 1.02.01.011.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.165.555.000,00	4.953.429.606,00	(1.212.125.394,00)	(19,66)
4.1.02 . 1.02.01.011.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.165.555.000,00	4.953.429.606,00	(1.212.125.394,00)	(19,66)
4.1.02 . 1.02.01.012	Puskesmas Cilongok II	3.276.700.000,00	3.210.259.754,00	(66.440.246,00)	(2,03)
4.1.02 . 1.02.01.012.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.276.700.000,00	3.210.259.754,00	(66.440.246,00)	(2,03)
4.1.02 . 1.02.01.012.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.276.700.000,00	3.210.259.754,00	(66.440.246,00)	(2,03)
4.1.02 . 1.02.01.013	Puskesmas Gumelar	3.880.800.000,00	3.677.740.686,00	(203.059.314,00)	(5,23)
4.1.02 . 1.02.01.013.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.880.800.000,00	3.677.740.686,00	(203.059.314,00)	(5,23)
4.1.02 . 1.02.01.013.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.880.800.000,00	3.677.740.686,00	(203.059.314,00)	(5,23)
4.1.02 . 1.02.01.014	Puskesmas Jatilawang	5.114.072.348,00	4.542.058.807,00	(572.013.541,00)	(11,19)
4.1.02 . 1.02.01.014.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.114.072.348,00	4.542.058.807,00	(572.013.541,00)	(11,19)
4.1.02 . 1.02.01.014.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.114.072.348,00	4.542.058.807,00	(572.013.541,00)	(11,19)
4.1.02 . 1.02.01.015	Puskesmas Kalibagor	2.835.000.000,00	2.747.996.242,00	(87.003.758,00)	(3,07)
4.1.02 . 1.02.01.015.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.835.000.000,00	2.747.996.242,00	(87.003.758,00)	(3,07)
4.1.02 . 1.02.01.015.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.835.000.000,00	2.747.996.242,00	(87.003.758,00)	(3,07)
4.1.02 . 1.02.01.016	Puskesmas Karanglewas	3.725.264.000,00	3.441.053.138,00	(284.210.862,00)	(7,63)
4.1.02 . 1.02.01.016.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.725.264.000,00	3.441.053.138,00	(284.210.862,00)	(7,63)
4.1.02 . 1.02.01.016.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.725.264.000,00	3.441.053.138,00	(284.210.862,00)	(7,63)
4.1.02 . 1.02.01.017	Puskesmas Kebasen	5.361.000.750,00	4.539.163.792,00	(821.836.958,00)	(15,33)

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.02 . 1.02.01.017.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.361.000.750,00	4.539.163.792,00	(821.836.958,00)	(15,33)
4.1.02 . 1.02.01.017.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.361.000.750,00	4.539.163.792,00	(821.836.958,00)	(15,33)
4.1.02 . 1.02.01.018	Puskesmas Kedungbanteng	3.990.000.000,00	3.473.212.060,00	(516.787.940,00)	(12,95)
4.1.02 . 1.02.01.018.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.990.000.000,00	3.473.212.060,00	(516.787.940,00)	(12,95)
4.1.02 . 1.02.01.018.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.990.000.000,00	3.473.212.060,00	(516.787.940,00)	(12,95)
4.1.02 . 1.02.01.019	Puskesmas Kembaran I	1.973.565.000,00	1.896.022.113,00	(77.542.887,00)	(3,93)
4.1.02 . 1.02.01.019.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.973.565.000,00	1.896.022.113,00	(77.542.887,00)	(3,93)
4.1.02 . 1.02.01.019.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.973.565.000,00	1.896.022.113,00	(77.542.887,00)	(3,93)
4.1.02 . 1.02.01.020	Puskesmas Kembaran II	1.637.949.522,00	1.639.422.243,00	1.472.721,00	0,09
4.1.02 . 1.02.01.020.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.637.949.522,00	1.639.422.243,00	1.472.721,00	0,09
4.1.02 . 1.02.01.020.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.637.949.522,00	1.639.422.243,00	1.472.721,00	0,09
4.1.02 . 1.02.01.021	Puskesmas Kemranjen I	3.100.000.000,00	3.232.948.440,00	132.948.440,00	4,29
4.1.02 . 1.02.01.021.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.100.000.000,00	3.232.948.440,00	132.948.440,00	4,29
4.1.02 . 1.02.01.021.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.100.000.000,00	3.232.948.440,00	132.948.440,00	4,29
4.1.02 . 1.02.01.022	Puskesmas Kemranjen II	2.474.272.738,00	2.300.399.201,00	(173.873.537,00)	(7,03)
4.1.02 . 1.02.01.022.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.474.272.738,00	2.300.399.201,00	(173.873.537,00)	(7,03)
4.1.02 . 1.02.01.022.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.474.272.738,00	2.300.399.201,00	(173.873.537,00)	(7,03)
4.1.02 . 1.02.01.023	Puskesmas Lumbir	4.178.831.000,00	3.865.291.219,00	(313.539.781,00)	(7,50)
4.1.02 . 1.02.01.023.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.178.831.000,00	3.865.291.219,00	(313.539.781,00)	(7,50)
4.1.02 . 1.02.01.023.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.178.831.000,00	3.865.291.219,00	(313.539.781,00)	(7,50)
4.1.02 . 1.02.01.024	Puskesmas Patikraja	3.351.948.000,00	3.063.067.540,00	(288.880.460,00)	(8,62)
4.1.02 . 1.02.01.024.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.351.948.000,00	3.063.067.540,00	(288.880.460,00)	(8,62)
4.1.02 . 1.02.01.024.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.351.948.000,00	3.063.067.540,00	(288.880.460,00)	(8,62)
4.1.02 . 1.02.01.025	Puskesmas Pekuncen	4.417.471.591,00	4.771.791.462,00	354.319.871,00	8,02
4.1.02 . 1.02.01.025.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.417.471.591,00	4.771.791.462,00	354.319.871,00	8,02
4.1.02 . 1.02.01.025.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.417.471.591,00	4.771.791.462,00	354.319.871,00	8,02
4.1.02 . 1.02.01.026	Puskesmas Purwojati	2.384.017.000,00	2.624.759.899,00	240.742.899,00	10,10
4.1.02 . 1.02.01.026.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.384.017.000,00	2.624.759.899,00	240.742.899,00	10,10
4.1.02 . 1.02.01.026.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.384.017.000,00	2.624.759.899,00	240.742.899,00	10,10
4.1.02 . 1.02.01.027	Puskesmas Purwokerto Barat	1.677.225.450,00	1.690.085.080,00	12.859.630,00	0,77
4.1.02 . 1.02.01.027.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.677.225.450,00	1.690.085.080,00	12.859.630,00	0,77
4.1.02 . 1.02.01.027.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.677.225.450,00	1.690.085.080,00	12.859.630,00	0,77
4.1.02 . 1.02.01.028	Puskesmas Purwokerto Selatan	2.467.639.000,00	2.265.787.453,00	(201.851.547,00)	(8,18)
4.1.02 . 1.02.01.028.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.467.639.000,00	2.265.787.453,00	(201.851.547,00)	(8,18)

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.02 . 1.02.01.028.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.467.639.000,00	2.265.787.453,00	(201.851.547,00)	(8,18)
4.1.02 . 1.02.01.029	Puskesmas Purwokerto Timur I	1.180.290.000,00	1.130.990.258,00	(49.299.742,00)	(4,18)
4.1.02 . 1.02.01.029.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.180.290.000,00	1.130.990.258,00	(49.299.742,00)	(4,18)
4.1.02 . 1.02.01.029.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.180.290.000,00	1.130.990.258,00	(49.299.742,00)	(4,18)
4.1.02 . 1.02.01.030	Puskesmas Purwokerto Timur II	864.000.000,00	872.001.372,00	8.001.372,00	0,93
4.1.02 . 1.02.01.030.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	864.000.000,00	872.001.372,00	8.001.372,00	0,93
4.1.02 . 1.02.01.030.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	864.000.000,00	872.001.372,00	8.001.372,00	0,93
4.1.02 . 1.02.01.031	Puskesmas Purwokerto Utara I	816.000.000,00	804.420.210,00	(11.579.790,00)	(1,42)
4.1.02 . 1.02.01.031.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	816.000.000,00	804.420.210,00	(11.579.790,00)	(1,42)
4.1.02 . 1.02.01.031.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	816.000.000,00	804.420.210,00	(11.579.790,00)	(1,42)
4.1.02 . 1.02.01.032	Puskesmas Purwokerto Utara II	1.000.614.765,00	988.313.091,00	(12.301.674,00)	(1,23)
4.1.02 . 1.02.01.032.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.000.614.765,00	988.313.091,00	(12.301.674,00)	(1,23)
4.1.02 . 1.02.01.032.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.000.614.765,00	988.313.091,00	(12.301.674,00)	(1,23)
4.1.02 . 1.02.01.033	Puskesmas Rawalo	3.955.250.200,00	3.757.203.699,00	(198.046.501,00)	(5,01)
4.1.02 . 1.02.01.033.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.955.250.200,00	3.757.203.699,00	(198.046.501,00)	(5,01)
4.1.02 . 1.02.01.033.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.955.250.200,00	3.757.203.699,00	(198.046.501,00)	(5,01)
4.1.02 . 1.02.01.034	Puskesmas Sokaraja I	3.072.187.724,00	2.756.988.979,00	(315.198.745,00)	(10,26)
4.1.02 . 1.02.01.034.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.072.187.724,00	2.756.988.979,00	(315.198.745,00)	(10,26)
4.1.02 . 1.02.01.034.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.072.187.724,00	2.756.988.979,00	(315.198.745,00)	(10,26)
4.1.02 . 1.02.01.035	Puskesmas Sokaraja II	1.469.083.000,00	1.496.469.748,00	27.386.748,00	1,86
4.1.02 . 1.02.01.035.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.469.083.000,00	1.496.469.748,00	27.386.748,00	1,86
4.1.02 . 1.02.01.035.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.469.083.000,00	1.496.469.748,00	27.386.748,00	1,86
4.1.02 . 1.02.01.036	Puskesmas Somagede	2.395.052.229,00	2.338.409.513,00	(56.642.716,00)	(2,36)
4.1.02 . 1.02.01.036.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.395.052.229,00	2.338.409.513,00	(56.642.716,00)	(2,36)
4.1.02 . 1.02.01.036.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.395.052.229,00	2.338.409.513,00	(56.642.716,00)	(2,36)
4.1.02 . 1.02.01.037	Puskesmas Sumbang I	2.998.000.000,00	2.608.104.578,00	(389.895.422,00)	(13,01)
4.1.02 . 1.02.01.037.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.998.000.000,00	2.608.104.578,00	(389.895.422,00)	(13,01)
4.1.02 . 1.02.01.037.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.998.000.000,00	2.608.104.578,00	(389.895.422,00)	(13,01)
4.1.02 . 1.02.01.038	Puskesmas Sumbang II	3.150.000.000,00	2.786.117.700,00	(363.882.300,00)	(11,55)
4.1.02 . 1.02.01.038.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.150.000.000,00	2.786.117.700,00	(363.882.300,00)	(11,55)
4.1.02 . 1.02.01.038.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.150.000.000,00	2.786.117.700,00	(363.882.300,00)	(11,55)
4.1.02 . 1.02.01.039	Puskesmas Sumpiuh I	3.337.510.000,00	3.358.091.936,00	20.581.936,00	0,62
4.1.02 . 1.02.01.039.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.337.510.000,00	3.358.091.936,00	20.581.936,00	0,62
4.1.02 . 1.02.01.039.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.337.510.000,00	3.358.091.936,00	20.581.936,00	0,62

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.02 . 1.02.01.040	Puskesmas Sumpiuh II	1.812.942.537,00	1.819.032.169,00	6.089.632,00	0,34
4.1.02 . 1.02.01.040.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.812.942.537,00	1.819.032.169,00	6.089.632,00	0,34
4.1.02 . 1.02.01.040.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.812.942.537,00	1.819.032.169,00	6.089.632,00	0,34
4.1.02 . 1.02.01.041	Puskesmas Tambak I	2.698.997.680,00	2.298.400.755,00	(400.596.925,00)	(14,84)
4.1.02 . 1.02.01.041.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.698.997.680,00	2.298.400.755,00	(400.596.925,00)	(14,84)
4.1.02 . 1.02.01.041.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.698.997.680,00	2.298.400.755,00	(400.596.925,00)	(14,84)
4.1.02 . 1.02.01.042	Puskesmas Tambak II	1.443.587.900,00	1.388.536.235,00	(55.051.665,00)	(3,81)
4.1.02 . 1.02.01.042.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.443.587.900,00	1.388.536.235,00	(55.051.665,00)	(3,81)
4.1.02 . 1.02.01.042.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.443.587.900,00	1.388.536.235,00	(55.051.665,00)	(3,81)
4.1.02 . 1.02.01.043	Puskesmas Wangon I	4.031.036.850,00	4.521.804.430,00	490.767.580,00	12,17
4.1.02 . 1.02.01.043.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.031.036.850,00	4.521.804.430,00	490.767.580,00	12,17
4.1.02 . 1.02.01.043.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.031.036.850,00	4.521.804.430,00	490.767.580,00	12,17
4.1.02 . 1.02.01.044	Puskesmas Wangon II	1.443.159.000,00	1.339.588.605,00	(103.570.395,00)	(7,18)
4.1.02 . 1.02.01.044.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.443.159.000,00	1.339.588.605,00	(103.570.395,00)	(7,18)
4.1.02 . 1.02.01.044.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.443.159.000,00	1.339.588.605,00	(103.570.395,00)	(7,18)
4.1.02 . 1.02.02.001	Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)	180.000.000.000,00	187.516.878.533,00	7.516.878.533,00	4,18
4.1.02 . 1.02.02.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	180.000.000.000,00	187.516.878.533,00	7.516.878.533,00	4,18
4.1.02 . 1.02.02.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	180.000.000.000,00	187.516.878.533,00	7.516.878.533,00	4,18
4.1.02 . 1.02.03.001	Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	67.168.000.000,00	74.483.848.970,00	7.315.848.970,00	10,89
4.1.02 . 1.02.03.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	67.168.000.000,00	74.483.848.970,00	7.315.848.970,00	10,89
4.1.02 . 1.02.03.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67.168.000.000,00	74.483.848.970,00	7.315.848.970,00	10,89
4.1.03	**Pekerjaan Umum**	600.000.000,00	1.194.161.469,00	594.161.469,00	99,03
4.1.03 . 1.03.03.001	Dinas Pekerjaan Umum	600.000.000,00	1.194.161.469,00	594.161.469,00	99,03
4.1.03 . 1.03.03.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	600.000.000,00	1.194.161.469,00	594.161.469,00	99,03
4.1.03 . 1.03.03.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	600.000.000,00	749.131.628,00	149.131.628,00	24,86
4.1.03 . 1.03.03.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	445.029.841,00	445.029.841,00	100,00
4.1.05	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	50.000.000,00	105.799.825,00	55.799.825,00	111,60
4.1.05 . 1.05.01.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00	105.799.825,00	55.799.825,00	111,60
4.1.05 . 1.05.01.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.000.000,00	105.799.825,00	55.799.825,00	111,60
4.1.05 . 1.05.01.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	50.000.000,00	51.100.000,00	1.100.000,00	2,20
4.1.05 . 1.05.01.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	54.699.825,00	54.699.825,00	100,00
4.1.06	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	0,00	166.319.464,00	166.319.464,00	100,00
4.1.06 . 1.06.02.001	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	144.176.974,00	144.176.974,00	100,00
4.1.06 . 1.06.02.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	144.176.974,00	144.176.974,00	100,00

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.06 . 1.06.02.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	144.176.974,00	144.176.974,00	100,00
4.1.06 . 1.06.03.001	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	12.910.804,00	12.910.804,00	100,00
4.1.06 . 1.06.03.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	12.910.804,00	12.910.804,00	100,00
4.1.06 . 1.06.03.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	12.910.804,00	12.910.804,00	100,00
4.1.06 . 1.06.04.001	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	9.231.686,00	9.231.686,00	100,00
4.1.06 . 1.06.04.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	9.231.686,00	9.231.686,00	100,00
4.1.06 . 1.06.04.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	9.231.686,00	9.231.686,00	100,00
4.1.07	**Sosial**	0,00	15.429.594,00	15.429.594,00	100,00
4.1.07 . 1.07.02.001	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	15.429.594,00	15.429.594,00	100,00
4.1.07 . 1.07.02.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	15.429.594,00	15.429.594,00	100,00
4.1.07 . 1.07.02.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	15.429.594,00	15.429.594,00	100,00
4.2	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**	21.383.750.000,00	22.762.811.904,00	1.379.061.904,00	6,45
4.2.01	**Tenaga Kerja**	80.000.000,00	127.650.557,00	47.650.557,00	59,56
4.2.01 . 2.01.02.001	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah	80.000.000,00	127.650.557,00	47.650.557,00	59,56
4.2.01 . 2.01.02.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	80.000.000,00	127.650.557,00	47.650.557,00	59,56
4.2.01 . 2.01.02.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	80.000.000,00	93.104.400,00	13.104.400,00	16,38
4.2.01 . 2.01.02.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	34.546.157,00	34.546.157,00	100,00
4.2.05	**Lingkungan Hidup**	0,00	62.904.483,00	62.904.483,00	100,00
4.2.05 . 2.05.02.001	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	62.904.483,00	62.904.483,00	100,00
4.2.05 . 2.05.02.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	62.904.483,00	62.904.483,00	100,00
4.2.05 . 2.05.02.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.05 . 2.05.02.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	62.904.483,00	62.904.483,00	100,00
4.2.06	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	0,00	37.432.124,00	37.432.124,00	100,00
4.2.06 . 2.06.01.001	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	1.632.742,00	1.632.742,00	100,00
4.2.06 . 2.06.01.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	1.632.742,00	1.632.742,00	100,00
4.2.06 . 2.06.01.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	1.632.742,00	1.632.742,00	100,00
4.2.06 . 2.06.02.001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	35.799.382,00	35.799.382,00	100,00
4.2.06 . 2.06.02.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	35.799.382,00	35.799.382,00	100,00
4.2.06 . 2.06.02.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	35.799.382,00	35.799.382,00	100,00
4.2.09	**Perhubungan**	3.303.250.000,00	3.276.223.400,00	(27.026.600,00)	(0,82)
4.2.09 . 2.09.02.001	Dinas Perhubungan	3.303.250.000,00	3.276.223.400,00	(27.026.600,00)	(0,82)
4.2.09 . 2.09.02.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.303.250.000,00	3.276.223.400,00	(27.026.600,00)	(0,82)
4.2.09 . 2.09.02.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	3.303.250.000,00	3.227.474.100,00	(75.775.900,00)	(2,29)
4.2.09 . 2.09.02.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	48.749.300,00	48.749.300,00	100,00

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.2.10	**Komunikasi dan Informatika**	1.400.000.000,00	1.450.909.629,00	50.909.629,00	3,64
4.2.10 . 2.10.01.001	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.400.000.000,00	1.450.909.629,00	50.909.629,00	3,64
4.2.10 . 2.10.01.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.400.000.000,00	1.450.909.629,00	50.909.629,00	3,64
4.2.10 . 2.10.01.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	1.400.000.000,00	1.450.909.500,00	50.909.500,00	3,64
4.2.10 . 2.10.01.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	129,00	129,00	100,00
4.2.12	**Penanaman Modal**	3.945.000.000,00	5.052.541.489,00	1.107.541.489,00	28,07
4.2.12 . 2.12.02.001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	3.945.000.000,00	5.052.541.489,00	1.107.541.489,00	28,07
4.2.12 . 2.12.02.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.945.000.000,00	5.052.541.489,00	1.107.541.489,00	28,07
4.2.12 . 2.12.02.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	3.945.000.000,00	4.971.467.914,00	1.026.467.914,00	26,02
4.2.12 . 2.12.02.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	81.073.575,00	81.073.575,00	100,00
4.2.13	**Kepemudaan dan Olahraga**	12.655.500.000,00	12.754.301.892,00	98.801.892,00	0,78
4.2.13 . 2.13.03.001	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	12.655.500.000,00	12.754.301.892,00	98.801.892,00	0,78
4.2.13 . 2.13.03.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.655.500.000,00	12.754.301.892,00	98.801.892,00	0,78
4.2.13 . 2.13.03.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	12.655.500.000,00	12.709.532.788,00	54.032.788,00	0,43
4.2.13 . 2.13.03.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	44.769.104,00	44.769.104,00	100,00
4.2.18	**Kearsipan**	0,00	848.330,00	848.330,00	100,00
4.2.18 . 2.18.01.001	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	0,00	848.330,00	848.330,00	100,00
4.2.18 . 2.18.01.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	848.330,00	848.330,00	100,00
4.2.18 . 2.18.01.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	848.330,00	848.330,00	100,00
4.3	**Urusan Pilihan**	5.863.512.000,00	6.089.891.913,00	226.379.913,00	3,86
4.3.01	**Kelautan dan Perikanan**	768.512.000,00	457.371.272,00	(311.140.728,00)	(40,49)
4.3.01 . 3.01.02.001	Dinas Perikanan dan Peternakan	768.512.000,00	457.371.272,00	(311.140.728,00)	(40,49)
4.3.01 . 3.01.02.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	768.512.000,00	457.371.272,00	(311.140.728,00)	(40,49)
4.3.01 . 3.01.02.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	768.512.000,00	449.312.000,00	(319.200.000,00)	(41,53)
4.3.01 . 3.01.02.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	8.059.272,00	8.059.272,00	100,00
4.3.03	**Pertanian**	0,00	44.325.987,00	44.325.987,00	100,00
4.3.03 . 3.03.02.001	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	44.325.987,00	44.325.987,00	100,00
4.3.03 . 3.03.02.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	44.325.987,00	44.325.987,00	100,00
4.3.03 . 3.03.02.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	44.325.987,00	44.325.987,00	100,00
4.3.07	**Perindustrian**	5.095.000.000,00	5.588.194.654,00	493.194.654,00	9,68
4.3.07 . 3.07.02.001	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.095.000.000,00	5.588.194.654,00	493.194.654,00	9,68
4.3.07 . 3.07.02.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.095.000.000,00	5.588.194.654,00	493.194.654,00	9,68
4.3.07 . 3.07.02.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	5.095.000.000,00	5.388.624.346,00	293.624.346,00	5,76
4.3.07 . 3.07.02.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	199.570.308,00	199.570.308,00	100,00

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	3.059.095.097.924,00	3.022.870.875.259,17	(36.224.222.664,83)	(1,18)
4.4.01	**Administrasi Pemerintahan**	3.286.291.000,00	3.596.971.196,00	310.680.196,00	9,45
4.4.01 . 4.01.03.001	Sekretariat Daerah	0,00	102.947.249,00	102.947.249,00	100,00
4.4.01 . 4.01.03.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	102.947.249,00	102.947.249,00	100,00
4.4.01 . 4.01.03.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	43.025.000,00	43.025.000,00	100,00
4.4.01 . 4.01.03.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	59.922.249,00	59.922.249,00	100,00
4.4.01 . 4.01.04.001	Sekretariat DPRD	0,00	115.124.903,00	115.124.903,00	100,00
4.4.01 . 4.01.04.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	115.124.903,00	115.124.903,00	100,00
4.4.01 . 4.01.04.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	115.124.903,00	115.124.903,00	100,00
4.4.01 . 4.01.06.001	Inspektorat	0,00	1.889.608,00	1.889.608,00	100,00
4.4.01 . 4.01.06.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	1.889.608,00	1.889.608,00	100,00
4.4.01 . 4.01.06.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	1.889.608,00	1.889.608,00	100,00
4.4.01 . 4.01.09.001	Kecamatan Ajibarang	0,00	560.472,00	560.472,00	100,00
4.4.01 . 4.01.09.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	560.472,00	560.472,00	100,00
4.4.01 . 4.01.09.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.09.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	560.472,00	560.472,00	100,00
4.4.01 . 4.01.10.001	Kecamatan Banyumas	0,00	642.513,00	642.513,00	100,00
4.4.01 . 4.01.10.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	642.513,00	642.513,00	100,00
4.4.01 . 4.01.10.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.10.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	642.513,00	642.513,00	100,00
4.4.01 . 4.01.11.001	Kecamatan Baturraden	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.11.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.11.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.12.001	Kecamatan Cilongok	0,00	18.608.186,00	18.608.186,00	100,00
4.4.01 . 4.01.12.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	18.608.186,00	18.608.186,00	100,00
4.4.01 . 4.01.12.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.12.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	18.608.186,00	18.608.186,00	100,00
4.4.01 . 4.01.13.001	Kecamatan Gumelar	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.13.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.13.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.14.001	Kecamatan Jatilawang	0,00	6.125.796,00	6.125.796,00	100,00
4.4.01 . 4.01.14.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	6.125.796,00	6.125.796,00	100,00
4.4.01 . 4.01.14.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.14.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	6.125.796,00	6.125.796,00	100,00

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.4.01 . 4.01.15.001	Kecamatan Kalibagor	0,00	2.500.224,00	2.500.224,00	100,00
4.4.01 . 4.01.15.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	2.500.224,00	2.500.224,00	100,00
4.4.01 . 4.01.15.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.15.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	2.500.224,00	2.500.224,00	100,00
4.4.01 . 4.01.16.001	Kecamatan Karanglewas	0,00	7.652.659,00	7.652.659,00	100,00
4.4.01 . 4.01.16.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	7.652.659,00	7.652.659,00	100,00
4.4.01 . 4.01.16.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.16.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	7.652.659,00	7.652.659,00	100,00
4.4.01 . 4.01.17.001	Kecamatan Kebasen	0,00	3.995.344,00	3.995.344,00	100,00
4.4.01 . 4.01.17.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	3.995.344,00	3.995.344,00	100,00
4.4.01 . 4.01.17.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.17.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	3.995.344,00	3.995.344,00	100,00
4.4.01 . 4.01.18.001	Kecamatan Kedungbanteng	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.18.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.18.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.19.001	Kecamatan Kembaran	0,00	125.232,00	125.232,00	100,00
4.4.01 . 4.01.19.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	125.232,00	125.232,00	100,00
4.4.01 . 4.01.19.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.19.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	125.232,00	125.232,00	100,00
4.4.01 . 4.01.20.001	Kecamatan Kemranjen	0,00	12.685.103,00	12.685.103,00	100,00
4.4.01 . 4.01.20.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	12.685.103,00	12.685.103,00	100,00
4.4.01 . 4.01.20.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.20.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	12.685.103,00	12.685.103,00	100,00
4.4.01 . 4.01.21.001	Kecamatan Lumbir	0,00	10.663.600,00	10.663.600,00	100,00
4.4.01 . 4.01.21.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	10.663.600,00	10.663.600,00	100,00
4.4.01 . 4.01.21.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.21.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	10.663.600,00	10.663.600,00	100,00
4.4.01 . 4.01.22.001	Kecamatan Patikraja	0,00	12.775.424,00	12.775.424,00	100,00
4.4.01 . 4.01.22.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	12.775.424,00	12.775.424,00	100,00
4.4.01 . 4.01.22.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.22.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	12.775.424,00	12.775.424,00	100,00
4.4.01 . 4.01.23.001	Kecamatan Pekuncen	0,00	400.382,00	400.382,00	100,00
4.4.01 . 4.01.23.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	400.382,00	400.382,00	100,00
4.4.01 . 4.01.23.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.4.01 . 4.01.23.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	400.382,00	400.382,00	100,00
4.4.01 . 4.01.24.001	Kecamatan Purwojati	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.24.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.24.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.25.001	Kecamatan Purwokerto Barat	557.443.000,00	579.434.181,00	21.991.181,00	3,95
4.4.01 . 4.01.25.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	557.443.000,00	579.434.181,00	21.991.181,00	3,95
4.4.01 . 4.01.25.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	557.443.000,00	567.990.950,00	10.547.950,00	1,89
4.4.01 . 4.01.25.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	11.443.231,00	11.443.231,00	100,00
4.4.01 . 4.01.26.001	Kecamatan Purwokerto Selatan	817.100.000,00	940.079.518,00	122.979.518,00	15,05
4.4.01 . 4.01.26.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	817.100.000,00	940.079.518,00	122.979.518,00	15,05
4.4.01 . 4.01.26.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	817.100.000,00	931.939.685,00	114.839.685,00	14,05
4.4.01 . 4.01.26.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	8.139.833,00	8.139.833,00	100,00
4.4.01 . 4.01.27.001	Kecamatan Purwokerto Timur	650.000.000,00	545.524.925,00	(104.475.075,00)	(16,07)
4.4.01 . 4.01.27.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	650.000.000,00	545.524.925,00	(104.475.075,00)	(16,07)
4.4.01 . 4.01.27.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	650.000.000,00	542.389.208,00	(107.610.792,00)	(16,56)
4.4.01 . 4.01.27.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	3.135.717,00	3.135.717,00	100,00
4.4.01 . 4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Utara	500.000.000,00	559.852.858,00	59.852.858,00	11,97
4.4.01 . 4.01.28.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	500.000.000,00	559.852.858,00	59.852.858,00	11,97
4.4.01 . 4.01.28.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	500.000.000,00	544.992.065,00	44.992.065,00	9,00
4.4.01 . 4.01.28.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	14.860.793,00	14.860.793,00	100,00
4.4.01 . 4.01.29.001	Kecamatan Rawalo	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.29.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.29.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.30.001	Kecamatan Sokaraja	0,00	21.978.171,00	21.978.171,00	100,00
4.4.01 . 4.01.30.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	21.978.171,00	21.978.171,00	100,00
4.4.01 . 4.01.30.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.30.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	21.978.171,00	21.978.171,00	100,00
4.4.01 . 4.01.31.001	Kecamatan Somagede	0,00	7.690.270,00	7.690.270,00	100,00
4.4.01 . 4.01.31.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	7.690.270,00	7.690.270,00	100,00
4.4.01 . 4.01.31.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.31.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	7.690.270,00	7.690.270,00	100,00
4.4.01 . 4.01.32.001	Kecamatan Sumbang	0,00	12.709.262,00	12.709.262,00	100,00
4.4.01 . 4.01.32.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	12.709.262,00	12.709.262,00	100,00
4.4.01 . 4.01.32.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.4.01 . 4.01.32.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	12.709.262,00	12.709.262,00	100,00
4.4.01 . 4.01.33.001	Kecamatan Sumpiuh	761.748.000,00	625.527.068,00	(136.220.932,00)	(17,88)
4.4.01 . 4.01.33.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	761.748.000,00	625.527.068,00	(136.220.932,00)	(17,88)
4.4.01 . 4.01.33.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	761.748.000,00	625.527.068,00	(136.220.932,00)	(17,88)
4.4.01 . 4.01.34.001	Kecamatan Tambak	0,00	4.236.094,00	4.236.094,00	100,00
4.4.01 . 4.01.34.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	4.236.094,00	4.236.094,00	100,00
4.4.01 . 4.01.34.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	4.236.094,00	4.236.094,00	100,00
4.4.01 . 4.01.35.001	Kecamatan Wangon	0,00	3.242.154,00	3.242.154,00	100,00
4.4.01 . 4.01.35.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	3.242.154,00	3.242.154,00	100,00
4.4.01 . 4.01.35.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.01 . 4.01.35.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	3.242.154,00	3.242.154,00	100,00
4.4.03	**Keuangan**	3.055.728.806.924,00	3.019.181.308.741,17	(36.547.498.182,83)	(1,20)
4.4.03 . 4.03.01.001	Badan Keuangan Daerah	243.990.000.000,00	231.051.446.080,00	(12.938.553.920,00)	(5,30)
4.4.03 . 4.03.01.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	243.990.000.000,00	231.051.446.080,00	(12.938.553.920,00)	(5,30)
4.4.03 . 4.03.01.001.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	219.150.000.000,00	229.377.285.773,00	10.227.285.773,00	4,67
4.4.03 . 4.03.01.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	165.827.989,00	165.827.989,00	100,00
4.4.03 . 4.03.01.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.840.000.000,00	1.508.332.318,00	(23.331.667.682,00)	(93,93)
4.4.03 . 4.03.01.002	Badan Keuangan Daerah - PPKD	2.811.738.806.924,00	2.788.129.862.661,17	(23.608.944.262,83)	(0,84)
4.4.03 . 4.03.01.002.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.958.407.448,00	40.009.379.684,17	27.050.972.236,17	208,75
4.4.03 . 4.03.01.002.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
4.4.03 . 4.03.01.002.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.958.407.448,00	12.907.559.398,00	(50.848.050,00)	(0,39)
4.4.03 . 4.03.01.002.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	27.066.820.286,17	27.066.820.286,17	100,00
4.4.03 . 4.03.01.002.2	DANA PERIMBANGAN	1.971.306.806.476,00	1.940.352.355.633,00	(30.954.450.843,00)	(1,57)
4.4.03 . 4.03.01.002.2.01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42.664.184.000,00	28.656.207.912,00	(14.007.976.088,00)	(32,83)
4.4.03 . 4.03.01.002.2.02	Dana Alokasi Umum	1.442.330.354.000,00	1.437.036.239.000,00	(5.294.115.000,00)	(0,37)
4.4.03 . 4.03.01.002.2.03	Dana Alokasi Khusus	486.312.268.476,00	474.659.908.721,00	(11.652.359.755,00)	(2,40)
4.4.03 . 4.03.01.002.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	827.473.593.000,00	807.768.127.344,00	(19.705.465.656,00)	(2,38)
4.4.03 . 4.03.01.002.3.01	Pendapatan Hibah	184.509.720.000,00	167.439.942.427,00	(17.069.777.573,00)	(9,25)
4.4.03 . 4.03.01.002.3.03	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	217.121.483.000,00	215.847.778.602,00	(1.273.704.398,00)	(0,59)
4.4.03 . 4.03.01.002.3.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	44.828.869.000,00	44.828.869.000,00	0,00	0,00
4.4.03 . 4.03.01.002.3.05	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	20.270.000.000,00	18.908.016.315,00	(1.361.983.685,00)	(6,72)
4.4.03 . 4.03.01.002.3.07	Dana Desa	360.743.521.000,00	360.743.521.000,00	0,00	0,00
4.4.04	**Kepegawaian**	80.000.000,00	92.595.322,00	12.595.322,00	15,74
4.4.04 . 4.04.01.001	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	80.000.000,00	92.595.322,00	12.595.322,00	15,74

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.4.04 . 4.04.01.001.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	80.000.000,00	92.595.322,00	12.595.322,00	15,74
4.4.04 . 4.04.01.001.1.02	Hasil Retribusi Daerah	80.000.000,00	75.550.000,00	(4.450.000,00)	(5,56)
4.4.04 . 4.04.01.001.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	17.045.322,00	17.045.322,00	100,00
5	**BELANJA**	**3.713.463.232.719,00**	**3.457.550.201.497,40**	**(255.913.031.221,60)**	**(6,89)**
5.1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	2.312.412.664.232,00	2.172.223.912.977,40	(140.188.751.254,60)	(6,06)
5.1.01	**Pendidikan**	1.187.940.324.875,00	1.124.651.875.708,00	(63.288.449.167,00)	(5,33)
5.1.01 . 1.01.01.001	Dinas Pendidikan	1.187.940.324.875,00	1.124.651.875.708,00	(63.288.449.167,00)	(5,33)
5.1.01 . 1.01.01.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	919.109.920.978,00	867.505.616.109,00	(51.604.304.869,00)	(5,61)
5.1.01 . 1.01.01.001.1.01	Belanja Pegawai	919.109.920.978,00	867.505.616.109,00	(51.604.304.869,00)	(5,61)
5.1.01 . 1.01.01.001.2	BELANJA LANGSUNG	268.830.403.897,00	257.146.259.599,00	(11.684.144.298,00)	(4,35)
5.1.01 . 1.01.01.001.2.01	Belanja Pegawai	6.695.416.179,00	6.370.384.895,00	(325.031.284,00)	(4,85)
5.1.01 . 1.01.01.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	192.835.231.589,00	187.756.881.365,00	(5.078.350.224,00)	(2,63)
5.1.01 . 1.01.01.001.2.03	Belanja Modal	69.299.756.129,00	63.018.993.339,00	(6.280.762.790,00)	(9,06)
5.1.02	**Kesehatan**	689.756.575.348,00	636.186.482.705,40	(53.570.092.642,60)	(7,77)
5.1.02 . 1.02.01.001	Dinas Kesehatan	216.445.576.000,00	193.866.323.106,00	(22.579.252.894,00)	(10,43)
5.1.02 . 1.02.01.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	92.221.000.000,00	86.935.249.574,00	(5.285.750.426,00)	(5,73)
5.1.02 . 1.02.01.001.1.01	Belanja Pegawai	92.221.000.000,00	86.935.249.574,00	(5.285.750.426,00)	(5,73)
5.1.02 . 1.02.01.001.2	BELANJA LANGSUNG	124.224.576.000,00	106.931.073.532,00	(17.293.502.468,00)	(13,92)
5.1.02 . 1.02.01.001.2.01	Belanja Pegawai	705.959.200,00	549.710.000,00	(156.249.200,00)	(22,13)
5.1.02 . 1.02.01.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	93.133.666.721,00	78.349.542.259,00	(14.784.124.462,00)	(15,87)
5.1.02 . 1.02.01.001.2.03	Belanja Modal	30.384.950.079,00	28.031.821.273,00	(2.353.128.806,00)	(7,74)
5.1.02 . 1.02.01.002	Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini	2.033.806.411,00	825.801.076,00	(1.208.005.335,00)	(59,40)
5.1.02 . 1.02.01.002.2	BELANJA LANGSUNG	2.033.806.411,00	825.801.076,00	(1.208.005.335,00)	(59,40)
5.1.02 . 1.02.01.002.2.02	Belanja Barang dan Jasa	1.993.806.411,00	825.801.076,00	(1.168.005.335,00)	(58,58)
5.1.02 . 1.02.01.002.2.03	Belanja Modal	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)
5.1.02 . 1.02.01.003	Balai Kesehatan Mata Masyarakat	8.286.525.178,00	6.503.881.607,00	(1.782.643.571,00)	(21,51)
5.1.02 . 1.02.01.003.2	BELANJA LANGSUNG	8.286.525.178,00	6.503.881.607,00	(1.782.643.571,00)	(21,51)
5.1.02 . 1.02.01.003.2.02	Belanja Barang dan Jasa	6.796.525.178,00	6.468.214.357,00	(328.310.821,00)	(4,83)
5.1.02 . 1.02.01.003.2.03	Belanja Modal	1.490.000.000,00	35.667.250,00	(1.454.332.750,00)	(97,61)
5.1.02 . 1.02.01.004	Balai Kesehatan Paru Masyarakat	4.526.453.625,00	4.410.832.449,40	(115.621.175,60)	(2,55)
5.1.02 . 1.02.01.004.2	BELANJA LANGSUNG	4.526.453.625,00	4.410.832.449,40	(115.621.175,60)	(2,55)
5.1.02 . 1.02.01.004.2.02	Belanja Barang dan Jasa	4.296.453.625,00	4.281.353.945,40	(15.099.679,60)	(0,35)
5.1.02 . 1.02.01.004.2.03	Belanja Modal	230.000.000,00	129.478.504,00	(100.521.496,00)	(43,70)
5.1.02 . 1.02.01.005	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1.243.973.528,00	1.237.090.171,00	(6.883.357,00)	(0,55)

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02 . 1.02.01.005.2	BELANJA LANGSUNG	1.243.973.528,00	1.237.090.171,00	(6.883.357,00)	(0,55)
5.1.02 . 1.02.01.005.2.02	Belanja Barang dan Jasa	1.215.939.753,00	1.210.852.830,00	(5.086.923,00)	(0,42)
5.1.02 . 1.02.01.005.2.03	Belanja Modal	28.033.775,00	26.237.341,00	(1.796.434,00)	(6,41)
5.1.02 . 1.02.01.006	Puskesmas Ajibarang I	3.492.155.026,00	3.389.993.955,00	(102.161.071,00)	(2,93)
5.1.02 . 1.02.01.006.2	BELANJA LANGSUNG	3.492.155.026,00	3.389.993.955,00	(102.161.071,00)	(2,93)
5.1.02 . 1.02.01.006.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.092.155.026,00	3.019.029.437,00	(73.125.589,00)	(2,36)
5.1.02 . 1.02.01.006.2.03	Belanja Modal	400.000.000,00	370.964.518,00	(29.035.482,00)	(7,26)
5.1.02 . 1.02.01.007	Puskesmas Ajibarang II	3.348.525.117,00	3.143.460.692,00	(205.064.425,00)	(6,12)
5.1.02 . 1.02.01.007.2	BELANJA LANGSUNG	3.348.525.117,00	3.143.460.692,00	(205.064.425,00)	(6,12)
5.1.02 . 1.02.01.007.2.02	Belanja Barang dan Jasa	2.973.525.117,00	2.775.005.192,00	(198.519.925,00)	(6,68)
5.1.02 . 1.02.01.007.2.03	Belanja Modal	375.000.000,00	368.455.500,00	(6.544.500,00)	(1,75)
5.1.02 . 1.02.01.008	Puskesmas Banyumas	3.768.266.819,00	3.157.457.335,00	(610.809.484,00)	(16,21)
5.1.02 . 1.02.01.008.2	BELANJA LANGSUNG	3.768.266.819,00	3.157.457.335,00	(610.809.484,00)	(16,21)
5.1.02 . 1.02.01.008.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.108.266.819,00	2.686.642.243,00	(421.624.576,00)	(13,56)
5.1.02 . 1.02.01.008.2.03	Belanja Modal	660.000.000,00	470.815.092,00	(189.184.908,00)	(28,66)
5.1.02 . 1.02.01.009	Puskesmas Baturraden I	1.783.293.491,00	1.756.894.449,00	(26.399.042,00)	(1,48)
5.1.02 . 1.02.01.009.2	BELANJA LANGSUNG	1.783.293.491,00	1.756.894.449,00	(26.399.042,00)	(1,48)
5.1.02 . 1.02.01.009.2.02	Belanja Barang dan Jasa	1.713.293.491,00	1.698.134.449,00	(15.159.042,00)	(0,88)
5.1.02 . 1.02.01.009.2.03	Belanja Modal	70.000.000,00	58.760.000,00	(11.240.000,00)	(16,06)
5.1.02 . 1.02.01.010	Puskesmas Baturraden II	1.434.635.855,00	1.273.551.950,00	(161.083.905,00)	(11,23)
5.1.02 . 1.02.01.010.2	BELANJA LANGSUNG	1.434.635.855,00	1.273.551.950,00	(161.083.905,00)	(11,23)
5.1.02 . 1.02.01.010.2.02	Belanja Barang dan Jasa	1.369.399.855,00	1.219.649.900,00	(149.749.955,00)	(10,94)
5.1.02 . 1.02.01.010.2.03	Belanja Modal	65.236.000,00	53.902.050,00	(11.333.950,00)	(17,37)
5.1.02 . 1.02.01.011	Puskesmas Cilongok I	7.521.178.563,00	4.732.098.512,00	(2.789.080.051,00)	(37,08)
5.1.02 . 1.02.01.011.2	BELANJA LANGSUNG	7.521.178.563,00	4.732.098.512,00	(2.789.080.051,00)	(37,08)
5.1.02 . 1.02.01.011.2.02	Belanja Barang dan Jasa	6.207.581.063,00	4.386.260.424,00	(1.821.320.639,00)	(29,34)
5.1.02 . 1.02.01.011.2.03	Belanja Modal	1.313.597.500,00	345.838.088,00	(967.759.412,00)	(73,67)
5.1.02 . 1.02.01.012	Puskesmas Cilongok II	4.710.263.911,00	3.104.881.832,00	(1.605.382.079,00)	(34,08)
5.1.02 . 1.02.01.012.2	BELANJA LANGSUNG	4.710.263.911,00	3.104.881.832,00	(1.605.382.079,00)	(34,08)
5.1.02 . 1.02.01.012.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.940.263.911,00	2.851.671.332,00	(1.088.592.579,00)	(27,63)
5.1.02 . 1.02.01.012.2.03	Belanja Modal	770.000.000,00	253.210.500,00	(516.789.500,00)	(67,12)
5.1.02 . 1.02.01.013	Puskesmas Gumelar	3.885.451.741,00	3.666.983.186,00	(218.468.555,00)	(5,62)
5.1.02 . 1.02.01.013.2	BELANJA LANGSUNG	3.885.451.741,00	3.666.983.186,00	(218.468.555,00)	(5,62)
5.1.02 . 1.02.01.013.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.514.951.741,00	3.391.299.505,00	(123.652.236,00)	(3,52)

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02 . 1.02.01.013.2.03	Belanja Modal	370.500.000,00	275.683.681,00	(94.816.319,00)	(25,59)
5.1.02 . 1.02.01.014	Puskesmas Jatilawang	5.136.681.374,00	4.377.867.015,00	(758.814.359,00)	(14,77)
5.1.02 . 1.02.01.014.2	BELANJA LANGSUNG	5.136.681.374,00	4.377.867.015,00	(758.814.359,00)	(14,77)
5.1.02 . 1.02.01.014.2.02	Belanja Barang dan Jasa	4.555.911.374,00	4.101.940.815,00	(453.970.559,00)	(9,96)
5.1.02 . 1.02.01.014.2.03	Belanja Modal	580.770.000,00	275.926.200,00	(304.843.800,00)	(52,49)
5.1.02 . 1.02.01.015	Puskesmas Kalibagor	3.114.040.138,00	2.960.477.338,00	(153.562.800,00)	(4,93)
5.1.02 . 1.02.01.015.2	BELANJA LANGSUNG	3.114.040.138,00	2.960.477.338,00	(153.562.800,00)	(4,93)
5.1.02 . 1.02.01.015.2.02	Belanja Barang dan Jasa	2.704.040.138,00	2.647.342.338,00	(56.697.800,00)	(2,10)
5.1.02 . 1.02.01.015.2.03	Belanja Modal	410.000.000,00	313.135.000,00	(96.865.000,00)	(23,63)
5.1.02 . 1.02.01.016	Puskesmas Karanglewas	4.431.015.624,00	3.472.992.443,00	(958.023.181,00)	(21,62)
5.1.02 . 1.02.01.016.2	BELANJA LANGSUNG	4.431.015.624,00	3.472.992.443,00	(958.023.181,00)	(21,62)
5.1.02 . 1.02.01.016.2.02	Belanja Barang dan Jasa	4.114.815.624,00	3.358.552.448,00	(756.263.176,00)	(18,38)
5.1.02 . 1.02.01.016.2.03	Belanja Modal	316.200.000,00	114.439.995,00	(201.760.005,00)	(63,81)
5.1.02 . 1.02.01.017	Puskesmas Kebasen	6.970.229.337,00	3.959.088.952,00	(3.011.140.385,00)	(43,20)
5.1.02 . 1.02.01.017.2	BELANJA LANGSUNG	6.970.229.337,00	3.959.088.952,00	(3.011.140.385,00)	(43,20)
5.1.02 . 1.02.01.017.2.02	Belanja Barang dan Jasa	6.121.029.337,00	3.791.348.952,00	(2.329.680.385,00)	(38,06)
5.1.02 . 1.02.01.017.2.03	Belanja Modal	849.200.000,00	167.740.000,00	(681.460.000,00)	(80,25)
5.1.02 . 1.02.01.018	Puskesmas Kedungbanteng	4.008.505.557,00	3.229.026.162,00	(779.479.395,00)	(19,45)
5.1.02 . 1.02.01.018.2	BELANJA LANGSUNG	4.008.505.557,00	3.229.026.162,00	(779.479.395,00)	(19,45)
5.1.02 . 1.02.01.018.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.562.455.557,00	2.976.077.162,00	(586.378.395,00)	(16,46)
5.1.02 . 1.02.01.018.2.03	Belanja Modal	446.050.000,00	252.949.000,00	(193.101.000,00)	(43,29)
5.1.02 . 1.02.01.019	Puskesmas Kembaran I	2.044.180.744,00	1.965.903.798,00	(78.276.946,00)	(3,83)
5.1.02 . 1.02.01.019.2	BELANJA LANGSUNG	2.044.180.744,00	1.965.903.798,00	(78.276.946,00)	(3,83)
5.1.02 . 1.02.01.019.2.02	Belanja Barang dan Jasa	1.929.180.744,00	1.856.993.313,00	(72.187.431,00)	(3,74)
5.1.02 . 1.02.01.019.2.03	Belanja Modal	115.000.000,00	108.910.485,00	(6.089.515,00)	(5,30)
5.1.02 . 1.02.01.020	Puskesmas Kembaran II	1.724.766.968,00	1.581.348.689,00	(143.418.279,00)	(8,32)
5.1.02 . 1.02.01.020.2	BELANJA LANGSUNG	1.724.766.968,00	1.581.348.689,00	(143.418.279,00)	(8,32)
5.1.02 . 1.02.01.020.2.02	Belanja Barang dan Jasa	1.654.516.968,00	1.512.968.689,00	(141.548.279,00)	(8,56)
5.1.02 . 1.02.01.020.2.03	Belanja Modal	70.250.000,00	68.380.000,00	(1.870.000,00)	(2,66)
5.1.02 . 1.02.01.021	Puskesmas Kemranjen I	3.103.791.404,00	3.098.681.575,00	(5.109.829,00)	(0,16)
5.1.02 . 1.02.01.021.2	BELANJA LANGSUNG	3.103.791.404,00	3.098.681.575,00	(5.109.829,00)	(0,16)
5.1.02 . 1.02.01.021.2.02	Belanja Barang dan Jasa	2.953.012.904,00	2.951.331.075,00	(1.681.829,00)	(0,06)
5.1.02 . 1.02.01.021.2.03	Belanja Modal	150.778.500,00	147.350.500,00	(3.428.000,00)	(2,27)
5.1.02 . 1.02.01.022	Puskesmas Kemranjen II	2.647.356.150,00	2.325.560.337,00	(321.795.813,00)	(12,16)

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02 . 1.02.01.022.2	BELANJA LANGSUNG	2.647.356.150,00	2.325.560.337,00	(321.795.813,00)	(12,16)
5.1.02 . 1.02.01.022.2.02	Belanja Barang dan Jasa	2.538.956.150,00	2.293.925.337,00	(245.030.813,00)	(9,65)
5.1.02 . 1.02.01.022.2.03	Belanja Modal	108.400.000,00	31.635.000,00	(76.765.000,00)	(70,82)
5.1.02 . 1.02.01.023	Puskesmas Lumbir	4.447.052.698,00	3.886.797.617,00	(560.255.081,00)	(12,60)
5.1.02 . 1.02.01.023.2	BELANJA LANGSUNG	4.447.052.698,00	3.886.797.617,00	(560.255.081,00)	(12,60)
5.1.02 . 1.02.01.023.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.904.052.698,00	3.481.613.117,00	(422.439.581,00)	(10,82)
5.1.02 . 1.02.01.023.2.03	Belanja Modal	543.000.000,00	405.184.500,00	(137.815.500,00)	(25,38)
5.1.02 . 1.02.01.024	Puskesmas Patikraja	4.220.859.260,00	3.177.142.063,00	(1.043.717.197,00)	(24,73)
5.1.02 . 1.02.01.024.2	BELANJA LANGSUNG	4.220.859.260,00	3.177.142.063,00	(1.043.717.197,00)	(24,73)
5.1.02 . 1.02.01.024.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.122.878.460,00	2.599.143.243,00	(523.735.217,00)	(16,77)
5.1.02 . 1.02.01.024.2.03	Belanja Modal	1.097.980.800,00	577.998.820,00	(519.981.980,00)	(47,36)
5.1.02 . 1.02.01.025	Puskesmas Pekuncen	6.026.519.299,00	4.834.913.282,00	(1.191.606.017,00)	(19,77)
5.1.02 . 1.02.01.025.2	BELANJA LANGSUNG	6.026.519.299,00	4.834.913.282,00	(1.191.606.017,00)	(19,77)
5.1.02 . 1.02.01.025.2.02	Belanja Barang dan Jasa	5.493.052.996,00	4.483.650.442,00	(1.009.402.554,00)	(18,38)
5.1.02 . 1.02.01.025.2.03	Belanja Modal	533.466.303,00	351.262.840,00	(182.203.463,00)	(34,15)
5.1.02 . 1.02.01.026	Puskesmas Purwojati	2.438.963.082,00	2.437.829.306,00	(1.133.776,00)	(0,05)
5.1.02 . 1.02.01.026.2	BELANJA LANGSUNG	2.438.963.082,00	2.437.829.306,00	(1.133.776,00)	(0,05)
5.1.02 . 1.02.01.026.2.02	Belanja Barang dan Jasa	2.403.963.082,00	2.403.924.306,00	(38.776,00)	0,00
5.1.02 . 1.02.01.026.2.03	Belanja Modal	35.000.000,00	33.905.000,00	(1.095.000,00)	(3,13)
5.1.02 . 1.02.01.027	Puskesmas Purwokerto Barat	1.797.078.081,00	1.689.902.213,00	(107.175.868,00)	(5,96)
5.1.02 . 1.02.01.027.2	BELANJA LANGSUNG	1.797.078.081,00	1.689.902.213,00	(107.175.868,00)	(5,96)
5.1.02 . 1.02.01.027.2.02	Belanja Barang dan Jasa	1.686.428.081,00	1.587.243.478,00	(99.184.603,00)	(5,88)
5.1.02 . 1.02.01.027.2.03	Belanja Modal	110.650.000,00	102.658.735,00	(7.991.265,00)	(7,22)
5.1.02 . 1.02.01.028	Puskesmas Purwokerto Selatan	2.790.350.733,00	2.524.330.384,00	(266.020.349,00)	(9,53)
5.1.02 . 1.02.01.028.2	BELANJA LANGSUNG	2.790.350.733,00	2.524.330.384,00	(266.020.349,00)	(9,53)
5.1.02 . 1.02.01.028.2.02	Belanja Barang dan Jasa	2.530.350.733,00	2.420.500.114,00	(109.850.619,00)	(4,34)
5.1.02 . 1.02.01.028.2.03	Belanja Modal	260.000.000,00	103.830.270,00	(156.169.730,00)	(60,07)
5.1.02 . 1.02.01.029	Puskesmas Purwokerto Timur I	1.198.936.770,00	1.147.587.309,00	(51.349.461,00)	(4,28)
5.1.02 . 1.02.01.029.2	BELANJA LANGSUNG	1.198.936.770,00	1.147.587.309,00	(51.349.461,00)	(4,28)
5.1.02 . 1.02.01.029.2.02	Belanja Barang dan Jasa	1.158.936.770,00	1.126.987.309,00	(31.949.461,00)	(2,76)
5.1.02 . 1.02.01.029.2.03	Belanja Modal	40.000.000,00	20.600.000,00	(19.400.000,00)	(48,50)
5.1.02 . 1.02.01.030	Puskesmas Purwokerto Timur II	909.274.095,00	889.951.691,00	(19.322.404,00)	(2,13)
5.1.02 . 1.02.01.030.2	BELANJA LANGSUNG	909.274.095,00	889.951.691,00	(19.322.404,00)	(2,13)
5.1.02 . 1.02.01.030.2.02	Belanja Barang dan Jasa	903.674.095,00	889.951.691,00	(13.722.404,00)	(1,52)

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02 . 1.02.01.030.2.03	Belanja Modal	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)
5.1.02 . 1.02.01.031	Puskesmas Purwokerto Utara I	832.811.017,00	797.954.613,00	(34.856.404,00)	(4,19)
5.1.02 . 1.02.01.031.2	BELANJA LANGSUNG	832.811.017,00	797.954.613,00	(34.856.404,00)	(4,19)
5.1.02 . 1.02.01.031.2.02	Belanja Barang dan Jasa	820.911.017,00	791.699.613,00	(29.211.404,00)	(3,56)
5.1.02 . 1.02.01.031.2.03	Belanja Modal	11.900.000,00	6.255.000,00	(5.645.000,00)	(47,44)
5.1.02 . 1.02.01.032	Puskesmas Purwokerto Utara II	1.013.055.784,00	994.912.502,00	(18.143.282,00)	(1,79)
5.1.02 . 1.02.01.032.2	BELANJA LANGSUNG	1.013.055.784,00	994.912.502,00	(18.143.282,00)	(1,79)
5.1.02 . 1.02.01.032.2.02	Belanja Barang dan Jasa	1.013.055.784,00	994.912.502,00	(18.143.282,00)	(1,79)
5.1.02 . 1.02.01.033	Puskesmas Rawalo	4.375.903.414,00	3.655.547.600,00	(720.355.814,00)	(16,46)
5.1.02 . 1.02.01.033.2	BELANJA LANGSUNG	4.375.903.414,00	3.655.547.600,00	(720.355.814,00)	(16,46)
5.1.02 . 1.02.01.033.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.961.903.414,00	3.380.515.854,00	(581.387.560,00)	(14,67)
5.1.02 . 1.02.01.033.2.03	Belanja Modal	414.000.000,00	275.031.746,00	(138.968.254,00)	(33,57)
5.1.02 . 1.02.01.034	Puskesmas Sokaraja I	3.146.343.424,00	2.592.124.965,00	(554.218.459,00)	(17,61)
5.1.02 . 1.02.01.034.2	BELANJA LANGSUNG	3.146.343.424,00	2.592.124.965,00	(554.218.459,00)	(17,61)
5.1.02 . 1.02.01.034.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.046.343.424,00	2.504.220.490,00	(542.122.934,00)	(17,80)
5.1.02 . 1.02.01.034.2.03	Belanja Modal	100.000.000,00	87.904.475,00	(12.095.525,00)	(12,10)
5.1.02 . 1.02.01.035	Puskesmas Sokaraja II	1.477.046.762,00	1.470.878.834,00	(6.167.928,00)	(0,42)
5.1.02 . 1.02.01.035.2	BELANJA LANGSUNG	1.477.046.762,00	1.470.878.834,00	(6.167.928,00)	(0,42)
5.1.02 . 1.02.01.035.2.02	Belanja Barang dan Jasa	1.459.046.762,00	1.456.008.834,00	(3.037.928,00)	(0,21)
5.1.02 . 1.02.01.035.2.03	Belanja Modal	18.000.000,00	14.870.000,00	(3.130.000,00)	(17,39)
5.1.02 . 1.02.01.036	Puskesmas Somagede	2.641.760.569,00	2.370.634.317,00	(271.126.252,00)	(10,26)
5.1.02 . 1.02.01.036.2	BELANJA LANGSUNG	2.641.760.569,00	2.370.634.317,00	(271.126.252,00)	(10,26)
5.1.02 . 1.02.01.036.2.02	Belanja Barang dan Jasa	2.421.760.569,00	2.304.006.520,00	(117.754.049,00)	(4,86)
5.1.02 . 1.02.01.036.2.03	Belanja Modal	220.000.000,00	66.627.797,00	(153.372.203,00)	(69,71)
5.1.02 . 1.02.01.037	Puskesmas Sumbang I	3.460.704.124,00	3.010.834.609,00	(449.869.515,00)	(13,00)
5.1.02 . 1.02.01.037.2	BELANJA LANGSUNG	3.460.704.124,00	3.010.834.609,00	(449.869.515,00)	(13,00)
5.1.02 . 1.02.01.037.2.02	Belanja Barang dan Jasa	2.573.079.124,00	2.341.060.609,00	(232.018.515,00)	(9,02)
5.1.02 . 1.02.01.037.2.03	Belanja Modal	887.625.000,00	669.774.000,00	(217.851.000,00)	(24,54)
5.1.02 . 1.02.01.038	Puskesmas Sumbang II	3.888.037.720,00	2.977.110.540,00	(910.927.180,00)	(23,43)
5.1.02 . 1.02.01.038.2	BELANJA LANGSUNG	3.888.037.720,00	2.977.110.540,00	(910.927.180,00)	(23,43)
5.1.02 . 1.02.01.038.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.118.037.720,00	2.492.091.438,00	(625.946.282,00)	(20,08)
5.1.02 . 1.02.01.038.2.03	Belanja Modal	770.000.000,00	485.019.102,00	(284.980.898,00)	(37,01)
5.1.02 . 1.02.01.039	Puskesmas Sumpiuh I	3.337.610.000,00	3.307.321.845,00	(30.288.155,00)	(0,91)
5.1.02 . 1.02.01.039.2	BELANJA LANGSUNG	3.337.610.000,00	3.307.321.845,00	(30.288.155,00)	(0,91)

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02 . 1.02.01.039.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.158.960.000,00	3.158.277.995,00	(682.005,00)	(0,02)
5.1.02 . 1.02.01.039.2.03	Belanja Modal	178.650.000,00	149.043.850,00	(29.606.150,00)	(16,57)
5.1.02 . 1.02.01.040	Puskesmas Sumpiuh II	1.819.679.776,00	1.804.045.968,00	(15.633.808,00)	(0,86)
5.1.02 . 1.02.01.040.2	BELANJA LANGSUNG	1.819.679.776,00	1.804.045.968,00	(15.633.808,00)	(0,86)
5.1.02 . 1.02.01.040.2.02	Belanja Barang dan Jasa	1.749.679.776,00	1.735.548.093,00	(14.131.683,00)	(0,81)
5.1.02 . 1.02.01.040.2.03	Belanja Modal	70.000.000,00	68.497.875,00	(1.502.125,00)	(2,15)
5.1.02 . 1.02.01.041	Puskesmas Tambak I	2.760.729.141,00	2.295.210.615,00	(465.518.526,00)	(16,86)
5.1.02 . 1.02.01.041.2	BELANJA LANGSUNG	2.760.729.141,00	2.295.210.615,00	(465.518.526,00)	(16,86)
5.1.02 . 1.02.01.041.2.02	Belanja Barang dan Jasa	2.590.479.141,00	2.184.294.682,00	(406.184.459,00)	(15,68)
5.1.02 . 1.02.01.041.2.03	Belanja Modal	170.250.000,00	110.915.933,00	(59.334.067,00)	(34,85)
5.1.02 . 1.02.01.042	Puskesmas Tambak II	1.575.065.572,00	1.471.226.470,00	(103.839.102,00)	(6,59)
5.1.02 . 1.02.01.042.2	BELANJA LANGSUNG	1.575.065.572,00	1.471.226.470,00	(103.839.102,00)	(6,59)
5.1.02 . 1.02.01.042.2.02	Belanja Barang dan Jasa	1.455.065.572,00	1.387.361.398,00	(67.704.174,00)	(4,65)
5.1.02 . 1.02.01.042.2.03	Belanja Modal	120.000.000,00	83.865.072,00	(36.134.928,00)	(30,11)
5.1.02 . 1.02.01.043	Puskesmas Wangon I	4.655.164.110,00	4.621.536.211,00	(33.627.899,00)	(0,72)
5.1.02 . 1.02.01.043.2	BELANJA LANGSUNG	4.655.164.110,00	4.621.536.211,00	(33.627.899,00)	(0,72)
5.1.02 . 1.02.01.043.2.02	Belanja Barang dan Jasa	4.187.164.110,00	4.156.800.511,00	(30.363.599,00)	(0,73)
5.1.02 . 1.02.01.043.2.03	Belanja Modal	468.000.000,00	464.735.700,00	(3.264.300,00)	(0,70)
5.1.02 . 1.02.01.044	Puskesmas Wangon II	1.478.990.875,00	1.307.235.503,00	(171.755.372,00)	(11,61)
5.1.02 . 1.02.01.044.2	BELANJA LANGSUNG	1.478.990.875,00	1.307.235.503,00	(171.755.372,00)	(11,61)
5.1.02 . 1.02.01.044.2.02	Belanja Barang dan Jasa	1.419.990.875,00	1.299.733.003,00	(120.257.872,00)	(8,47)
5.1.02 . 1.02.01.044.2.03	Belanja Modal	59.000.000,00	7.502.500,00	(51.497.500,00)	(87,28)
5.1.02 . 1.02.02.001	Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)	240.687.812.703,00	234.912.742.040,00	(5.775.070.663,00)	(2,40)
5.1.02 . 1.02.02.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	38.059.902.000,00	35.477.168.788,00	(2.582.733.212,00)	(6,79)
5.1.02 . 1.02.02.001.1.01	Belanja Pegawai	38.059.902.000,00	35.477.168.788,00	(2.582.733.212,00)	(6,79)
5.1.02 . 1.02.02.001.2	BELANJA LANGSUNG	202.627.910.703,00	199.435.573.252,00	(3.192.337.451,00)	(1,58)
5.1.02 . 1.02.02.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	179.091.911.703,00	177.555.187.776,00	(1.536.723.927,00)	(0,86)
5.1.02 . 1.02.02.001.2.03	Belanja Modal	23.535.999.000,00	21.880.385.476,00	(1.655.613.524,00)	(7,03)
5.1.02 . 1.02.03.001	Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	93.116.153.778,00	89.968.515.579,00	(3.147.638.199,00)	(3,38)
5.1.02 . 1.02.03.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.645.621.840,00	12.086.119.464,00	(559.502.376,00)	(4,42)
5.1.02 . 1.02.03.001.1.01	Belanja Pegawai	12.645.621.840,00	12.086.119.464,00	(559.502.376,00)	(4,42)
5.1.02 . 1.02.03.001.2	BELANJA LANGSUNG	80.470.531.938,00	77.882.396.115,00	(2.588.135.823,00)	(3,22)
5.1.02 . 1.02.03.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	65.530.127.938,00	65.089.107.012,00	(441.020.926,00)	(0,67)
5.1.02 . 1.02.03.001.2.03	Belanja Modal	14.940.404.000,00	12.793.289.103,00	(2.147.114.897,00)	(14,37)

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.03	**Pekerjaan Umum**	304.553.784.592,00	290.953.680.530,00	(13.600.104.062,00)	(4,47)
5.1.03 . 1.03.03.001	Dinas Pekerjaan Umum	304.553.784.592,00	290.953.680.530,00	(13.600.104.062,00)	(4,47)
5.1.03 . 1.03.03.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.844.995.083,00	15.917.636.102,00	(927.358.981,00)	(5,51)
5.1.03 . 1.03.03.001.1.01	Belanja Pegawai	16.844.995.083,00	15.917.636.102,00	(927.358.981,00)	(5,51)
5.1.03 . 1.03.03.001.2	BELANJA LANGSUNG	287.708.789.509,00	275.036.044.428,00	(12.672.745.081,00)	(4,40)
5.1.03 . 1.03.03.001.2.01	Belanja Pegawai	1.769.169.000,00	1.090.760.000,00	(678.409.000,00)	(38,35)
5.1.03 . 1.03.03.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	43.843.283.653,00	40.816.996.759,00	(3.026.286.894,00)	(6,90)
5.1.03 . 1.03.03.001.2.03	Belanja Modal	242.096.336.856,00	233.128.287.669,00	(8.968.049.187,00)	(3,70)
5.1.05	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	81.763.181.500,00	77.004.670.911,00	(4.758.510.589,00)	(5,82)
5.1.05 . 1.05.01.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	81.763.181.500,00	77.004.670.911,00	(4.758.510.589,00)	(5,82)
5.1.05 . 1.05.01.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.610.305.500,00	5.169.342.179,00	(440.963.321,00)	(7,86)
5.1.05 . 1.05.01.001.1.01	Belanja Pegawai	5.610.305.500,00	5.169.342.179,00	(440.963.321,00)	(7,86)
5.1.05 . 1.05.01.001.2	BELANJA LANGSUNG	76.152.876.000,00	71.835.328.732,00	(4.317.547.268,00)	(5,67)
5.1.05 . 1.05.01.001.2.01	Belanja Pegawai	854.920.000,00	462.755.000,00	(392.165.000,00)	(45,87)
5.1.05 . 1.05.01.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	25.934.950.000,00	24.094.443.200,00	(1.840.506.800,00)	(7,10)
5.1.05 . 1.05.01.001.2.03	Belanja Modal	49.363.006.000,00	47.278.130.532,00	(2.084.875.468,00)	(4,22)
5.1.06	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	32.941.406.350,00	29.947.867.674,00	(2.993.538.676,00)	(9,09)
5.1.06 . 1.06.02.001	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.112.073.274,00	5.878.672.552,00	(1.233.400.722,00)	(17,34)
5.1.06 . 1.06.02.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.062.073.274,00	1.648.849.187,00	(413.224.087,00)	(20,04)
5.1.06 . 1.06.02.001.1.01	Belanja Pegawai	2.062.073.274,00	1.648.849.187,00	(413.224.087,00)	(20,04)
5.1.06 . 1.06.02.001.2	BELANJA LANGSUNG	5.050.000.000,00	4.229.823.365,00	(820.176.635,00)	(16,24)
5.1.06 . 1.06.02.001.2.01	Belanja Pegawai	92.449.000,00	65.349.000,00	(27.100.000,00)	(29,31)
5.1.06 . 1.06.02.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.804.276.000,00	3.022.919.365,00	(781.356.635,00)	(20,54)
5.1.06 . 1.06.02.001.2.03	Belanja Modal	1.153.275.000,00	1.141.555.000,00	(11.720.000,00)	(1,02)
5.1.06 . 1.06.03.001	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5.386.000.000,00	4.613.870.921,00	(772.129.079,00)	(14,34)
5.1.06 . 1.06.03.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.964.500.000,00	1.690.045.155,00	(274.454.845,00)	(13,97)
5.1.06 . 1.06.03.001.1.01	Belanja Pegawai	1.964.500.000,00	1.690.045.155,00	(274.454.845,00)	(13,97)
5.1.06 . 1.06.03.001.2	BELANJA LANGSUNG	3.421.500.000,00	2.923.825.766,00	(497.674.234,00)	(14,55)
5.1.06 . 1.06.03.001.2.01	Belanja Pegawai	590.940.000,00	513.525.000,00	(77.415.000,00)	(13,10)
5.1.06 . 1.06.03.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	2.686.560.000,00	2.289.221.520,00	(397.338.480,00)	(14,79)
5.1.06 . 1.06.03.001.2.03	Belanja Modal	144.000.000,00	121.079.246,00	(22.920.754,00)	(15,92)
5.1.06 . 1.06.04.001	Satuan Polisi Pamong Praja	20.443.333.076,00	19.455.324.201,00	(988.008.875,00)	(4,83)
5.1.06 . 1.06.04.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.761.363.076,00	12.995.380.345,00	(765.982.731,00)	(5,57)
5.1.06 . 1.06.04.001.1.01	Belanja Pegawai	13.761.363.076,00	12.995.380.345,00	(765.982.731,00)	(5,57)

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.06 . 1.06.04.001.2	BELANJA LANGSUNG	6.681.970.000,00	6.459.943.856,00	(222.026.144,00)	(3,32)
5.1.06 . 1.06.04.001.2.01	Belanja Pegawai	1.884.825.000,00	1.779.941.500,00	(104.883.500,00)	(5,56)
5.1.06 . 1.06.04.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	4.757.145.000,00	4.640.996.356,00	(116.148.644,00)	(2,44)
5.1.06 . 1.06.04.001.2.03	Belanja Modal	40.000.000,00	39.006.000,00	(994.000,00)	(2,49)
5.1.07	**Sosial**	15.457.391.567,00	13.479.335.449,00	(1.978.056.118,00)	(12,80)
5.1.07 . 1.07.02.001	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.457.391.567,00	13.479.335.449,00	(1.978.056.118,00)	(12,80)
5.1.07 . 1.07.02.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.367.391.567,00	5.531.672.875,00	(835.718.692,00)	(13,12)
5.1.07 . 1.07.02.001.1.01	Belanja Pegawai	6.367.391.567,00	5.531.672.875,00	(835.718.692,00)	(13,12)
5.1.07 . 1.07.02.001.2	BELANJA LANGSUNG	9.090.000.000,00	7.947.662.574,00	(1.142.337.426,00)	(12,57)
5.1.07 . 1.07.02.001.2.01	Belanja Pegawai	140.340.000,00	102.270.000,00	(38.070.000,00)	(27,13)
5.1.07 . 1.07.02.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	8.687.110.000,00	7.584.757.574,00	(1.102.352.426,00)	(12,69)
5.1.07 . 1.07.02.001.2.03	Belanja Modal	262.550.000,00	260.635.000,00	(1.915.000,00)	(0,73)
5.2	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**	206.577.227.490,00	175.676.131.149,00	(30.901.096.341,00)	(14,96)
5.2.01	**Tenaga Kerja**	13.886.459.089,00	12.098.529.702,00	(1.787.929.387,00)	(12,88)
5.2.01 . 2.01.02.001	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah	13.886.459.089,00	12.098.529.702,00	(1.787.929.387,00)	(12,88)
5.2.01 . 2.01.02.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.362.584.819,00	5.840.951.633,00	(521.633.186,00)	(8,20)
5.2.01 . 2.01.02.001.1.01	Belanja Pegawai	6.362.584.819,00	5.840.951.633,00	(521.633.186,00)	(8,20)
5.2.01 . 2.01.02.001.2	BELANJA LANGSUNG	7.523.874.270,00	6.257.578.069,00	(1.266.296.201,00)	(16,83)
5.2.01 . 2.01.02.001.2.01	Belanja Pegawai	253.825.000,00	136.481.000,00	(117.344.000,00)	(46,23)
5.2.01 . 2.01.02.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	6.993.209.720,00	5.922.338.569,00	(1.070.871.151,00)	(15,31)
5.2.01 . 2.01.02.001.2.03	Belanja Modal	276.839.550,00	198.758.500,00	(78.081.050,00)	(28,20)
5.2.05	**Lingkungan Hidup**	60.160.280.305,00	51.086.530.066,00	(9.073.750.239,00)	(15,08)
5.2.05 . 2.05.02.001	Dinas Lingkungan Hidup	60.160.280.305,00	51.086.530.066,00	(9.073.750.239,00)	(15,08)
5.2.05 . 2.05.02.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.733.438.905,00	15.310.315.853,00	(1.423.123.052,00)	(8,50)
5.2.05 . 2.05.02.001.1.01	Belanja Pegawai	16.733.438.905,00	15.310.315.853,00	(1.423.123.052,00)	(8,50)
5.2.05 . 2.05.02.001.2	BELANJA LANGSUNG	43.426.841.400,00	35.776.214.213,00	(7.650.627.187,00)	(17,62)
5.2.05 . 2.05.02.001.2.01	Belanja Pegawai	1.371.385.000,00	1.036.437.000,00	(334.948.000,00)	(24,42)
5.2.05 . 2.05.02.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	22.146.493.400,00	18.786.431.566,00	(3.360.061.834,00)	(15,17)
5.2.05 . 2.05.02.001.2.03	Belanja Modal	19.908.963.000,00	15.953.345.647,00	(3.955.617.353,00)	(19,87)
5.2.06	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	31.811.379.304,00	24.699.445.186,00	(7.111.934.118,00)	(22,36)
5.2.06 . 2.06.01.001	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.993.016.794,00	13.273.525.045,00	(1.719.491.749,00)	(11,47)
5.2.06 . 2.06.01.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.618.885.794,00	4.687.822.069,00	(931.063.725,00)	(16,57)
5.2.06 . 2.06.01.001.1.01	Belanja Pegawai	5.618.885.794,00	4.687.822.069,00	(931.063.725,00)	(16,57)
5.2.06 . 2.06.01.001.2	BELANJA LANGSUNG	9.374.131.000,00	8.585.702.976,00	(788.428.024,00)	(8,41)

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.06 . 2.06.01.001.2.01	Belanja Pegawai	241.744.000,00	173.880.200,00	(67.863.800,00)	(28,07)
5.2.06 . 2.06.01.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	8.700.287.000,00	7.986.632.776,00	(713.654.224,00)	(8,20)
5.2.06 . 2.06.01.001.2.03	Belanja Modal	432.100.000,00	425.190.000,00	(6.910.000,00)	(1,60)
5.2.06 . 2.06.02.001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.818.362.510,00	11.425.920.141,00	(5.392.442.369,00)	(32,06)
5.2.06 . 2.06.02.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.931.322.160,00	3.993.810.922,00	(937.511.238,00)	(19,01)
5.2.06 . 2.06.02.001.1.01	Belanja Pegawai	4.931.322.160,00	3.993.810.922,00	(937.511.238,00)	(19,01)
5.2.06 . 2.06.02.001.2	BELANJA LANGSUNG	11.887.040.350,00	7.432.109.219,00	(4.454.931.131,00)	(37,48)
5.2.06 . 2.06.02.001.2.01	Belanja Pegawai	128.800.000,00	118.425.000,00	(10.375.000,00)	(8,06)
5.2.06 . 2.06.02.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	11.653.240.350,00	7.245.229.219,00	(4.408.011.131,00)	(37,83)
5.2.06 . 2.06.02.001.2.03	Belanja Modal	105.000.000,00	68.455.000,00	(36.545.000,00)	(34,80)
5.2.09	**Perhubungan**	33.719.677.912,00	26.032.013.664,00	(7.687.664.248,00)	(22,80)
5.2.09 . 2.09.02.001	Dinas Perhubungan	33.719.677.912,00	26.032.013.664,00	(7.687.664.248,00)	(22,80)
5.2.09 . 2.09.02.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.940.177.912,00	7.642.540.491,00	(6.297.637.421,00)	(45,18)
5.2.09 . 2.09.02.001.1.01	Belanja Pegawai	13.940.177.912,00	7.642.540.491,00	(6.297.637.421,00)	(45,18)
5.2.09 . 2.09.02.001.2	BELANJA LANGSUNG	19.779.500.000,00	18.389.473.173,00	(1.390.026.827,00)	(7,03)
5.2.09 . 2.09.02.001.2.01	Belanja Pegawai	545.269.100,00	440.651.000,00	(104.618.100,00)	(19,19)
5.2.09 . 2.09.02.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	12.222.440.900,00	11.000.950.123,00	(1.221.490.777,00)	(9,99)
5.2.09 . 2.09.02.001.2.03	Belanja Modal	7.011.790.000,00	6.947.872.050,00	(63.917.950,00)	(0,91)
5.2.10	**Komunikasi dan Informatika**	15.122.615.716,00	14.430.734.790,00	(691.880.926,00)	(4,58)
5.2.10 . 2.10.01.001	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.122.615.716,00	14.430.734.790,00	(691.880.926,00)	(4,58)
5.2.10 . 2.10.01.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.710.398.716,00	6.623.438.133,00	(86.960.583,00)	(1,30)
5.2.10 . 2.10.01.001.1.01	Belanja Pegawai	6.710.398.716,00	6.623.438.133,00	(86.960.583,00)	(1,30)
5.2.10 . 2.10.01.001.2	BELANJA LANGSUNG	8.412.217.000,00	7.807.296.657,00	(604.920.343,00)	(7,19)
5.2.10 . 2.10.01.001.2.01	Belanja Pegawai	209.600.000,00	176.150.000,00	(33.450.000,00)	(15,96)
5.2.10 . 2.10.01.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	5.705.585.000,00	5.193.248.657,00	(512.336.343,00)	(8,98)
5.2.10 . 2.10.01.001.2.03	Belanja Modal	2.497.032.000,00	2.437.898.000,00	(59.134.000,00)	(2,37)
5.2.12	**Penanaman Modal**	9.545.938.570,00	8.885.425.868,00	(660.512.702,00)	(6,92)
5.2.12 . 2.12.02.001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	9.545.938.570,00	8.885.425.868,00	(660.512.702,00)	(6,92)
5.2.12 . 2.12.02.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.735.935.000,00	4.157.767.784,00	(578.167.216,00)	(12,21)
5.2.12 . 2.12.02.001.1.01	Belanja Pegawai	4.735.935.000,00	4.157.767.784,00	(578.167.216,00)	(12,21)
5.2.12 . 2.12.02.001.2	BELANJA LANGSUNG	4.810.003.570,00	4.727.658.084,00	(82.345.486,00)	(1,71)
5.2.12 . 2.12.02.001.2.01	Belanja Pegawai	160.000.000,00	158.452.000,00	(1.548.000,00)	(0,97)
5.2.12 . 2.12.02.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.550.003.570,00	3.471.920.844,00	(78.082.726,00)	(2,20)
5.2.12 . 2.12.02.001.2.03	Belanja Modal	1.100.000.000,00	1.097.285.240,00	(2.714.760,00)	(0,25)

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.13	**Kepemudaan dan Olahraga**	33.785.640.358,00	30.612.439.080,00	(3.173.201.278,00)	(9,39)
5.2.13 . 2.13.03.001	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	33.785.640.358,00	30.612.439.080,00	(3.173.201.278,00)	(9,39)
5.2.13 . 2.13.03.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.207.658.358,00	10.734.118.934,00	(473.539.424,00)	(4,23)
5.2.13 . 2.13.03.001.1.01	Belanja Pegawai	11.207.658.358,00	10.734.118.934,00	(473.539.424,00)	(4,23)
5.2.13 . 2.13.03.001.2	BELANJA LANGSUNG	22.577.982.000,00	19.878.320.146,00	(2.699.661.854,00)	(11,96)
5.2.13 . 2.13.03.001.2.01	Belanja Pegawai	1.413.699.000,00	1.295.349.000,00	(118.350.000,00)	(8,37)
5.2.13 . 2.13.03.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	16.917.294.800,00	14.464.891.702,00	(2.452.403.098,00)	(14,50)
5.2.13 . 2.13.03.001.2.03	Belanja Modal	4.246.988.200,00	4.118.079.444,00	(128.908.756,00)	(3,04)
5.2.18	**Kearsipan**	8.545.236.236,00	7.831.012.793,00	(714.223.443,00)	(8,36)
5.2.18 . 2.18.01.001	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	8.545.236.236,00	7.831.012.793,00	(714.223.443,00)	(8,36)
5.2.18 . 2.18.01.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.520.236.236,00	3.169.976.356,00	(350.259.880,00)	(9,95)
5.2.18 . 2.18.01.001.1.01	Belanja Pegawai	3.520.236.236,00	3.169.976.356,00	(350.259.880,00)	(9,95)
5.2.18 . 2.18.01.001.2	BELANJA LANGSUNG	5.025.000.000,00	4.661.036.437,00	(363.963.563,00)	(7,24)
5.2.18 . 2.18.01.001.2.01	Belanja Pegawai	254.360.000,00	246.760.500,00	(7.599.500,00)	(2,99)
5.2.18 . 2.18.01.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.026.735.900,00	2.796.054.188,00	(230.681.712,00)	(7,62)
5.2.18 . 2.18.01.001.2.03	Belanja Modal	1.743.904.100,00	1.618.221.749,00	(125.682.351,00)	(7,21)
5.3	**Urusan Pilihan**	97.218.954.606,00	85.981.475.613,00	(11.237.478.993,00)	(11,56)
5.3.01	**Kelautan dan Perikanan**	17.081.452.229,00	15.522.010.283,00	(1.559.441.946,00)	(9,13)
5.3.01 . 3.01.02.001	Dinas Perikanan dan Peternakan	17.081.452.229,00	15.522.010.283,00	(1.559.441.946,00)	(9,13)
5.3.01 . 3.01.02.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.028.528.754,00	8.983.900.591,00	(1.044.628.163,00)	(10,42)
5.3.01 . 3.01.02.001.1.01	Belanja Pegawai	10.028.528.754,00	8.983.900.591,00	(1.044.628.163,00)	(10,42)
5.3.01 . 3.01.02.001.2	BELANJA LANGSUNG	7.052.923.475,00	6.538.109.692,00	(514.813.783,00)	(7,30)
5.3.01 . 3.01.02.001.2.01	Belanja Pegawai	320.162.000,00	300.175.000,00	(19.987.000,00)	(6,24)
5.3.01 . 3.01.02.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	4.696.996.175,00	4.316.616.942,00	(380.379.233,00)	(8,10)
5.3.01 . 3.01.02.001.2.03	Belanja Modal	2.035.765.300,00	1.921.317.750,00	(114.447.550,00)	(5,62)
5.3.03	**Pertanian**	39.935.375.072,00	33.824.716.708,00	(6.110.658.364,00)	(15,30)
5.3.03 . 3.03.02.001	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	39.935.375.072,00	33.824.716.708,00	(6.110.658.364,00)	(15,30)
5.3.03 . 3.03.02.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.769.188.072,00	18.297.159.223,00	(4.472.028.849,00)	(19,64)
5.3.03 . 3.03.02.001.1.01	Belanja Pegawai	22.769.188.072,00	18.297.159.223,00	(4.472.028.849,00)	(19,64)
5.3.03 . 3.03.02.001.2	BELANJA LANGSUNG	17.166.187.000,00	15.527.557.485,00	(1.638.629.515,00)	(9,55)
5.3.03 . 3.03.02.001.2.01	Belanja Pegawai	222.625.000,00	153.725.000,00	(68.900.000,00)	(30,95)
5.3.03 . 3.03.02.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	15.586.097.000,00	14.044.822.485,00	(1.541.274.515,00)	(9,89)
5.3.03 . 3.03.02.001.2.03	Belanja Modal	1.357.465.000,00	1.329.010.000,00	(28.455.000,00)	(2,10)
5.3.07	**Perindustrian**	40.202.127.305,00	36.634.748.622,00	(3.567.378.683,00)	(8,87)

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.3.07 . 3.07.02.001	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	40.202.127.305,00	36.634.748.622,00	(3.567.378.683,00)	(8,87)
5.3.07 . 3.07.02.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.025.197.319,00	18.890.365.548,00	(2.134.831.771,00)	(10,15)
5.3.07 . 3.07.02.001.1.01	Belanja Pegawai	21.025.197.319,00	18.890.365.548,00	(2.134.831.771,00)	(10,15)
5.3.07 . 3.07.02.001.2	BELANJA LANGSUNG	19.176.929.986,00	17.744.383.074,00	(1.432.546.912,00)	(7,47)
5.3.07 . 3.07.02.001.2.01	Belanja Pegawai	391.320.000,00	321.690.000,00	(69.630.000,00)	(17,79)
5.3.07 . 3.07.02.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	11.103.923.986,00	10.324.059.882,00	(779.864.104,00)	(7,02)
5.3.07 . 3.07.02.001.2.03	Belanja Modal	7.681.686.000,00	7.098.633.192,00	(583.052.808,00)	(7,59)
5.4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	1.097.254.386.391,00	1.023.668.681.758,00	(73.585.704.633,00)	(6,71)
5.4.01	**Administrasi Pemerintahan**	248.864.841.740,00	220.005.780.457,00	(28.859.061.283,00)	(11,60)
5.4.01 . 4.01.01.001	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	24.995.989.121,00	23.846.483.969,00	(1.149.505.152,00)	(4,60)
5.4.01 . 4.01.01.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	24.995.989.121,00	23.846.483.969,00	(1.149.505.152,00)	(4,60)
5.4.01 . 4.01.01.001.1.01	Belanja Pegawai	24.995.989.121,00	23.846.483.969,00	(1.149.505.152,00)	(4,60)
5.4.01 . 4.01.02.001	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	772.863.007,00	768.176.572,00	(4.686.435,00)	(0,61)
5.4.01 . 4.01.02.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	772.863.007,00	768.176.572,00	(4.686.435,00)	(0,61)
5.4.01 . 4.01.02.001.1.01	Belanja Pegawai	772.863.007,00	768.176.572,00	(4.686.435,00)	(0,61)
5.4.01 . 4.01.03.001	Sekretariat Daerah	39.163.801.952,00	37.112.581.182,00	(2.051.220.770,00)	(5,24)
5.4.01 . 4.01.03.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.860.944.252,00	17.355.577.147,00	(505.367.105,00)	(2,83)
5.4.01 . 4.01.03.001.1.01	Belanja Pegawai	17.860.944.252,00	17.355.577.147,00	(505.367.105,00)	(2,83)
5.4.01 . 4.01.03.001.2	BELANJA LANGSUNG	21.302.857.700,00	19.757.004.035,00	(1.545.853.665,00)	(7,26)
5.4.01 . 4.01.03.001.2.01	Belanja Pegawai	1.959.060.000,00	1.741.043.500,00	(218.016.500,00)	(11,13)
5.4.01 . 4.01.03.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	17.569.516.800,00	16.359.133.650,00	(1.210.383.150,00)	(6,89)
5.4.01 . 4.01.03.001.2.03	Belanja Modal	1.774.280.900,00	1.656.826.885,00	(117.454.015,00)	(6,62)
5.4.01 . 4.01.04.001	Sekretariat DPRD	34.220.092.596,00	30.897.932.568,00	(3.322.160.028,00)	(9,71)
5.4.01 . 4.01.04.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.735.092.596,00	3.987.754.352,00	(747.338.244,00)	(15,78)
5.4.01 . 4.01.04.001.1.01	Belanja Pegawai	4.735.092.596,00	3.987.754.352,00	(747.338.244,00)	(15,78)
5.4.01 . 4.01.04.001.2	BELANJA LANGSUNG	29.485.000.000,00	26.910.178.216,00	(2.574.821.784,00)	(8,73)
5.4.01 . 4.01.04.001.2.01	Belanja Pegawai	152.000.000,00	120.125.000,00	(31.875.000,00)	(20,97)
5.4.01 . 4.01.04.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	28.908.000.000,00	26.584.763.216,00	(2.323.236.784,00)	(8,04)
5.4.01 . 4.01.04.001.2.03	Belanja Modal	425.000.000,00	205.290.000,00	(219.710.000,00)	(51,70)
5.4.01 . 4.01.06.001	Inspektorat	14.765.278.500,00	12.787.548.949,00	(1.977.729.551,00)	(13,39)
5.4.01 . 4.01.06.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.278.278.500,00	8.692.118.253,00	(1.586.160.247,00)	(15,43)
5.4.01 . 4.01.06.001.1.01	Belanja Pegawai	10.278.278.500,00	8.692.118.253,00	(1.586.160.247,00)	(15,43)
5.4.01 . 4.01.06.001.2	BELANJA LANGSUNG	4.487.000.000,00	4.095.430.696,00	(391.569.304,00)	(8,73)
5.4.01 . 4.01.06.001.2.01	Belanja Pegawai	1.980.500.000,00	1.880.825.000,00	(99.675.000,00)	(5,03)

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.4.01 . 4.01.06.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	2.366.400.000,00	2.078.491.696,00	(287.908.304,00)	(12,17)
5.4.01 . 4.01.06.001.2.03	Belanja Modal	140.100.000,00	136.114.000,00	(3.986.000,00)	(2,85)
5.4.01 . 4.01.09.001	Kecamatan Ajibarang	3.291.053.125,00	3.214.784.711,00	(76.268.414,00)	(2,32)
5.4.01 . 4.01.09.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.145.065.125,00	2.120.671.872,00	(24.393.253,00)	(1,14)
5.4.01 . 4.01.09.001.1.01	Belanja Pegawai	2.145.065.125,00	2.120.671.872,00	(24.393.253,00)	(1,14)
5.4.01 . 4.01.09.001.2	BELANJA LANGSUNG	1.145.988.000,00	1.094.112.839,00	(51.875.161,00)	(4,53)
5.4.01 . 4.01.09.001.2.01	Belanja Pegawai	111.626.000,00	103.016.000,00	(8.610.000,00)	(7,71)
5.4.01 . 4.01.09.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	807.220.703,00	766.190.542,00	(41.030.161,00)	(5,08)
5.4.01 . 4.01.09.001.2.03	Belanja Modal	227.141.297,00	224.906.297,00	(2.235.000,00)	(0,98)
5.4.01 . 4.01.10.001	Kecamatan Banyumas	3.580.203.354,00	2.916.127.535,00	(664.075.819,00)	(18,55)
5.4.01 . 4.01.10.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.426.361.354,00	1.865.085.056,00	(561.276.298,00)	(23,13)
5.4.01 . 4.01.10.001.1.01	Belanja Pegawai	2.426.361.354,00	1.865.085.056,00	(561.276.298,00)	(23,13)
5.4.01 . 4.01.10.001.2	BELANJA LANGSUNG	1.153.842.000,00	1.051.042.479,00	(102.799.521,00)	(8,91)
5.4.01 . 4.01.10.001.2.01	Belanja Pegawai	58.900.000,00	58.150.000,00	(750.000,00)	(1,27)
5.4.01 . 4.01.10.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	793.192.000,00	696.252.479,00	(96.939.521,00)	(12,22)
5.4.01 . 4.01.10.001.2.03	Belanja Modal	301.750.000,00	296.640.000,00	(5.110.000,00)	(1,69)
5.4.01 . 4.01.11.001	Kecamatan Baturraden	2.570.200.805,00	2.285.952.998,00	(284.247.807,00)	(11,06)
5.4.01 . 4.01.11.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.781.700.805,00	1.616.395.420,00	(165.305.385,00)	(9,28)
5.4.01 . 4.01.11.001.1.01	Belanja Pegawai	1.781.700.805,00	1.616.395.420,00	(165.305.385,00)	(9,28)
5.4.01 . 4.01.11.001.2	BELANJA LANGSUNG	788.500.000,00	669.557.578,00	(118.942.422,00)	(15,08)
5.4.01 . 4.01.11.001.2.01	Belanja Pegawai	48.900.000,00	48.075.000,00	(825.000,00)	(1,69)
5.4.01 . 4.01.11.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	638.610.000,00	540.441.378,00	(98.168.622,00)	(15,37)
5.4.01 . 4.01.11.001.2.03	Belanja Modal	100.990.000,00	81.041.200,00	(19.948.800,00)	(19,75)
5.4.01 . 4.01.12.001	Kecamatan Cilongok	3.468.633.946,00	3.111.868.682,00	(356.765.264,00)	(10,29)
5.4.01 . 4.01.12.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.381.453.946,00	2.094.203.630,00	(287.250.316,00)	(12,06)
5.4.01 . 4.01.12.001.1.01	Belanja Pegawai	2.381.453.946,00	2.094.203.630,00	(287.250.316,00)	(12,06)
5.4.01 . 4.01.12.001.2	BELANJA LANGSUNG	1.087.180.000,00	1.017.665.052,00	(69.514.948,00)	(6,39)
5.4.01 . 4.01.12.001.2.01	Belanja Pegawai	71.680.000,00	68.480.000,00	(3.200.000,00)	(4,46)
5.4.01 . 4.01.12.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	759.686.000,00	704.415.302,00	(55.270.698,00)	(7,28)
5.4.01 . 4.01.12.001.2.03	Belanja Modal	255.814.000,00	244.769.750,00	(11.044.250,00)	(4,32)
5.4.01 . 4.01.13.001	Kecamatan Gumelar	2.867.693.754,00	1.904.251.536,00	(963.442.218,00)	(33,60)
5.4.01 . 4.01.13.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.900.693.754,00	1.122.754.496,00	(777.939.258,00)	(40,93)
5.4.01 . 4.01.13.001.1.01	Belanja Pegawai	1.900.693.754,00	1.122.754.496,00	(777.939.258,00)	(40,93)
5.4.01 . 4.01.13.001.2	BELANJA LANGSUNG	967.000.000,00	781.497.040,00	(185.502.960,00)	(19,18)

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.4.01 . 4.01.13.001.2.01	Belanja Pegawai	153.600.000,00	146.914.200,00	(6.685.800,00)	(4,35)
5.4.01 . 4.01.13.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	651.400.000,00	472.582.840,00	(178.817.160,00)	(27,45)
5.4.01 . 4.01.13.001.2.03	Belanja Modal	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00
5.4.01 . 4.01.14.001	Kecamatan Jatilawang	2.769.037.870,00	2.441.210.526,00	(327.827.344,00)	(11,84)
5.4.01 . 4.01.14.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.859.537.870,00	1.675.974.545,00	(183.563.325,00)	(9,87)
5.4.01 . 4.01.14.001.1.01	Belanja Pegawai	1.859.537.870,00	1.675.974.545,00	(183.563.325,00)	(9,87)
5.4.01 . 4.01.14.001.2	BELANJA LANGSUNG	909.500.000,00	765.235.981,00	(144.264.019,00)	(15,86)
5.4.01 . 4.01.14.001.2.01	Belanja Pegawai	40.600.000,00	40.450.000,00	(150.000,00)	(0,37)
5.4.01 . 4.01.14.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	655.740.000,00	518.610.981,00	(137.129.019,00)	(20,91)
5.4.01 . 4.01.14.001.2.03	Belanja Modal	213.160.000,00	206.175.000,00	(6.985.000,00)	(3,28)
5.4.01 . 4.01.15.001	Kecamatan Kalibagor	2.911.663.836,00	2.298.335.639,00	(613.328.197,00)	(21,06)
5.4.01 . 4.01.15.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.984.648.836,00	1.520.021.860,00	(464.626.976,00)	(23,41)
5.4.01 . 4.01.15.001.1.01	Belanja Pegawai	1.984.648.836,00	1.520.021.860,00	(464.626.976,00)	(23,41)
5.4.01 . 4.01.15.001.2	BELANJA LANGSUNG	927.015.000,00	778.313.779,00	(148.701.221,00)	(16,04)
5.4.01 . 4.01.15.001.2.01	Belanja Pegawai	59.764.000,00	47.100.000,00	(12.664.000,00)	(21,19)
5.4.01 . 4.01.15.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	660.823.300,00	529.253.779,00	(131.569.521,00)	(19,91)
5.4.01 . 4.01.15.001.2.03	Belanja Modal	206.427.700,00	201.960.000,00	(4.467.700,00)	(2,16)
5.4.01 . 4.01.16.001	Kecamatan Karanglewas	3.153.611.406,00	2.756.854.476,00	(396.756.930,00)	(12,58)
5.4.01 . 4.01.16.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.238.611.406,00	2.052.750.456,00	(185.860.950,00)	(8,30)
5.4.01 . 4.01.16.001.1.01	Belanja Pegawai	2.238.611.406,00	2.052.750.456,00	(185.860.950,00)	(8,30)
5.4.01 . 4.01.16.001.2	BELANJA LANGSUNG	915.000.000,00	704.104.020,00	(210.895.980,00)	(23,05)
5.4.01 . 4.01.16.001.2.01	Belanja Pegawai	71.900.000,00	61.390.000,00	(10.510.000,00)	(14,62)
5.4.01 . 4.01.16.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	748.440.944,00	549.479.020,00	(198.961.924,00)	(26,58)
5.4.01 . 4.01.16.001.2.03	Belanja Modal	94.659.056,00	93.235.000,00	(1.424.056,00)	(1,50)
5.4.01 . 4.01.17.001	Kecamatan Kebasen	2.748.002.350,00	2.501.055.411,00	(246.946.939,00)	(8,99)
5.4.01 . 4.01.17.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.578.780.350,00	1.336.190.595,00	(242.589.755,00)	(15,37)
5.4.01 . 4.01.17.001.1.01	Belanja Pegawai	1.578.780.350,00	1.336.190.595,00	(242.589.755,00)	(15,37)
5.4.01 . 4.01.17.001.2	BELANJA LANGSUNG	1.169.222.000,00	1.164.864.816,00	(4.357.184,00)	(0,37)
5.4.01 . 4.01.17.001.2.01	Belanja Pegawai	43.350.000,00	43.100.000,00	(250.000,00)	(0,58)
5.4.01 . 4.01.17.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	689.022.000,00	685.562.816,00	(3.459.184,00)	(0,50)
5.4.01 . 4.01.17.001.2.03	Belanja Modal	436.850.000,00	436.202.000,00	(648.000,00)	(0,15)
5.4.01 . 4.01.18.001	Kecamatan Kedungbanteng	2.826.356.703,00	2.598.201.381,00	(228.155.322,00)	(8,07)
5.4.01 . 4.01.18.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.919.131.703,00	1.741.843.934,00	(177.287.769,00)	(9,24)
5.4.01 . 4.01.18.001.1.01	Belanja Pegawai	1.919.131.703,00	1.741.843.934,00	(177.287.769,00)	(9,24)

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.4.01 . 4.01.18.001.2	BELANJA LANGSUNG	907.225.000,00	856.357.447,00	(50.867.553,00)	(5,61)
5.4.01 . 4.01.18.001.2.01	Belanja Pegawai	68.900.000,00	68.900.000,00	0,00	0,00
5.4.01 . 4.01.18.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	590.450.000,00	540.657.947,00	(49.792.053,00)	(8,43)
5.4.01 . 4.01.18.001.2.03	Belanja Modal	247.875.000,00	246.799.500,00	(1.075.500,00)	(0,43)
5.4.01 . 4.01.19.001	Kecamatan Kembaran	3.827.673.000,00	3.494.905.815,00	(332.767.185,00)	(8,69)
5.4.01 . 4.01.19.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.305.300.000,00	2.075.766.574,00	(229.533.426,00)	(9,96)
5.4.01 . 4.01.19.001.1.01	Belanja Pegawai	2.305.300.000,00	2.075.766.574,00	(229.533.426,00)	(9,96)
5.4.01 . 4.01.19.001.2	BELANJA LANGSUNG	1.522.373.000,00	1.419.139.241,00	(103.233.759,00)	(6,78)
5.4.01 . 4.01.19.001.2.01	Belanja Pegawai	83.625.000,00	76.535.000,00	(7.090.000,00)	(8,48)
5.4.01 . 4.01.19.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	938.325.000,00	853.157.144,00	(85.167.856,00)	(9,08)
5.4.01 . 4.01.19.001.2.03	Belanja Modal	500.423.000,00	489.447.097,00	(10.975.903,00)	(2,19)
5.4.01 . 4.01.20.001	Kecamatan Kemranjen	3.382.424.021,00	2.425.708.796,00	(956.715.225,00)	(28,28)
5.4.01 . 4.01.20.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.379.424.021,00	1.612.640.766,00	(766.783.255,00)	(32,23)
5.4.01 . 4.01.20.001.1.01	Belanja Pegawai	2.379.424.021,00	1.612.640.766,00	(766.783.255,00)	(32,23)
5.4.01 . 4.01.20.001.2	BELANJA LANGSUNG	1.003.000.000,00	813.068.030,00	(189.931.970,00)	(18,94)
5.4.01 . 4.01.20.001.2.01	Belanja Pegawai	68.700.000,00	62.080.000,00	(6.620.000,00)	(9,64)
5.4.01 . 4.01.20.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	882.007.500,00	703.163.530,00	(178.843.970,00)	(20,28)
5.4.01 . 4.01.20.001.2.03	Belanja Modal	52.292.500,00	47.824.500,00	(4.468.000,00)	(8,54)
5.4.01 . 4.01.21.001	Kecamatan Lumbir	2.939.593.232,00	2.722.840.502,00	(216.752.730,00)	(7,37)
5.4.01 . 4.01.21.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.767.493.232,00	1.563.647.834,00	(203.845.398,00)	(11,53)
5.4.01 . 4.01.21.001.1.01	Belanja Pegawai	1.767.493.232,00	1.563.647.834,00	(203.845.398,00)	(11,53)
5.4.01 . 4.01.21.001.2	BELANJA LANGSUNG	1.172.100.000,00	1.159.192.668,00	(12.907.332,00)	(1,10)
5.4.01 . 4.01.21.001.2.01	Belanja Pegawai	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00
5.4.01 . 4.01.21.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	785.600.000,00	774.354.668,00	(11.245.332,00)	(1,43)
5.4.01 . 4.01.21.001.2.03	Belanja Modal	333.000.000,00	331.338.000,00	(1.662.000,00)	(0,50)
5.4.01 . 4.01.22.001	Kecamatan Patikraja	3.169.066.844,00	2.505.868.690,00	(663.198.154,00)	(20,93)
5.4.01 . 4.01.22.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.960.666.844,00	1.463.000.371,00	(497.666.473,00)	(25,38)
5.4.01 . 4.01.22.001.1.01	Belanja Pegawai	1.960.666.844,00	1.463.000.371,00	(497.666.473,00)	(25,38)
5.4.01 . 4.01.22.001.2	BELANJA LANGSUNG	1.208.400.000,00	1.042.868.319,00	(165.531.681,00)	(13,70)
5.4.01 . 4.01.22.001.2.01	Belanja Pegawai	50.132.500,00	45.900.000,00	(4.232.500,00)	(8,44)
5.4.01 . 4.01.22.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	823.267.500,00	675.757.319,00	(147.510.181,00)	(17,92)
5.4.01 . 4.01.22.001.2.03	Belanja Modal	335.000.000,00	321.211.000,00	(13.789.000,00)	(4,12)
5.4.01 . 4.01.23.001	Kecamatan Pekuncen	3.308.848.806,00	2.872.753.923,00	(436.094.883,00)	(13,18)
5.4.01 . 4.01.23.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.109.248.806,00	1.829.854.583,00	(279.394.223,00)	(13,25)

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.4.01 . 4.01.23.001.1.01	Belanja Pegawai	2.109.248.806,00	1.829.854.583,00	(279.394.223,00)	(13,25)
5.4.01 . 4.01.23.001.2	BELANJA LANGSUNG	1.199.600.000,00	1.042.899.340,00	(156.700.660,00)	(13,06)
5.4.01 . 4.01.23.001.2.01	Belanja Pegawai	69.256.000,00	54.502.000,00	(14.754.000,00)	(21,30)
5.4.01 . 4.01.23.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	1.011.334.000,00	872.464.180,00	(138.869.820,00)	(13,73)
5.4.01 . 4.01.23.001.2.03	Belanja Modal	119.010.000,00	115.933.160,00	(3.076.840,00)	(2,59)
5.4.01 . 4.01.24.001	Kecamatan Purwojati	2.457.439.262,00	1.914.461.520,00	(542.977.742,00)	(22,10)
5.4.01 . 4.01.24.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.679.339.262,00	1.321.986.034,00	(357.353.228,00)	(21,28)
5.4.01 . 4.01.24.001.1.01	Belanja Pegawai	1.679.339.262,00	1.321.986.034,00	(357.353.228,00)	(21,28)
5.4.01 . 4.01.24.001.2	BELANJA LANGSUNG	778.100.000,00	592.475.486,00	(185.624.514,00)	(23,86)
5.4.01 . 4.01.24.001.2.01	Belanja Pegawai	30.875.000,00	20.400.000,00	(10.475.000,00)	(33,93)
5.4.01 . 4.01.24.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	583.002.000,00	415.215.486,00	(167.786.514,00)	(28,78)
5.4.01 . 4.01.24.001.2.03	Belanja Modal	164.223.000,00	156.860.000,00	(7.363.000,00)	(4,48)
5.4.01 . 4.01.25.001	Kecamatan Purwokerto Barat	13.811.786.002,00	13.004.275.434,00	(807.510.568,00)	(5,85)
5.4.01 . 4.01.25.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.055.199.002,00	6.818.213.927,00	(236.985.075,00)	(3,36)
5.4.01 . 4.01.25.001.1.01	Belanja Pegawai	7.055.199.002,00	6.818.213.927,00	(236.985.075,00)	(3,36)
5.4.01 . 4.01.25.001.2	BELANJA LANGSUNG	6.756.587.000,00	6.186.061.507,00	(570.525.493,00)	(8,44)
5.4.01 . 4.01.25.001.2.01	Belanja Pegawai	457.763.000,00	415.719.550,00	(42.043.450,00)	(9,18)
5.4.01 . 4.01.25.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	4.458.724.100,00	3.960.758.214,00	(497.965.886,00)	(11,17)
5.4.01 . 4.01.25.001.2.03	Belanja Modal	1.840.099.900,00	1.809.583.743,00	(30.516.157,00)	(1,66)
5.4.01 . 4.01.26.001	Kecamatan Purwokerto Selatan	14.923.078.571,00	12.735.943.784,00	(2.187.134.787,00)	(14,66)
5.4.01 . 4.01.26.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.672.035.571,00	6.067.032.211,00	(1.605.003.360,00)	(20,92)
5.4.01 . 4.01.26.001.1.01	Belanja Pegawai	7.672.035.571,00	6.067.032.211,00	(1.605.003.360,00)	(20,92)
5.4.01 . 4.01.26.001.2	BELANJA LANGSUNG	7.251.043.000,00	6.668.911.573,00	(582.131.427,00)	(8,03)
5.4.01 . 4.01.26.001.2.01	Belanja Pegawai	369.676.250,00	331.836.500,00	(37.839.750,00)	(10,24)
5.4.01 . 4.01.26.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	5.421.235.770,00	5.009.155.573,00	(412.080.197,00)	(7,60)
5.4.01 . 4.01.26.001.2.03	Belanja Modal	1.460.130.980,00	1.327.919.500,00	(132.211.480,00)	(9,05)
5.4.01 . 4.01.27.001	Kecamatan Purwokerto Timur	12.197.547.445,00	10.742.304.802,00	(1.455.242.643,00)	(11,93)
5.4.01 . 4.01.27.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.274.901.445,00	5.408.964.914,00	(865.936.531,00)	(13,80)
5.4.01 . 4.01.27.001.1.01	Belanja Pegawai	6.274.901.445,00	5.408.964.914,00	(865.936.531,00)	(13,80)
5.4.01 . 4.01.27.001.2	BELANJA LANGSUNG	5.922.646.000,00	5.333.339.888,00	(589.306.112,00)	(9,95)
5.4.01 . 4.01.27.001.2.01	Belanja Pegawai	276.486.000,00	246.312.000,00	(30.174.000,00)	(10,91)
5.4.01 . 4.01.27.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.829.768.915,00	3.387.891.788,00	(441.877.127,00)	(11,54)
5.4.01 . 4.01.27.001.2.03	Belanja Modal	1.816.391.085,00	1.699.136.100,00	(117.254.985,00)	(6,46)
5.4.01 . 4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Utara	16.094.242.174,00	13.098.270.522,00	(2.995.971.652,00)	(18,62)

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.4.01 . 4.01.28.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.363.955.174,00	6.890.642.248,00	(2.473.312.926,00)	(26,41)
5.4.01 . 4.01.28.001.1.01	Belanja Pegawai	9.363.955.174,00	6.890.642.248,00	(2.473.312.926,00)	(26,41)
5.4.01 . 4.01.28.001.2	BELANJA LANGSUNG	6.730.287.000,00	6.207.628.274,00	(522.658.726,00)	(7,77)
5.4.01 . 4.01.28.001.2.01	Belanja Pegawai	337.860.000,00	287.075.050,00	(50.784.950,00)	(15,03)
5.4.01 . 4.01.28.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	4.839.790.700,00	4.456.685.174,00	(383.105.526,00)	(7,92)
5.4.01 . 4.01.28.001.2.03	Belanja Modal	1.552.636.300,00	1.463.868.050,00	(88.768.250,00)	(5,72)
5.4.01 . 4.01.29.001	Kecamatan Rawalo	2.666.542.530,00	2.105.151.321,00	(561.391.209,00)	(21,05)
5.4.01 . 4.01.29.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.929.042.530,00	1.472.772.819,00	(456.269.711,00)	(23,65)
5.4.01 . 4.01.29.001.1.01	Belanja Pegawai	1.929.042.530,00	1.472.772.819,00	(456.269.711,00)	(23,65)
5.4.01 . 4.01.29.001.2	BELANJA LANGSUNG	737.500.000,00	632.378.502,00	(105.121.498,00)	(14,25)
5.4.01 . 4.01.29.001.2.01	Belanja Pegawai	45.875.000,00	39.550.000,00	(6.325.000,00)	(13,79)
5.4.01 . 4.01.29.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	588.125.000,00	499.571.802,00	(88.553.198,00)	(15,06)
5.4.01 . 4.01.29.001.2.03	Belanja Modal	103.500.000,00	93.256.700,00	(10.243.300,00)	(9,90)
5.4.01 . 4.01.30.001	Kecamatan Sokaraja	3.653.201.910,00	2.935.777.699,00	(717.424.211,00)	(19,64)
5.4.01 . 4.01.30.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.665.850.910,00	2.041.976.105,00	(623.874.805,00)	(23,40)
5.4.01 . 4.01.30.001.1.01	Belanja Pegawai	2.665.850.910,00	2.041.976.105,00	(623.874.805,00)	(23,40)
5.4.01 . 4.01.30.001.2	BELANJA LANGSUNG	987.351.000,00	893.801.594,00	(93.549.406,00)	(9,47)
5.4.01 . 4.01.30.001.2.01	Belanja Pegawai	64.450.000,00	54.000.000,00	(10.450.000,00)	(16,21)
5.4.01 . 4.01.30.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	627.901.000,00	550.575.594,00	(77.325.406,00)	(12,31)
5.4.01 . 4.01.30.001.2.03	Belanja Modal	295.000.000,00	289.226.000,00	(5.774.000,00)	(1,96)
5.4.01 . 4.01.31.001	Kecamatan Somagede	4.409.328.534,00	2.824.229.875,00	(1.585.098.659,00)	(35,95)
5.4.01 . 4.01.31.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.838.404.534,00	1.761.384.478,00	(77.020.056,00)	(4,19)
5.4.01 . 4.01.31.001.1.01	Belanja Pegawai	1.838.404.534,00	1.761.384.478,00	(77.020.056,00)	(4,19)
5.4.01 . 4.01.31.001.2	BELANJA LANGSUNG	2.570.924.000,00	1.062.845.397,00	(1.508.078.603,00)	(58,66)
5.4.01 . 4.01.31.001.2.01	Belanja Pegawai	54.250.000,00	47.925.000,00	(6.325.000,00)	(11,66)
5.4.01 . 4.01.31.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	758.774.000,00	696.288.537,00	(62.485.463,00)	(8,24)
5.4.01 . 4.01.31.001.2.03	Belanja Modal	1.757.900.000,00	318.631.860,00	(1.439.268.140,00)	(81,87)
5.4.01 . 4.01.32.001	Kecamatan Sumbang	2.750.631.888,00	2.501.254.029,00	(249.377.859,00)	(9,07)
5.4.01 . 4.01.32.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.795.254.888,00	1.607.616.052,00	(187.638.836,00)	(10,45)
5.4.01 . 4.01.32.001.1.01	Belanja Pegawai	1.795.254.888,00	1.607.616.052,00	(187.638.836,00)	(10,45)
5.4.01 . 4.01.32.001.2	BELANJA LANGSUNG	955.377.000,00	893.637.977,00	(61.739.023,00)	(6,46)
5.4.01 . 4.01.32.001.2.01	Belanja Pegawai	107.624.000,00	86.203.000,00	(21.421.000,00)	(19,90)
5.4.01 . 4.01.32.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	647.903.000,00	611.704.977,00	(36.198.023,00)	(5,59)
5.4.01 . 4.01.32.001.2.03	Belanja Modal	199.850.000,00	195.730.000,00	(4.120.000,00)	(2,06)

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.4.01 . 4.01.33.001	Kecamatan Sumpiuh	8.373.249.996,00	7.163.857.255,00	(1.209.392.741,00)	(14,44)
5.4.01 . 4.01.33.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.579.901.996,00	3.636.959.520,00	(942.942.476,00)	(20,59)
5.4.01 . 4.01.33.001.1.01	Belanja Pegawai	4.579.901.996,00	3.636.959.520,00	(942.942.476,00)	(20,59)
5.4.01 . 4.01.33.001.2	BELANJA LANGSUNG	3.793.348.000,00	3.526.897.735,00	(266.450.265,00)	(7,02)
5.4.01 . 4.01.33.001.2.01	Belanja Pegawai	151.025.000,00	136.085.000,00	(14.940.000,00)	(9,89)
5.4.01 . 4.01.33.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	2.237.672.000,00	2.023.599.335,00	(214.072.665,00)	(9,57)
5.4.01 . 4.01.33.001.2.03	Belanja Modal	1.404.651.000,00	1.367.213.400,00	(37.437.600,00)	(2,67)
5.4.01 . 4.01.34.001	Kecamatan Tambak	3.398.295.518,00	2.507.179.465,00	(891.116.053,00)	(26,22)
5.4.01 . 4.01.34.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.352.995.518,00	1.568.454.598,00	(784.540.920,00)	(33,34)
5.4.01 . 4.01.34.001.1.01	Belanja Pegawai	2.352.995.518,00	1.568.454.598,00	(784.540.920,00)	(33,34)
5.4.01 . 4.01.34.001.2	BELANJA LANGSUNG	1.045.300.000,00	938.724.867,00	(106.575.133,00)	(10,20)
5.4.01 . 4.01.34.001.2.01	Belanja Pegawai	53.500.000,00	46.545.000,00	(6.955.000,00)	(13,00)
5.4.01 . 4.01.34.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	680.476.000,00	588.630.867,00	(91.845.133,00)	(13,50)
5.4.01 . 4.01.34.001.2.03	Belanja Modal	311.324.000,00	303.549.000,00	(7.775.000,00)	(2,50)
5.4.01 . 4.01.35.001	Kecamatan Wangon	3.397.409.682,00	3.009.630.890,00	(387.778.792,00)	(11,41)
5.4.01 . 4.01.35.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.087.689.682,00	1.751.814.897,00	(335.874.785,00)	(16,09)
5.4.01 . 4.01.35.001.1.01	Belanja Pegawai	2.087.689.682,00	1.751.814.897,00	(335.874.785,00)	(16,09)
5.4.01 . 4.01.35.001.2	BELANJA LANGSUNG	1.309.720.000,00	1.257.815.993,00	(51.904.007,00)	(3,96)
5.4.01 . 4.01.35.001.2.01	Belanja Pegawai	65.525.000,00	60.375.000,00	(5.150.000,00)	(7,86)
5.4.01 . 4.01.35.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	805.040.000,00	759.535.993,00	(45.504.007,00)	(5,65)
5.4.01 . 4.01.35.001.2.03	Belanja Modal	439.155.000,00	437.905.000,00	(1.250.000,00)	(0,28)
5.4.02	**Perencanaan**	10.416.278.140,00	9.219.373.627,00	(1.196.904.513,00)	(11,49)
5.4.02 . 4.02.01.001	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.416.278.140,00	9.219.373.627,00	(1.196.904.513,00)	(11,49)
5.4.02 . 4.02.01.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.976.370.381,00	4.559.367.233,00	(417.003.148,00)	(8,38)
5.4.02 . 4.02.01.001.1.01	Belanja Pegawai	4.976.370.381,00	4.559.367.233,00	(417.003.148,00)	(8,38)
5.4.02 . 4.02.01.001.2	BELANJA LANGSUNG	5.439.907.759,00	4.660.006.394,00	(779.901.365,00)	(14,34)
5.4.02 . 4.02.01.001.2.01	Belanja Pegawai	251.875.000,00	152.225.000,00	(99.650.000,00)	(39,56)
5.4.02 . 4.02.01.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	4.852.032.759,00	4.185.137.394,00	(666.895.365,00)	(13,74)
5.4.02 . 4.02.01.001.2.03	Belanja Modal	336.000.000,00	322.644.000,00	(13.356.000,00)	(3,98)
5.4.03	**Keuangan**	805.457.625.715,00	771.579.374.501,00	(33.878.251.214,00)	(4,21)
5.4.03 . 4.03.01.001	Badan Keuangan Daerah	64.338.601.615,00	59.478.078.806,00	(4.860.522.809,00)	(7,55)
5.4.03 . 4.03.01.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	20.759.488.079,00	19.472.385.765,00	(1.287.102.314,00)	(6,20)
5.4.03 . 4.03.01.001.1.01	Belanja Pegawai	20.759.488.079,00	19.472.385.765,00	(1.287.102.314,00)	(6,20)
5.4.03 . 4.03.01.001.2	BELANJA LANGSUNG	43.579.113.536,00	40.005.693.041,00	(3.573.420.495,00)	(8,20)

SatriaKeuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.4.03 . 4.03.01.001.2.01	Belanja Pegawai	1.066.911.500,00	657.752.000,00	(409.159.500,00)	(38,35)
5.4.03 . 4.03.01.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	37.472.903.036,00	35.071.407.141,00	(2.401.495.895,00)	(6,41)
5.4.03 . 4.03.01.001.2.03	Belanja Modal	5.039.299.000,00	4.276.533.900,00	(762.765.100,00)	(15,14)
5.4.03 . 4.03.01.002	Badan Keuangan Daerah - PPKD	741.119.024.100,00	712.101.295.695,00	(29.017.728.405,00)	(3,92)
5.4.03 . 4.03.01.002.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	741.119.024.100,00	712.101.295.695,00	(29.017.728.405,00)	(3,92)
5.4.03 . 4.03.01.002.1.04	Belanja Hibah	48.456.270.000,00	40.857.344.650,00	(7.598.925.350,00)	(15,68)
5.4.03 . 4.03.01.002.1.05	Belanja Bantuan Sosial	16.061.681.200,00	13.859.458.800,00	(2.202.222.400,00)	(13,71)
5.4.03 . 4.03.01.002.1.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	25.041.355.300,00	25.041.355.300,00	0,00	0,00
5.4.03 . 4.03.01.002.1.07	Belanja Bantuan Keuangan	648.559.717.600,00	631.809.266.871,00	(16.750.450.729,00)	(2,58)
5.4.03 . 4.03.01.002.1.08	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	533.870.074,00	(2.466.129.926,00)	(82,20)
5.4.04	**Kepegawaian**	32.515.640.796,00	22.864.153.173,00	(9.651.487.623,00)	(29,68)
5.4.04 . 4.04.01.001	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	32.515.640.796,00	22.864.153.173,00	(9.651.487.623,00)	(29,68)
5.4.04 . 4.04.01.001.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.382.075.610,00	14.818.309.430,00	(7.563.766.180,00)	(33,79)
5.4.04 . 4.04.01.001.1.01	Belanja Pegawai	22.382.075.610,00	14.818.309.430,00	(7.563.766.180,00)	(33,79)
5.4.04 . 4.04.01.001.2	BELANJA LANGSUNG	10.133.565.186,00	8.045.843.743,00	(2.087.721.443,00)	(20,60)
5.4.04 . 4.04.01.001.2.01	Belanja Pegawai	784.189.000,00	672.395.000,00	(111.794.000,00)	(14,26)
5.4.04 . 4.04.01.001.2.02	Belanja Barang dan Jasa	8.945.835.686,00	6.997.933.243,00	(1.947.902.443,00)	(21,77)
5.4.04 . 4.04.01.001.2.03	Belanja Modal	403.540.500,00	375.515.500,00	(28.025.000,00)	(6,94)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**253.245.329.675,00**	**265.329.329.675,23**	**12.084.000.000,23**	**4,77**
6.4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	253.245.329.675,00	265.329.329.675,23	12.084.000.000,23	4,77
6.4.03	**Keuangan**	253.245.329.675,00	265.329.329.675,23	12.084.000.000,23	4,77
6.4.03 . 4.03.01.002	Badan Keuangan Daerah - PPKD	327.445.329.675,00	315.361.329.675,23	(12.083.999.999,77)	(3,69)
6.4.03 . 4.03.01.002.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	290.345.329.675,00	290.345.329.675,23	0,23	0,00
6.4.03 . 4.03.01.002.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	290.345.329.675,00	290.345.329.675,23	0,23	0,00
6.4.03 . 4.03.01.002.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	37.100.000.000,00	25.016.000.000,00	(12.084.000.000,00)	(32,57)
6.4.03 . 4.03.01.002.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	34.600.000.000,00	23.435.000.000,00	(11.165.000.000,00)	(32,27)
6.4.03 . 4.03.01.002.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00	1.581.000.000,00	(919.000.000,00)	(36,76)

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

SatriaKeuangan

Lampiran I.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.001 Dinas Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.01 . 01.001.0.00.000.4	**PENDAPATAN**	**0,00**	**1.410.374.318,00**	**1.410.374.318,00**	**100,00**
1.01 . 01.001.0.00.000.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	0,00	1.410.374.318,00	1.410.374.318,00	100,00
1.01 . 01.001.0.00.000.4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	0,00	17.227.000,00	17.227.000,00	100,00
1.01 . 01.001.0.00.000.4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	1.393.147.318,00	1.393.147.318,00	100,00
1.01 . 01.001.0.00.000.5	**BELANJA**	**1.187.940.324.875,00**	**1.124.651.875.708,00**	**(63.288.449.167,00)**	**(5,33)**
1.01 . 01.001.0.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	919.109.920.978,00	867.505.616.109,00	(51.604.304.869,00)	(5,61)
1.01 . 01.001.0.00.000.5.1.01	Belanja Pegawai	919.109.920.978,00	867.505.616.109,00	(51.604.304.869,00)	(5,61)
1.01 . 01.001.0.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	268.830.403.897,00	257.146.259.599,00	(11.684.144.298,00)	(4,35)
1.01 . 01.001.1.01	**Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat**	10.852.212.000,00	8.706.120.566,00	(2.146.091.434,00)	(19,78)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini SKB Kalibagor**	50.000.000,00	49.992.500,00	(7.500,00)	(0,02)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	46.992.500,00	(7.500,00)	(0,02)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.03	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.001	**Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini SKB Purwokerto**	50.000.000,00	43.122.500,00	(6.877.500,00)	(13,76)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	43.122.500,00	(6.877.500,00)	(13,76)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini SKB Ajibarang**	50.000.000,00	47.892.000,00	(2.108.000,00)	(4,22)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	35.100.000,00	32.992.000,00	(2.108.000,00)	(6,01)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.03	Belanja Modal	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00

SatriaKeuangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.01 . 01.001.1.01.001	**Operasional Tim Manajemen BOP Kabupaten**	160.000.000,00	151.912.950,00	(8.087.050,00)	(5,05)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.01	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	151.300.000,00	145.212.950,00	(6.087.050,00)	(4,02)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.03	Belanja Modal	7.000.000,00	6.700.000,00	(300.000,00)	(4,29)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Bantuan Biaya Operasional PAUD (BOP)**	330.000.000,00	244.826.400,00	(85.173.600,00)	(25,81)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	295.750.000,00	214.776.400,00	(80.973.600,00)	(27,38)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.03	Belanja Modal	34.250.000,00	30.050.000,00	(4.200.000,00)	(12,26)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Pembinaan Pendidikan Keluarga/Pokja Pendidikan Keluarga**	75.000.000,00	60.401.500,00	(14.598.500,00)	(19,46)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.01	Belanja Pegawai	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	74.880.000,00	60.401.500,00	(14.478.500,00)	(19,34)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat, PAUD Bertprestasi dan Gebyar PAUD**	240.000.000,00	211.676.500,00	(28.323.500,00)	(11,80)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.01	Belanja Pegawai	4.080.000,00	3.800.000,00	(280.000,00)	(6,86)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	235.920.000,00	207.876.500,00	(28.043.500,00)	(11,89)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Fasilitasi Kegiatan Bunda PAUD**	175.000.000,00	160.770.000,00	(14.230.000,00)	(8,13)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.01	Belanja Pegawai	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	174.200.000,00	160.770.000,00	(13.430.000,00)	(7,71)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan (life skill) SKB Purwokerto**	100.000.000,00	87.530.805,00	(12.469.195,00)	(12,47)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000,00	78.930.805,00	(12.069.195,00)	(13,26)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.03	Belanja Modal	9.000.000,00	8.600.000,00	(400.000,00)	(4,44)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan (life skill) SKB Ajibarang**	100.000.000,00	99.400.000,00	(600.000,00)	(0,60)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.400.000,00	(600.000,00)	(0,60)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan (life skill) SKB Kalibagor**	100.000.000,00	97.786.000,00	(2.214.000,00)	(2,21)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	97.786.000,00	(2.214.000,00)	(2,21)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan**	200.000.000,00	160.187.502,00	(39.812.498,00)	(19,91)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	189.500.000,00	150.187.502,00	(39.312.498,00)	(20,75)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.03	Belanja Modal	10.500.000,00	10.000.000,00	(500.000,00)	(4,76)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kesetaraan SKB Kalibagor**	50.000.000,00	47.645.000,00	(2.355.000,00)	(4,71)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.645.000,00	(2.355.000,00)	(4,71)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kesetaraan SKB Purwokerto**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00

SatriaKeuangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.01 . 01.001.1.01.001	**Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kesetaraan SKB Ajibarang**	50.000.000,00	49.900.000,00	(100.000,00)	(0,20)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.900.000,00	(100.000,00)	(0,20)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Operasional SKB Purwokerto**	250.000.000,00	230.598.668,00	(19.401.332,00)	(7,76)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.150.000,00	(650.000,00)	(8,33)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	234.700.000,00	215.948.668,00	(18.751.332,00)	(7,99)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.03	Belanja Modal	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.001	**Operasional SKB Kalibagor**	250.000.000,00	228.936.267,00	(21.063.733,00)	(8,43)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	230.050.000,00	213.136.267,00	(16.913.733,00)	(7,35)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.03	Belanja Modal	19.950.000,00	15.800.000,00	(4.150.000,00)	(20,80)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Operasional SKB Ajibarang**	250.000.000,00	201.094.468,00	(48.905.532,00)	(19,56)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.01	Belanja Pegawai	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	211.600.000,00	162.694.468,00	(48.905.532,00)	(23,11)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat (DikMas) SKB Ajibarang**	75.000.000,00	73.590.664,00	(1.409.336,00)	(1,88)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	45.250.000,00	43.840.664,00	(1.409.336,00)	(3,11)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.03	Belanja Modal	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.001	**Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat (DikMas) SKB Purwokerto**	75.000.000,00	69.518.000,00	(5.482.000,00)	(7,31)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	27.100.000,00	21.979.000,00	(5.121.000,00)	(18,90)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.03	Belanja Modal	47.900.000,00	47.539.000,00	(361.000,00)	(0,75)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat (DikMas) SKB Kalibagor**	75.000.000,00	71.750.000,00	(3.250.000,00)	(4,33)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	71.750.000,00	(3.250.000,00)	(4,33)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Akreditasi Lembaga PAUD dan Dikmas/Pokja Akreditasi Lembaga PAUD dan Dikmas**	100.000.000,00	80.348.500,00	(19.651.500,00)	(19,65)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.01	Belanja Pegawai	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	80.348.500,00	(18.051.500,00)	(18,35)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Bintek Pengembangan APE PAUD dan Pembelajaran PAUD Terpadu**	70.000.000,00	59.120.408,00	(10.879.592,00)	(15,54)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	59.120.408,00	(10.879.592,00)	(15,54)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Workshop Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas**	90.000.000,00	89.234.500,00	(765.500,00)	(0,85)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	71.834.500,00	(165.500,00)	(0,23)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.03	Belanja Modal	18.000.000,00	17.400.000,00	(600.000,00)	(3,33)

SatriaKeuangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.01 . 01.001.1.01.001	**Peningkatan Mutu Pendidikan Dikmas dan Kursus**	75.000.000,00	73.001.450,00	(1.998.550,00)	(2,66)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	73.001.450,00	(1.998.550,00)	(2,66)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Operasional TK Negeri Pembina 1 Purwokerto**	75.000.000,00	72.965.050,00	(2.034.950,00)	(2,71)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	68.965.050,00	(2.034.950,00)	(2,87)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.03	Belanja Modal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.001	**Operasional TK Negeri Pembina 2 Purwokerto**	75.000.000,00	67.059.972,00	(7.940.028,00)	(10,59)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	39.259.972,00	(5.140.028,00)	(11,58)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.03	Belanja Modal	30.600.000,00	27.800.000,00	(2.800.000,00)	(9,15)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Operasional TK Negeri Pembina Kober**	75.000.000,00	72.783.000,00	(2.217.000,00)	(2,96)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	73.650.000,00	71.433.000,00	(2.217.000,00)	(3,01)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.03	Belanja Modal	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.001	**Operasional TK Negeri Pembina Purwojati**	75.000.000,00	69.887.812,00	(5.112.188,00)	(6,82)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00	45.087.812,00	(3.912.188,00)	(7,98)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.03	Belanja Modal	26.000.000,00	24.800.000,00	(1.200.000,00)	(4,62)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Pengadaan Sarana Prasarana SKB (DAK 2019)**	4.898.882.000,00	3.664.218.800,00	(1.234.663.200,00)	(25,20)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	374.383.000,00	158.719.800,00	(215.663.200,00)	(57,60)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.03	Belanja Modal	4.524.499.000,00	3.505.499.000,00	(1.019.000.000,00)	(22,52)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK 2019)**	2.509.330.000,00	1.971.246.100,00	(538.083.900,00)	(21,44)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	1.946.743.305,00	1.436.546.100,00	(510.197.205,00)	(26,21)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.03	Belanja Modal	562.586.695,00	534.700.000,00	(27.886.695,00)	(4,96)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Fasilitasi dan visitasi sarana dan prasarana PAUD dan Dikmas**	24.000.000,00	22.352.250,00	(1.647.750,00)	(6,87)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	22.352.250,00	(1.647.750,00)	(6,87)
1.01 . 01.001.1.01.001	**Fasilitasi program dan kegiatan PAUD dan Bindikel**	30.000.000,00	25.371.000,00	(4.629.000,00)	(15,43)
1.01 . 01.001.1.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	25.371.000,00	(4.629.000,00)	(15,43)
1.01 . 01.001.1.01	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat**	188.465.764.897,00	180.842.479.438,00	(7.623.285.459,00)	(4,04)
1.01 . 01.001.1.01.002	**Operasional Tim Managemen BOS SD**	135.000.000,00	129.047.368,00	(5.952.632,00)	(4,41)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.01	Belanja Pegawai	5.000.000,00	4.440.000,00	(560.000,00)	(11,20)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	124.607.368,00	(5.392.632,00)	(4,15)
1.01 . 01.001.1.01.002	**Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif SD**	85.500.000,00	82.981.300,00	(2.518.700,00)	(2,95)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	85.500.000,00	82.981.300,00	(2.518.700,00)	(2,95)
1.01 . 01.001.1.01.002	**Pembangunan Prasarana SD**	645.000.000,00	598.630.000,00	(46.370.000,00)	(7,19)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.01	Belanja Pegawai	6.450.000,00	5.475.000,00	(975.000,00)	(15,12)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	48.550.000,00	5.875.000,00	(42.675.000,00)	(87,90)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.03	Belanja Modal	590.000.000,00	587.280.000,00	(2.720.000,00)	(0,46)

SatriaKeuangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.01 . 01.001.1.01.002	**Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB**	650.000.000,00	647.515.054,00	(2.484.946,00)	(0,38)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.01	Belanja Pegawai	1.750.000,00	1.360.000,00	(390.000,00)	(22,29)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	648.250.000,00	646.155.054,00	(2.094.946,00)	(0,32)
1.01 . 01.001.1.01.002	**Penyelengaraan Lomba-Lomba Siswa dan Sekolah SD/SDLB**	450.000.000,00	437.297.573,00	(12.702.427,00)	(2,82)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.01	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.020.000,00	(480.000,00)	(19,20)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	447.500.000,00	435.277.573,00	(12.222.427,00)	(2,73)
1.01 . 01.001.1.01.002	**Penyelenggaraan Kurikulum 2013 SD**	152.000.000,00	132.710.107,00	(19.289.893,00)	(12,69)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	152.000.000,00	132.710.107,00	(19.289.893,00)	(12,69)
1.01 . 01.001.1.01.002	**Penyelenggaraan Akreditasi SD**	52.500.000,00	44.844.910,00	(7.655.090,00)	(14,58)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	44.844.910,00	(7.655.090,00)	(14,58)
1.01 . 01.001.1.01.002	**Fasilitasi Program Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Sehat SD**	100.000.000,00	88.225.026,00	(11.774.974,00)	(11,77)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.01	Belanja Pegawai	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	99.600.000,00	88.225.026,00	(11.374.974,00)	(11,42)
1.01 . 01.001.1.01.002	**Pembangunan Ruang Kantor, Ruang Belajar, dan Ruang Penunjang Lain SD**	3.025.000.000,00	2.861.231.000,00	(163.769.000,00)	(5,41)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.01	Belanja Pegawai	84.000.000,00	13.875.000,00	(70.125.000,00)	(83,48)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	221.000.000,00	178.622.000,00	(42.378.000,00)	(19,18)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.03	Belanja Modal	2.720.000.000,00	2.668.734.000,00	(51.266.000,00)	(1,88)
1.01 . 01.001.1.01.002	**Pembangunan/Rehabilitasi Talud/Pagar Keliling SD**	5.926.800.000,00	5.715.290.150,00	(211.509.850,00)	(3,57)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.01	Belanja Pegawai	96.250.000,00	56.425.000,00	(39.825.000,00)	(41,38)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	580.550.000,00	465.648.150,00	(114.901.850,00)	(19,79)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.03	Belanja Modal	5.250.000.000,00	5.193.217.000,00	(56.783.000,00)	(1,08)
1.01 . 01.001.1.01.002	**Pengadaan Sarana Pendidikan SD**	200.000.000,00	178.557.000,00	(21.443.000,00)	(10,72)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.01	Belanja Pegawai	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	33.850.000,00	21.882.000,00	(11.968.000,00)	(35,36)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.03	Belanja Modal	160.000.000,00	156.675.000,00	(3.325.000,00)	(2,08)
1.01 . 01.001.1.01.002	**BOS SD**	156.273.478.897,00	150.893.649.297,00	(5.379.829.600,00)	(3,44)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.01	Belanja Pegawai	4.252.611.400,00	4.180.764.895,00	(71.846.505,00)	(1,69)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	132.086.568.142,00	130.071.581.352,00	(2.014.986.790,00)	(1,53)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.03	Belanja Modal	19.934.299.355,00	16.641.303.050,00	(3.292.996.305,00)	(16,52)
1.01 . 01.001.1.01.002	**Pengadaan Sarana Prasarana SD (DAK 2019)**	20.770.486.000,00	19.032.500.653,00	(1.737.985.347,00)	(8,37)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.01	Belanja Pegawai	60.961.779,00	0,00	(60.961.779,00)	(100,00)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.725.394.136,00	3.484.857.314,00	(240.536.822,00)	(6,46)
1.01 . 01.001.1.01.002.5.2.03	Belanja Modal	16.984.130.085,00	15.547.643.339,00	(1.436.486.746,00)	(8,46)

SatriaKeuangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.01 . 01.001.1.01	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat**	22.221.752.000,00	21.559.778.951,00	(661.973.049,00)	(2,98)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP (DAK 2019)**	7.706.752.000,00	7.638.695.000,00	(68.057.000,00)	(0,88)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	26.432.000,00	21.945.000,00	(4.487.000,00)	(16,98)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	7.680.320.000,00	7.616.750.000,00	(63.570.000,00)	(0,83)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 3 Purwokerto**	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	35.204.000,00	35.204.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	29.796.000,00	29.796.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 4 Purwokerto**	65.000.000,00	64.900.000,00	(100.000,00)	(0,15)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	54.000.000,00	53.900.000,00	(100.000,00)	(0,19)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 5 Purwokerto**	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	31.513.600,00	31.513.600,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	33.486.400,00	33.486.400,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 6 Purwokerto**	65.000.000,00	64.995.000,00	(5.000,00)	(0,01)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	33.995.000,00	(5.000,00)	(0,01)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 7 Purwokerto**	65.000.000,00	64.050.000,00	(950.000,00)	(1,46)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	40.000.000,00	39.050.000,00	(950.000,00)	(2,38)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 8 Purwokerto**	65.000.000,00	64.775.000,00	(225.000,00)	(0,35)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	33.140.000,00	33.125.000,00	(15.000,00)	(0,05)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	31.860.000,00	31.650.000,00	(210.000,00)	(0,66)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 9 Purwokerto**	65.000.000,00	64.995.000,00	(5.000,00)	(0,01)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.01	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	47.995.000,00	(5.000,00)	(0,01)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Baturraden**	65.000.000,00	56.189.600,00	(8.810.400,00)	(13,55)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	50.189.600,00	50.189.600,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	12.410.400,00	3.600.000,00	(8.810.400,00)	(70,99)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Baturraden**	65.000.000,00	61.120.000,00	(3.880.000,00)	(5,97)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	37.120.000,00	(2.380.000,00)	(6,03)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	25.500.000,00	24.000.000,00	(1.500.000,00)	(5,88)

SatriaKeuangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Kembaran**	65.000.000,00	58.779.400,00	(6.220.600,00)	(9,57)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.01	Belanja Pegawai	3.360.000,00	3.100.000,00	(260.000,00)	(7,74)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	35.140.000,00	32.079.400,00	(3.060.600,00)	(8,71)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	26.500.000,00	23.600.000,00	(2.900.000,00)	(10,94)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMP Negeri 2 Kembaran**	65.000.000,00	64.635.000,00	(365.000,00)	(0,56)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	45.935.000,00	(65.000,00)	(0,14)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	19.000.000,00	18.700.000,00	(300.000,00)	(1,58)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Sumbang**	65.000.000,00	64.990.000,00	(10.000,00)	(0,02)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	50.650.000,00	50.640.000,00	(10.000,00)	(0,02)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 3 Sumbang**	100.000.000,00	69.258.000,00	(30.742.000,00)	(30,74)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.01	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	44.200.000,00	44.198.000,00	(2.000,00)	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	54.000.000,00	23.260.000,00	(30.740.000,00)	(56,93)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Purwokerto**	65.000.000,00	64.145.000,00	(855.000,00)	(1,32)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	54.750.000,00	53.895.000,00	(855.000,00)	(1,56)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Purwokerto**	65.000.000,00	64.686.000,00	(314.000,00)	(0,48)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	31.325.000,00	31.011.000,00	(314.000,00)	(1,00)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	33.675.000,00	33.675.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Banyumas**	65.000.000,00	61.761.000,00	(3.239.000,00)	(4,98)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	23.943.000,00	23.807.000,00	(136.000,00)	(0,57)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	41.057.000,00	37.954.000,00	(3.103.000,00)	(7,56)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Banyumas**	65.000.000,00	63.900.000,00	(1.100.000,00)	(1,69)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	41.500.000,00	40.400.000,00	(1.100.000,00)	(2,65)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 3 Banyumas**	65.000.000,00	64.410.000,00	(590.000,00)	(0,91)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	12.405.000,00	11.960.000,00	(445.000,00)	(3,59)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	52.595.000,00	52.450.000,00	(145.000,00)	(0,28)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 4 Banyumas**	65.000.000,00	58.415.050,00	(6.584.950,00)	(10,13)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.01	Belanja Pegawai	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	33.400.000,00	33.398.050,00	(1.950,00)	(0,01)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	28.800.000,00	25.017.000,00	(3.783.000,00)	(13,14)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Sokaraja**	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00

SatriaKeuangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Sokaraja**	65.000.000,00	62.187.000,00	(2.813.000,00)	(4,33)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	27.200.000,00	24.387.000,00	(2.813.000,00)	(10,34)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 3 Sokaraja**	65.000.000,00	62.850.000,00	(2.150.000,00)	(3,31)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	19.850.000,00	19.850.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	45.150.000,00	43.000.000,00	(2.150.000,00)	(4,76)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Kalibagor**	65.000.000,00	60.890.000,00	(4.110.000,00)	(6,32)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	7.590.000,00	(10.000,00)	(0,13)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	57.400.000,00	53.300.000,00	(4.100.000,00)	(7,14)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Kalibagor**	65.000.000,00	64.980.800,00	(19.200,00)	(0,03)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.01	Belanja Pegawai	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	27.825.000,00	27.825.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	36.500.000,00	36.480.800,00	(19.200,00)	(0,05)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 3 Kalibagor**	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Somagede**	65.000.000,00	64.269.000,00	(731.000,00)	(1,12)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	31.969.000,00	31.969.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	33.031.000,00	32.300.000,00	(731.000,00)	(2,21)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Somagede**	65.000.000,00	59.911.050,00	(5.088.950,00)	(7,83)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	39.336.050,00	(5.063.950,00)	(11,41)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	20.600.000,00	20.575.000,00	(25.000,00)	(0,12)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Sumbang**	65.000.000,00	64.420.000,00	(580.000,00)	(0,89)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	22.920.000,00	(80.000,00)	(0,35)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	39.600.000,00	39.100.000,00	(500.000,00)	(1,26)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Kedungbanteng**	65.000.000,00	62.980.000,00	(2.020.000,00)	(3,11)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	34.821.000,00	34.780.000,00	(41.000,00)	(0,12)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	30.179.000,00	28.200.000,00	(1.979.000,00)	(6,56)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Kedungbanteng**	65.000.000,00	19.005.000,00	(45.995.000,00)	(70,76)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	11.805.000,00	(995.000,00)	(7,77)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	52.200.000,00	7.200.000,00	(45.000.000,00)	(86,21)

SatriaKeuangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Karanglewas**	65.000.000,00	59.360.000,00	(5.640.000,00)	(8,68)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	19.160.000,00	(5.140.000,00)	(21,15)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	40.700.000,00	40.200.000,00	(500.000,00)	(1,23)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Karanglewas**	65.000.000,00	63.694.900,00	(1.305.100,00)	(2,01)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	57.200.000,00	57.194.900,00	(5.100,00)	(0,01)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	7.800.000,00	6.500.000,00	(1.300.000,00)	(16,67)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Cilongok**	65.000.000,00	62.156.650,00	(2.843.350,00)	(4,37)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	1.080.000,00	(1.320.000,00)	(55,00)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	43.650.000,00	42.126.650,00	(1.523.350,00)	(3,49)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Cilongok**	65.000.000,00	62.930.000,00	(2.070.000,00)	(3,18)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	27.563.700,00	25.693.700,00	(1.870.000,00)	(6,78)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	37.436.300,00	37.236.300,00	(200.000,00)	(0,53)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Ajibarang**	65.000.000,00	64.480.000,00	(520.000,00)	(0,80)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	31.550.000,00	31.530.000,00	(20.000,00)	(0,06)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	33.450.000,00	32.950.000,00	(500.000,00)	(1,49)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Ajibarang**	65.000.000,00	62.700.000,00	(2.300.000,00)	(3,54)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	31.200.000,00	28.900.000,00	(2.300.000,00)	(7,37)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 3 Ajibarang**	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Pekuncen**	65.000.000,00	59.986.900,00	(5.013.100,00)	(7,71)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	53.600.000,00	48.586.900,00	(5.013.100,00)	(9,35)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Pekuncen**	65.000.000,00	49.607.000,00	(15.393.000,00)	(23,68)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	25.657.000,00	(143.000,00)	(0,55)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	39.200.000,00	23.950.000,00	(15.250.000,00)	(38,90)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 3 Pekuncen**	75.000.000,00	74.020.000,00	(980.000,00)	(1,31)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	37.950.000,00	36.970.000,00	(980.000,00)	(2,58)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	37.050.000,00	37.050.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Gumelar**	65.000.000,00	61.393.500,00	(3.606.500,00)	(5,55)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	35.405.314,00	33.193.500,00	(2.211.814,00)	(6,25)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	29.594.686,00	28.200.000,00	(1.394.686,00)	(4,71)

SatriaKeuangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Gumelar**	65.000.000,00	64.896.950,00	(103.050,00)	(0,16)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	64.896.950,00	(103.050,00)	(0,16)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Lumbir**	75.000.000,00	74.538.500,00	(461.500,00)	(0,62)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	36.350.000,00	35.888.500,00	(461.500,00)	(1,27)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	38.650.000,00	38.650.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Lumbir**	65.000.000,00	61.829.000,00	(3.171.000,00)	(4,88)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.01	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	(4,00)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	30.079.000,00	(921.000,00)	(2,97)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	31.500.000,00	29.350.000,00	(2.150.000,00)	(6,83)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Wangon**	65.000.000,00	64.484.875,00	(515.125,00)	(0,79)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	21.935.500,00	21.934.875,00	(625,00)	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	43.064.500,00	42.550.000,00	(514.500,00)	(1,19)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Wangon**	65.000.000,00	49.228.500,00	(15.771.500,00)	(24,26)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.01	Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.090.000,00	(10.000,00)	(0,32)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	58.900.000,00	43.138.500,00	(15.761.500,00)	(26,76)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Jatilawang**	65.000.000,00	60.124.400,00	(4.875.600,00)	(7,50)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	23.980.000,00	21.924.400,00	(2.055.600,00)	(8,57)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	41.020.000,00	38.200.000,00	(2.820.000,00)	(6,87)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Jatilawang**	65.000.000,00	64.949.000,00	(51.000,00)	(0,08)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	23.390.000,00	23.339.000,00	(51.000,00)	(0,22)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	41.610.000,00	41.610.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Purwojati**	65.000.000,00	64.265.000,00	(735.000,00)	(1,13)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	19.665.000,00	(735.000,00)	(3,60)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	44.600.000,00	44.600.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Purwojati**	65.000.000,00	63.215.000,00	(1.785.000,00)	(2,75)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.215.000,00	(1.785.000,00)	(3,57)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Rawalo**	65.000.000,00	64.370.000,00	(630.000,00)	(0,97)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	18.720.000,00	(80.000,00)	(0,43)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	46.200.000,00	45.650.000,00	(550.000,00)	(1,19)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Rawalo**	65.000.000,00	63.500.000,00	(1.500.000,00)	(2,31)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	25.050.000,00	(1.450.000,00)	(5,47)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	38.500.000,00	38.450.000,00	(50.000,00)	(0,13)

SatriaKeuangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Kebasen**	65.000.000,00	61.945.000,00	(3.055.000,00)	(4,70)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.01	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000,00	11.860.000,00	(1.190.000,00)	(9,12)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	50.550.000,00	48.685.000,00	(1.865.000,00)	(3,69)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Kebasen**	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.01	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 3 Kebasen**	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Patikraja**	65.000.000,00	64.499.000,00	(501.000,00)	(0,77)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	19.170.000,00	18.794.000,00	(376.000,00)	(1,96)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	45.830.000,00	45.705.000,00	(125.000,00)	(0,27)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Patikraja**	65.000.000,00	63.521.500,00	(1.478.500,00)	(2,27)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	29.276.000,00	28.971.500,00	(304.500,00)	(1,04)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	35.724.000,00	34.550.000,00	(1.174.000,00)	(3,29)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Kemranjen**	65.000.000,00	55.840.000,00	(9.160.000,00)	(14,09)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	21.490.000,00	20.730.000,00	(760.000,00)	(3,54)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	43.510.000,00	35.110.000,00	(8.400.000,00)	(19,31)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Kemranjen**	65.000.000,00	63.500.000,00	(1.500.000,00)	(2,31)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	29.900.000,00	28.400.000,00	(1.500.000,00)	(5,02)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Sumpiuh**	65.000.000,00	56.377.000,00	(8.623.000,00)	(13,27)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	22.778.000,00	21.527.000,00	(1.251.000,00)	(5,49)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	42.222.000,00	34.850.000,00	(7.372.000,00)	(17,46)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Sumpiuh**	65.000.000,00	64.660.000,00	(340.000,00)	(0,52)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	24.142.000,00	24.142.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	40.858.000,00	40.518.000,00	(340.000,00)	(0,83)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 1 Tambak**	65.000.000,00	59.705.000,00	(5.295.000,00)	(8,15)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	34.400.000,00	31.705.000,00	(2.695.000,00)	(7,83)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	30.600.000,00	28.000.000,00	(2.600.000,00)	(8,50)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 2 Tambak**	65.000.000,00	64.995.500,00	(4.500,00)	(0,01)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.01	Belanja Pegawai	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00

SatriaKeuangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	34.700.000,00	34.695.500,00	(4.500,00)	(0,01)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 3 Kedungbanteng**	100.000.000,00	97.290.000,00	(2.710.000,00)	(2,71)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	59.200.000,00	56.690.000,00	(2.510.000,00)	(4,24)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	40.800.000,00	40.600.000,00	(200.000,00)	(0,49)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 4 Kedungbanteng**	100.000.000,00	96.741.500,00	(3.258.500,00)	(3,26)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	56.220.000,00	54.091.500,00	(2.128.500,00)	(3,79)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	43.780.000,00	42.650.000,00	(1.130.000,00)	(2,58)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 4 Kalibagor**	100.000.000,00	98.630.000,00	(1.370.000,00)	(1,37)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	56.400.000,00	56.230.000,00	(170.000,00)	(0,30)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	43.600.000,00	42.400.000,00	(1.200.000,00)	(2,75)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 3 Lumbir**	100.000.000,00	98.858.000,00	(1.142.000,00)	(1,14)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	46.175.000,00	45.133.000,00	(1.042.000,00)	(2,26)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	53.825.000,00	53.725.000,00	(100.000,00)	(0,19)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 3 Karanglewas**	110.000.000,00	100.192.500,00	(9.807.500,00)	(8,92)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	28.737.500,00	24.985.500,00	(3.752.000,00)	(13,06)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	81.262.500,00	75.207.000,00	(6.055.500,00)	(7,45)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 3 Wangon**	100.000.000,00	98.436.000,00	(1.564.000,00)	(1,56)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	46.556.000,00	46.446.000,00	(110.000,00)	(0,24)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	53.444.000,00	51.990.000,00	(1.454.000,00)	(2,72)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 4 Sumbang**	100.000.000,00	93.460.181,00	(6.539.819,00)	(6,54)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.01	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	74.361.292,00	69.475.181,00	(4.886.111,00)	(6,57)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	24.638.708,00	23.985.000,00	(653.708,00)	(2,65)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Operasional SMPN 3 Gumelar**	100.000.000,00	99.574.200,00	(425.800,00)	(0,43)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	80.377.500,00	79.951.700,00	(425.800,00)	(0,53)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	19.622.500,00	19.622.500,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003	**Penyusunan Perencanaan, DED, dan Pengawasan Kegiatan Jenjang SMP**	300.000.000,00	274.800.000,00	(25.200.000,00)	(8,40)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.01	Belanja Pegawai	30.000.000,00	22.550.000,00	(7.450.000,00)	(24,83)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	233.150.000,00	(16.850.000,00)	(6,74)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	20.000.000,00	19.100.000,00	(900.000,00)	(4,50)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif SMP**	200.000.000,00	180.059.000,00	(19.941.000,00)	(9,97)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	180.059.000,00	(19.941.000,00)	(9,97)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP**	5.930.000.000,00	5.843.927.950,00	(86.072.050,00)	(1,45)

SatriaKeuangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	99.725.000,00	95.270.000,00	(4.455.000,00)	(4,47)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	5.830.275.000,00	5.748.657.950,00	(81.617.050,00)	(1,40)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SMP/MTs**	700.000.000,00	637.363.403,00	(62.636.597,00)	(8,95)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	697.000.000,00	637.363.403,00	(59.636.597,00)	(8,56)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Penyelenggaraan Lomba-lomba Siswa dan Sekolah SMP**	425.000.000,00	398.252.876,00	(26.747.124,00)	(6,29)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	425.000.000,00	398.252.876,00	(26.747.124,00)	(6,29)
1.01 . 01.001.1.01.003	**Rehabilitasi Ruang Kantor, Ruang Belajar, dan Ruang Penunjang Lain SMP**	2.000.000.000,00	1.880.228.266,00	(119.771.734,00)	(5,99)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.01	Belanja Pegawai	19.500.000,00	0,00	(19.500.000,00)	(100,00)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	252.500.000,00	193.011.266,00	(59.488.734,00)	(23,56)
1.01 . 01.001.1.01.003.5.2.03	Belanja Modal	1.728.000.000,00	1.687.217.000,00	(40.783.000,00)	(2,36)
1.01 . 01.001.1.01	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	38.504.675.000,00	37.886.886.750,00	(617.788.250,00)	(1,60)
1.01 . 01.001.1.01.004	**Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti**	37.600.000.000,00	37.365.391.000,00	(234.609.000,00)	(0,62)
1.01 . 01.001.1.01.004.5.2.01	Belanja Pegawai	12.080.000,00	12.080.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.004.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	37.587.920.000,00	37.353.311.000,00	(234.609.000,00)	(0,62)
1.01 . 01.001.1.01.004	**Pelaksanaan Sertifikasi, Penilaian Angka Kredit dan Pembinaan Ketenagaan**	154.675.000,00	147.160.000,00	(7.515.000,00)	(4,86)
1.01 . 01.001.1.01.004.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	154.675.000,00	147.160.000,00	(7.515.000,00)	(4,86)
1.01 . 01.001.1.01.004	**Penyelenggaraan Lomba Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal**	150.000.000,00	149.970.000,00	(30.000,00)	(0,02)
1.01 . 01.001.1.01.004.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.970.000,00	(30.000,00)	(0,02)
1.01 . 01.001.1.01.004	**Penilaian Kinerja dan Penyiapan Calon Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan**	600.000.000,00	224.365.750,00	(375.634.250,00)	(62,61)
1.01 . 01.001.1.01.004.5.2.01	Belanja Pegawai	8.488.000,00	0,00	(8.488.000,00)	(100,00)
1.01 . 01.001.1.01.004.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	591.512.000,00	224.365.750,00	(367.146.250,00)	(62,07)
1.01 . 01.001.1.01	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	850.000.000,00	752.807.363,00	(97.192.637,00)	(11,43)
1.01 . 01.001.1.01.005	**Gebyar Pendidikan Inklusi (Anak Berkebutuhan Khusus)**	327.000.000,00	306.564.600,00	(20.435.400,00)	(6,25)
1.01 . 01.001.1.01.005.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	327.000.000,00	306.564.600,00	(20.435.400,00)	(6,25)
1.01 . 01.001.1.01.005	**Manajemen Pendataan Pendidikan**	110.000.000,00	109.047.500,00	(952.500,00)	(0,87)
1.01 . 01.001.1.01.005.5.2.01	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.005.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	109.000.000,00	108.047.500,00	(952.500,00)	(0,87)
1.01 . 01.001.1.01.005	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru**	153.000.000,00	139.453.000,00	(13.547.000,00)	(8,85)
1.01 . 01.001.1.01.005.5.2.01	Belanja Pegawai	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00

SatriaKeuangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.01 . 01.001.1.01.005.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	151.880.000,00	138.333.000,00	(13.547.000,00)	(8,92)
1.01 . 01.001.1.01.005	**Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan**	260.000.000,00	197.742.263,00	(62.257.737,00)	(23,95)
1.01 . 01.001.1.01.005.5.2.01	Belanja Pegawai	16.000.000,00	14.860.000,00	(1.140.000,00)	(7,12)
1.01 . 01.001.1.01.005.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	244.000.000,00	182.882.263,00	(61.117.737,00)	(25,05)
1.01 . 01.001.1.01	**Program Peningkatan Koordinasi Pendidikan Kecamatan**	2.970.000.000,00	2.790.654.830,00	(179.345.170,00)	(6,04)
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Ajibarang**	110.000.000,00	104.098.770,00	(5.901.230,00)	(5,36)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	104.098.770,00	(5.901.230,00)	(5,36)
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Banyumas**	100.000.000,00	99.224.581,00	(775.419,00)	(0,78)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	90.650.000,00	89.874.581,00	(775.419,00)	(0,86)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Baturraden**	115.000.000,00	102.812.241,00	(12.187.759,00)	(10,60)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.01	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	61.917.241,00	(11.082.759,00)	(15,18)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	6.000.000,00	4.895.000,00	(1.105.000,00)	(18,42)
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Cilongok**	125.000.000,00	123.022.637,00	(1.977.363,00)	(1,58)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.01	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	96.100.000,00	94.122.637,00	(1.977.363,00)	(2,06)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Gumelar**	135.000.000,00	133.094.399,00	(1.905.601,00)	(1,41)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	118.705.000,00	116.799.399,00	(1.905.601,00)	(1,61)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	16.295.000,00	16.295.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Jatilawang**	110.000.000,00	107.738.441,00	(2.261.559,00)	(2,06)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	104.750.000,00	102.488.441,00	(2.261.559,00)	(2,16)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Kalibagor**	100.000.000,00	76.179.146,00	(23.820.854,00)	(23,82)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	88.200.000,00	64.679.146,00	(23.520.854,00)	(26,67)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	11.800.000,00	11.500.000,00	(300.000,00)	(2,54)
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Karanglewas**	100.000.000,00	98.759.196,00	(1.240.804,00)	(1,24)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	94.540.000,00	93.299.196,00	(1.240.804,00)	(1,31)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Kebasen**	100.000.000,00	99.410.363,00	(589.637,00)	(0,59)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	98.500.000,00	97.910.363,00	(589.637,00)	(0,60)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00

SatriaKeuangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Kedungbanteng**	110.000.000,00	107.154.707,00	(2.845.293,00)	(2,59)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.01	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	77.036.000,00	74.904.707,00	(2.131.293,00)	(2,77)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	20.964.000,00	20.250.000,00	(714.000,00)	(3,41)
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Kembaran**	100.000.000,00	84.963.393,00	(15.036.607,00)	(15,04)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	86.500.000,00	71.463.393,00	(15.036.607,00)	(17,38)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Kemranjen**	110.000.000,00	99.706.989,00	(10.293.011,00)	(9,36)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.01	Belanja Pegawai	19.600.000,00	19.500.000,00	(100.000,00)	(0,51)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	70.400.000,00	61.006.989,00	(9.393.011,00)	(13,34)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	20.000.000,00	19.200.000,00	(800.000,00)	(4,00)
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Lumbir**	135.000.000,00	123.021.506,00	(11.978.494,00)	(8,87)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.01	Belanja Pegawai	14.400.000,00	8.400.000,00	(6.000.000,00)	(41,67)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	113.000.000,00	107.021.506,00	(5.978.494,00)	(5,29)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Patikraja**	105.000.000,00	101.388.230,00	(3.611.770,00)	(3,44)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	95.250.000,00	91.638.230,00	(3.611.770,00)	(3,79)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Pekuncen**	135.000.000,00	129.327.372,00	(5.672.628,00)	(4,20)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	100.500.000,00	94.827.372,00	(5.672.628,00)	(5,64)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Purwojati**	110.000.000,00	86.534.148,00	(23.465.852,00)	(21,33)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.01	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	84.200.000,00	61.934.148,00	(22.265.852,00)	(26,44)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	7.800.000,00	6.600.000,00	(1.200.000,00)	(15,38)
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Purwokerto Barat**	97.500.000,00	95.982.045,00	(1.517.955,00)	(1,56)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	79.682.045,00	(1.317.955,00)	(1,63)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	16.500.000,00	16.300.000,00	(200.000,00)	(1,21)
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Purwokerto Selatan**	97.500.000,00	93.369.276,00	(4.130.724,00)	(4,24)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.01	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	83.100.000,00	78.969.276,00	(4.130.724,00)	(4,97)
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Purwokerto Timur**	97.500.000,00	95.212.311,00	(2.287.689,00)	(2,35)

SatriaKeuangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.01	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	78.100.000,00	75.812.311,00	(2.287.689,00)	(2,93)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Purwokerto Utara**	97.500.000,00	77.385.130,00	(20.114.870,00)	(20,63)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	86.286.000,00	66.385.130,00	(19.900.870,00)	(23,06)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	11.214.000,00	11.000.000,00	(214.000,00)	(1,91)
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Rawalo**	110.000.000,00	104.653.419,00	(5.346.581,00)	(4,86)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	81.569.000,00	76.953.419,00	(4.615.581,00)	(5,66)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	28.431.000,00	27.700.000,00	(731.000,00)	(2,57)
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Sokaraja**	105.000.000,00	99.190.964,00	(5.809.036,00)	(5,53)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.01	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	89.100.000,00	83.290.964,00	(5.809.036,00)	(6,52)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Somagede**	110.000.000,00	108.435.986,00	(1.564.014,00)	(1,42)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.01	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	86.950.000,00	85.485.986,00	(1.464.014,00)	(1,68)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	9.850.000,00	9.750.000,00	(100.000,00)	(1,02)
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Sumbang**	100.000.000,00	94.756.714,00	(5.243.286,00)	(5,24)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.01	Belanja Pegawai	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	60.150.000,00	55.086.714,00	(5.063.286,00)	(8,42)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	1.450.000,00	1.270.000,00	(180.000,00)	(12,41)
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Sumpiuh**	110.000.000,00	103.634.706,00	(6.365.294,00)	(5,79)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.01	Belanja Pegawai	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	84.600.000,00	78.234.706,00	(6.365.294,00)	(7,52)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Tambak**	135.000.000,00	132.175.102,00	(2.824.898,00)	(2,09)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	110.750.000,00	107.925.102,00	(2.824.898,00)	(2,55)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006	**Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Wangon**	110.000.000,00	109.423.058,00	(576.942,00)	(0,52)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.01	Belanja Pegawai	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	74.900.000,00	74.323.058,00	(576.942,00)	(0,77)
1.01 . 01.001.1.01.006.5.2.03	Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.4.01	**Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran**	4.966.000.000,00	4.607.531.701,00	(358.468.299,00)	(7,22)

SatriaKeuangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.01 . 01.001.4.01.001	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah**	300.000.000,00	229.684.800,00	(70.315.200,00)	(23,44)
1.01 . 01.001.4.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	229.684.800,00	(70.315.200,00)	(23,44)
1.01 . 01.001.4.01.001	**Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah**	707.600.000,00	698.879.230,00	(8.720.770,00)	(1,23)
1.01 . 01.001.4.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	707.600.000,00	698.879.230,00	(8.720.770,00)	(1,23)
1.01 . 01.001.4.01.001	**Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah**	533.400.000,00	530.640.000,00	(2.760.000,00)	(0,52)
1.01 . 01.001.4.01.001.5.2.01	Belanja Pegawai	169.920.000,00	167.160.000,00	(2.760.000,00)	(1,62)
1.01 . 01.001.4.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	363.480.000,00	363.480.000,00	0,00	0,00
1.01 . 01.001.4.01.001	**Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah**	700.000.000,00	543.919.580,00	(156.080.420,00)	(22,30)
1.01 . 01.001.4.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	543.919.580,00	(156.080.420,00)	(22,30)
1.01 . 01.001.4.01.001	**Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah**	350.000.000,00	334.450.000,00	(15.550.000,00)	(4,44)
1.01 . 01.001.4.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	20.850.000,00	20.330.000,00	(520.000,00)	(2,49)
1.01 . 01.001.4.01.001.5.2.03	Belanja Modal	329.150.000,00	314.120.000,00	(15.030.000,00)	(4,57)
1.01 . 01.001.4.01.001	**Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah**	200.000.000,00	153.127.200,00	(46.872.800,00)	(23,44)
1.01 . 01.001.4.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	153.127.200,00	(46.872.800,00)	(23,44)
1.01 . 01.001.4.01.001	**Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah**	250.000.000,00	248.242.000,00	(1.758.000,00)	(0,70)
1.01 . 01.001.4.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	248.242.000,00	(1.758.000,00)	(0,70)
1.01 . 01.001.4.01.001	**Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah**	175.000.000,00	172.217.195,00	(2.782.805,00)	(1,59)
1.01 . 01.001.4.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	172.217.195,00	(2.782.805,00)	(1,59)
1.01 . 01.001.4.01.001	**Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah**	1.750.000.000,00	1.696.371.696,00	(53.628.304,00)	(3,06)
1.01 . 01.001.4.01.001.5.2.01	Belanja Pegawai	1.556.200.000,00	1.541.960.000,00	(14.240.000,00)	(0,92)
1.01 . 01.001.4.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	193.800.000,00	154.411.696,00	(39.388.304,00)	(20,32)
	SURPLUS/DEFISIT	**(1.187.940.324.875,00)**	**(1.123.241.501.390,00)**	**64.698.823.485,00**	**(5,45)**

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	: 4.04	Kepegawaian
Unit Organisasi	: 4.04.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.04.01.001	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.04 . 01.001.0.00.000.4	**PENDAPATAN**	**80.000.000,00**	**92.595.322,00**	**12.595.322,00**	**15,74**
4.04 . 01.001.0.00.000.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	80.000.000,00	92.595.322,00	12.595.322,00	15,74
4.04 . 01.001.0.00.000.4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	80.000.000,00	75.550.000,00	(4.450.000,00)	(5,56)
4.04 . 01.001.0.00.000.4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	17.045.322,00	17.045.322,00	100,00
4.04 . 01.001.0.00.000.5	**BELANJA**	**32.515.640.796,00**	**22.864.153.173,00**	**(9.651.487.623,00)**	**(29,68)**
4.04 . 01.001.0.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	22.382.075.610,00	14.818.309.430,00	(7.563.766.180,00)	(33,79)
4.04 . 01.001.0.00.000.5.1.01	Belanja Pegawai	22.382.075.610,00	14.818.309.430,00	(7.563.766.180,00)	(33,79)
4.04 . 01.001.0.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	10.133.565.186,00	8.045.843.743,00	(2.087.721.443,00)	(20,60)
4.04 . 01.001.4.01	**Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran**	2.263.565.186,00	1.850.977.482,00	(412.587.704,00)	(18,23)
4.04 . 01.001.4.01.001	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah**	294.300.000,00	235.832.817,00	(58.467.183,00)	(19,87)
4.04 . 01.001.4.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	294.300.000,00	235.832.817,00	(58.467.183,00)	(19,87)
4.04 . 01.001.4.01.001	**Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah**	441.476.503,00	309.061.723,00	(132.414.780,00)	(29,99)
4.04 . 01.001.4.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	441.476.503,00	309.061.723,00	(132.414.780,00)	(29,99)
4.04 . 01.001.4.01.001	**Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah**	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	0,00
4.04 . 01.001.4.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	0,00
4.04 . 01.001.4.01.001	**Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah**	310.000.000,00	251.139.042,00	(58.860.958,00)	(18,99)
4.04 . 01.001.4.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	310.000.000,00	251.139.042,00	(58.860.958,00)	(18,99)
4.04 . 01.001.4.01.001	**Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah**	359.140.500,00	331.615.500,00	(27.525.000,00)	(7,66)
4.04 . 01.001.4.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.100.000,00	(500.000,00)	(8,93)
4.04 . 01.001.4.01.001.5.2.03	Belanja Modal	353.540.500,00	326.515.500,00	(27.025.000,00)	(7,64)
4.04 . 01.001.4.01.001	**Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah**	100.000.000,00	70.815.000,00	(29.185.000,00)	(29,19)
4.04 . 01.001.4.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	70.815.000,00	(29.185.000,00)	(29,19)

SatriaKeuangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.04 . 01.001.4.01.001	**Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah**	213.000.000,00	212.935.300,00	(64.700,00)	(0,03)
4.04 . 01.001.4.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	213.000.000,00	212.935.300,00	(64.700,00)	(0,03)
4.04 . 01.001.4.01.001	**Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah**	150.000.000,00	118.890.250,00	(31.109.750,00)	(20,74)
4.04 . 01.001.4.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	118.890.250,00	(31.109.750,00)	(20,74)
4.04 . 01.001.4.01.001	**Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah**	200.000.000,00	128.330.000,00	(71.670.000,00)	(35,84)
4.04 . 01.001.4.01.001.5.2.01	Belanja Pegawai	200.000.000,00	128.330.000,00	(71.670.000,00)	(35,84)
4.04 . 01.001.4.01.001	**Survei Indeks Kepuasan Masyarakat**	6.648.183,00	3.357.850,00	(3.290.333,00)	(49,49)
4.04 . 01.001.4.01.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	6.648.183,00	3.357.850,00	(3.290.333,00)	(49,49)
4.04 . 01.001.4.04	**Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN**	240.000.000,00	216.545.132,00	(23.454.868,00)	(9,77)
4.04 . 01.001.4.04.001	**Pembinaan dan penyelesaian masalah PNS**	130.000.000,00	126.821.324,00	(3.178.676,00)	(2,45)
4.04 . 01.001.4.04.001.5.2.01	Belanja Pegawai	84.325.000,00	82.450.000,00	(1.875.000,00)	(2,22)
4.04 . 01.001.4.04.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	45.675.000,00	44.371.324,00	(1.303.676,00)	(2,85)
4.04 . 01.001.4.04.001	**Penghargaan ASN**	50.000.000,00	33.921.925,00	(16.078.075,00)	(32,16)
4.04 . 01.001.4.04.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	33.921.925,00	(16.078.075,00)	(32,16)
4.04 . 01.001.4.04.001	**Penilaian Kinerja ASN**	60.000.000,00	55.801.883,00	(4.198.117,00)	(7,00)
4.04 . 01.001.4.04.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	55.801.883,00	(4.198.117,00)	(7,00)
4.04 . 01.001.4.04	**Program Peningkatan Tata Kelola Informasi ASN**	675.000.000,00	432.138.177,00	(242.861.823,00)	(35,98)
4.04 . 01.001.4.04.002	**Pemrosesan pensiun dan penataan PNSD**	100.000.000,00	91.186.983,00	(8.813.017,00)	(8,81)
4.04 . 01.001.4.04.002.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	91.186.983,00	(8.813.017,00)	(8,81)
4.04 . 01.001.4.04.002	**Pengadaan Pegawai**	450.000.000,00	226.296.594,00	(223.703.406,00)	(49,71)
4.04 . 01.001.4.04.002.5.2.01	Belanja Pegawai	103.150.000,00	96.975.000,00	(6.175.000,00)	(5,99)
4.04 . 01.001.4.04.002.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	346.850.000,00	129.321.594,00	(217.528.406,00)	(62,72)
4.04 . 01.001.4.04.002	**Pengelolaan arsip CPNS dan PNS**	40.000.000,00	35.234.100,00	(4.765.900,00)	(11,91)
4.04 . 01.001.4.04.002.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	35.234.100,00	(4.765.900,00)	(11,91)
4.04 . 01.001.4.04.002	**Akurasi Data Pegawai**	85.000.000,00	79.420.500,00	(5.579.500,00)	(6,56)
4.04 . 01.001.4.04.002.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	30.420.500,00	(4.579.500,00)	(13,08)
4.04 . 01.001.4.04.002.5.2.03	Belanja Modal	50.000.000,00	49.000.000,00	(1.000.000,00)	(2,00)
4.04 . 01.001.4.04	**Program Penataan Jabatan, Kepangkatan dan Pengembangan Karir ASN**	905.000.000,00	877.325.344,00	(27.674.656,00)	(3,06)
4.04 . 01.001.4.04.003	**Pemetaan PNS Potensial Untuk menduduki JPTP dan jabatan administras**	75.000.000,00	74.919.079,00	(80.921,00)	(0,11)
4.04 . 01.001.4.04.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.919.079,00	(80.921,00)	(0,11)
4.04 . 01.001.4.04.003	**Pemprosesan jabatan tinggi pratama dan jabatan administrasi**	600.000.000,00	599.504.165,00	(495.835,00)	(0,08)

SatriaKeuangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.04 . 01.001.4.04.003.5.2.01	Belanja Pegawai	347.600.000,00	347.600.000,00	0,00	0,00
4.04 . 01.001.4.04.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	252.400.000,00	251.904.165,00	(495.835,00)	(0,20)
4.04 . 01.001.4.04.003	**Pemrosesan kenaikan pangkat**	160.000.000,00	148.491.887,00	(11.508.113,00)	(7,19)
4.04 . 01.001.4.04.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	148.491.887,00	(11.508.113,00)	(7,19)
4.04 . 01.001.4.04.003	**Pemrosesan Jabatan Fungsional**	70.000.000,00	54.410.213,00	(15.589.787,00)	(22,27)
4.04 . 01.001.4.04.003.5.2.01	Belanja Pegawai	5.450.000,00	4.850.000,00	(600.000,00)	(11,01)
4.04 . 01.001.4.04.003.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	64.550.000,00	49.560.213,00	(14.989.787,00)	(23,22)
4.04 . 01.001.4.05	**Program Pengembangan Kompetensi ASN**	6.050.000.000,00	4.668.857.608,00	(1.381.142.392,00)	(22,83)
4.04 . 01.001.4.05.001	**Penyelenggaraan Diklat Aparatur Sipil Negara**	5.640.000.000,00	4.315.946.126,00	(1.324.053.874,00)	(23,48)
4.04 . 01.001.4.05.001.5.2.01	Belanja Pegawai	43.664.000,00	12.190.000,00	(31.474.000,00)	(72,08)
4.04 . 01.001.4.05.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	5.596.336.000,00	4.303.756.126,00	(1.292.579.874,00)	(23,10)
4.04 . 01.001.4.05.001	**Pengembangan dan Peningkatan Mutu Diklat**	60.000.000,00	34.511.240,00	(25.488.760,00)	(42,48)
4.04 . 01.001.4.05.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	34.511.240,00	(25.488.760,00)	(42,48)
4.04 . 01.001.4.05.001	**Pengembangan Sumber Daya Aparatur**	350.000.000,00	318.400.242,00	(31.599.758,00)	(9,03)
4.04 . 01.001.4.05.001.5.2.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 01.001.4.05.001.5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	318.400.242,00	(31.599.758,00)	(9,03)
	SURPLUS/DEFISIT	**(32.435.640.796,00)**	**(22.771.557.851,00)**	**9.664.082.945,00**	**(29,79)**

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

SatriaKeuangan

Lampiran I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.001 Dinas Pendidikan

Kode	Uraian	Anggaran / Realisasi				Bertambah (Berkurang)	Persen
		Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang & Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	**4.969.296.179,00**	**189.924.501.589,00**	**68.970.606.129,00**	**263.864.403.897,00**	**11.325.675.999,00**	**95,71**
		4.661.264.895,00	**185.172.589.664,00**	**62.704.873.339,00**	**252.538.727.898,00**		
1.01	Pendidikan	4.969.296.179,00	189.924.501.589,00	68.970.606.129,00	263.864.403.897,00	11.325.675.999,00	95,71
		4.661.264.895,00	185.172.589.664,00	62.704.873.339,00	252.538.727.898,00		
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan	4.969.296.179,00	189.924.501.589,00	68.970.606.129,00	263.864.403.897,00	11.325.675.999,00	95,71
		4.661.264.895,00	185.172.589.664,00	62.704.873.339,00	252.538.727.898,00		
1.01 . 1.01.01 . 001	Dinas Pendidikan	4.969.296.179,00	189.924.501.589,00	68.970.606.129,00	263.864.403.897,00	11.325.675.999,00	95,71
		4.661.264.895,00	185.172.589.664,00	62.704.873.339,00	252.538.727.898,00		
1.01 . 1.01.01 . 001 . 001	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	54.500.000,00	5.446.926.305,00	5.350.785.695,00	10.852.212.000,00	2.146.091.434,00	80,22
		49.350.000,00	4.367.382.566,00	4.289.388.000,00	8.706.120.566,00		
1.01 . 1.01.01 . 001 . 001.0003	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini SKB Kalibagor	0,00	47.000.000,00	3.000.000,00	50.000.000,00	7.500,00	99,99
		0,00	46.992.500,00	3.000.000,00	49.992.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 001 . 001.0004	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini SKB Purwokerto	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	6.877.500,00	86,25
		0,00	43.122.500,00	0,00	43.122.500,00		

SatriaKeuangan

Kode	Uraian	Anggaran / Realisasi				Bertambah (Berkurang)	Persen
		Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang & Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.05 . 4.04.01 . 001 . 001.0007	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	31.599.758,00	90,97
		0,00	318.400.242,00	0,00	318.400.242,00		
	Total	**784.189.000,00**	**8.945.835.686,00**	**403.540.500,00**	**10.133.565.186,00**	**2.087.721.443,00**	**79,40**
		672.395.000,00	**6.997.933.243,00**	**375.515.500,00**	**8.045.843.743,00**		

BUPATI BANYUMAS ,

ACHMAD HUSEIN

SatriaKeuangan

Lampiran I.4
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tahun Anggaran 2019

Kode			Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1			2	3	4	5	6
01			**Pelayanan Umum**	**1.174.034.551.677,00**	**1.094.176.775.686,00**	**(79.857.775.991,00)**	**(6,80)**
01	2	03	Pangan	1.175.000.000,00	1.164.379.300,00	(10.620.700,00)	(0,90)
01	2	10	Komunikasi dan Informatika	12.472.615.716,00	12.157.384.329,00	(315.231.387,00)	(2,53)
01	2	14	Statistik	100.000.000,00	84.032.256,00	(15.967.744,00)	(15,97)
01	2	18	Kearsipan	3.897.236.236,00	3.522.839.948,00	(374.396.288,00)	(9,61)
01	4	01	Administrasi Pemerintahan	313.505.323.457,00	277.873.314.156,00	(35.632.009.301,00)	(11,37)
01	4	02	Perencanaan	7.296.084.881,00	6.518.646.684,00	(777.438.197,00)	(10,66)
01	4	03	Keuangan	802.189.215.777,00	768.923.890.967,00	(33.265.324.810,00)	(4,15)
01	4	04	Kepegawaian	24.202.075.610,00	16.344.318.083,00	(7.857.757.527,00)	(32,47)
01	4	05	Pendidikan dan Pelatihan	6.050.000.000,00	4.668.857.608,00	(1.381.142.392,00)	(22,83)
01	4	06	Penelitian dan Pengembangan	425.000.000,00	407.327.200,00	(17.672.800,00)	(4,16)
01	4	07	Fungsi Penunjang Lainnya	2.722.000.000,00	2.511.785.155,00	(210.214.845,00)	(7,72)
02			**Pertahanan**	**500.000.000,00**	**386.466.975,00**	**(113.533.025,00)**	**(22,71)**
02	2	15	Persandian	500.000.000,00	386.466.975,00	(113.533.025,00)	(22,71)
03			**Ketertiban dan Keamanan**	**21.457.936.350,00**	**19.200.888.471,00**	**(2.257.047.879,00)**	**(10,52)**
03	1	06	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	21.457.936.350,00	19.200.888.471,00	(2.257.047.879,00)	(10,52)
04			**Ekonomi**	**134.665.192.880,00**	**114.978.095.759,00**	**(19.687.097.121,00)**	**(14,62)**
04	2	01	Tenaga Kerja	8.727.468.539,00	7.823.937.224,00	(903.531.315,00)	(10,35)
04	2	07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.725.000.000,00	2.457.071.112,00	(267.928.888,00)	(9,83)
04	2	09	Perhubungan	30.161.677.912,00	22.863.772.519,00	(7.297.905.393,00)	(24,20)
04	2	11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.532.000.000,00	1.347.798.018,00	(184.201.982,00)	(12,02)
04	2	12	Penanaman Modal	5.569.035.000,00	4.963.494.233,00	(605.540.767,00)	(10,87)
04	3	01	Kelautan dan Perikanan	11.328.453.754,00	10.222.245.042,00	(1.106.208.712,00)	(9,76)
04	3	03	Pertanian	38.620.141.547,00	32.666.317.190,00	(5.953.824.357,00)	(15,42)

SatriaKeuangan

Kode			Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realiasasi	(Rp)	%
1			2	3	4	5	6
04	3	06	Perdagangan	13.680.057.809,00	12.606.495.610,00	(1.073.562.199,00)	(7,85)
04	3	07	Perindustrian	22.071.358.319,00	19.840.496.575,00	(2.230.861.744,00)	(10,11)
04	3	08	Transmigrasi	250.000.000,00	186.468.236,00	(63.531.764,00)	(25,41)
05			**Lingkungan Hidup**	**129.631.336.905,00**	**116.754.741.235,00**	**(12.876.595.670,00)**	**(9,93)**
05	1	04	Penataan Ruang	71.223.476.000,00	68.515.451.227,00	(2.708.024.773,00)	(3,80)
05	2	04	Pertanahan	1.710.000.000,00	373.601.670,00	(1.336.398.330,00)	(78,15)
05	2	05	Lingkungan Hidup	56.697.860.905,00	47.865.688.338,00	(8.832.172.567,00)	(15,58)
06			**Perumahan dan Fasilitas Umum**	**317.105.780.092,00**	**302.480.838.516,00**	**(14.624.941.576,00)**	**(4,61)**
06	1	03	Pekerjaan Umum	300.657.534.592,00	287.540.037.595,00	(13.117.496.997,00)	(4,36)
06	1	05	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16.448.245.500,00	14.940.800.921,00	(1.507.444.579,00)	(9,16)
07			**Kesehatan**	**696.105.605.348,00**	**638.834.663.866,40**	**(57.270.941.481,60)**	**(8,23)**
07	1	02	Kesehatan	687.114.030.348,00	633.865.744.191,40	(53.248.286.156,60)	(7,75)
07	2	08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.991.575.000,00	4.968.919.675,00	(4.022.655.325,00)	(44,74)
08			**Pariwisata dan Budaya**	**13.748.082.000,00**	**11.750.061.260,00**	**(1.998.020.740,00)**	**(14,53)**
08	2	16	Kebudayaan	4.907.571.000,00	4.026.393.475,00	(881.177.525,00)	(17,96)
08	3	02	Pariwisata	8.840.511.000,00	7.723.667.785,00	(1.116.843.215,00)	(12,63)
10			**Pendidikan**	**1.200.613.016.946,00**	**1.136.754.211.763,00**	**(63.858.805.183,00)**	**(5,32)**
10	1	01	Pendidikan	1.182.974.324.875,00	1.120.044.344.007,00	(62.929.980.868,00)	(5,32)
10	2	13	Kepemudaan dan Olahraga	16.901.692.071,00	15.997.858.220,00	(903.833.851,00)	(5,35)
10	2	17	Perpustakaan	737.000.000,00	712.009.536,00	(24.990.464,00)	(3,39)
11			**Perlindungan Sosial**	**25.601.730.521,00**	**22.233.457.966,00**	**(3.368.272.555,00)**	**(13,16)**
11	1	07	Sosial	6.367.391.567,00	5.531.672.875,00	(835.718.692,00)	(13,12)
11	2	02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	790.000.000,00	750.593.489,00	(39.406.511,00)	(4,99)
11	2	06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.444.338.954,00	15.951.191.602,00	(2.493.147.352,00)	(13,52)

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

SatriaKeuangan

LAMPIRAN I.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Dalam Rupiah

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1.	Piutang Pajak		94.314.613.999,20
	Pajak Hotel dan Restoran	2019	8.672.720,00
	Pajak Reklame	2019	300.214.605,00
	Pajak Air Tanah	2019	324.721.816,20
	PBB-P2	2019	93.137.883.461,00
	BPHTB	2019	543.121.397,00
2.	Piutang Retribusi		2.220.568.796,00
	Retribusi Pelayanan Parkir	2019	929.754.303,00
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2019	-
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2019	275.024.898,00
	Retribusi Terminal	2019	157.478.500,00
	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	2019	138.300.000,00
	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	2019	383.781.950,00
	Retribusi Ijin Gangguan	2019	6.394.750,00
	Retribusi Lainnya	2019	329.834.395,00
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		60.573.236.951,15
	Ganti rugi atas kekayaan daerah	2019	1.436.037.937,15
	Piutang Denda	2019	43.528.914,00
	Piutang BLUD	2019	59.093.670.100,00
	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	2019	-
		Jumlah	157.108.419.746,35

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Dalam Rupiah

No.	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Modal			Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun AnggaranYang Lalu (2018)		Penyertaan Modal Tahun Ini (2019)		Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini (2019)	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini (Bagian Laba Tahun 2019)	Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
		Modal Dasar	Dasar Hukum	Porsi Kewajiban Modal Disetor		Nilai Nominal	Dasar Hukum Penyertaan Modal Terakhir	Nilai Nominal	Dasar Hukum Penyertaan Modal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+9	12 = 5-11	12	13	14 = 11-13
1	PT. BPD Jateng	5.000.000.000.000,00	AD/ART Bank Jateng	-	Uang tunai	36.919.000.000,00	Perda Kab. Banyumas No 2 Tahun 2018	-		36.919.000.000,00	-	5.552.332.670,00	-	36.919.000.000,00
2	PT. BKK JATENG (Perseroda)	924.840.000.000,00	Perda Prov Jateng No. 14 Tahun 2019	31.268.840.000,00	Uang tunai	12.250.000.000,00	Perda Kab. Banyumas No 17 Tahun 2016			12.250.000.000,00	19.018.840.000,00	-	-	12.250.000.000,00
3	PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda)	175.000.000.000,00	Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2018	85.750.000.000,00	Uang tunai	24.500.000.000,00	Perda Kab. Banyumas No 13 Tahun 2016	-		24.500.000.000,00	61.250.000.000,00	7.355.226.728,00	-	24.500.000.000,00
4	PD. Pasar Satria	337.692.558.438,00	Perda Kab. Banyumas No. 5 Tahun 2019	337.692.558.438,00	Uang tunai	1.470.920.000,00	Perda Kab. Banyumas No. 11 Tahun 2018	1.600.000.000,00	Perda Kab. Banyumas No. 11 Tahun	3.070.920.000,00	334.621.638.438,00	-	-	3.070.920.000,00
5	PD. Pasar Satria	337.692.558.438,00	Perda Kab. Banyumas No. 5 Tahun 2019	337.692.558.438,00	Barang	20.141.000.000,00	Perda Kab. Banyumas No. 11 Tahun 2018	-		-	-	-	-	-
6	PDAM Tirta Satria	500.000.000.000,00	Perda Kab. Banyumas No. 9 Tahun 2019	500.000.000.000,00	Uang tunai	121.921.686.555,96	Perda Kab. Banyumas No. 9 Tahun 2017	21.835.000.000,00	Perda Kab. Banyumas No. 4 Tahun 2018	143.756.686.555,96	356.243.313.444,04	-	-	143.756.686.555,96
7	PT. BIJ (Perseroda)	10.000.000.000,00	Perda Kab. Banyumas No. 2 Tahun 2019	9.990.000.000,00	Uang tunai	2.000.000.000,00	Perda Kab. Banyumas No. 13 Tahun 2009	-		2.000.000.000,00	7.990.000.000,00	55.095.468,00	-	2.000.000.000,00
					Jumlah	219.202.606.555,96		23.435.000.000,00		222.496.606.555,96	779.123.791.882,04	12.962.654.866,00	-	222.496.606.555,96

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I.7
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Dalam Rupiah

No.	URAIAN	SALDO, 31 DESEMBER 2018	MUTASI 2019	SALDO, 31 DESEMBER 2019
1	2	3	4	5
1	TANAH	3.034.902.309.299,00	76.230.258.747,00	3.111.132.568.046,00
2	PERALATAN DAN MESIN	914.531.634.533,45	85.129.274.442,68	999.660.908.976,13
3	BANGUNAN DAN GEDUNG	1.576.643.570.027,56	38.759.594.134,00	1.615.403.164.161,56
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2.125.880.392.701,00	210.417.750.897,00	2.336.298.143.598,00
5	ASET TETAP LAINNYA	109.033.835.397,36	(6.633.981.637,50)	102.399.853.759,86
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	20.233.549.923,00	26.545.809.300,00	46.779.359.223,00
JUMLAH		7.781.225.291.881,37	430.448.705.883,18	8.211.673.997.764,55

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I.8
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2019

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 : 3+4-5
1	**Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**	-	-	-	-
1.1	Piutang Ganti Rugi akibat kehilangan kendaraan dinas pada	-	-	-	-
1.2	Piutang Ganti Rugi akibat kehilangan 2 kendaraan dinas pada	-	-	-	-
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	117.951.191.565,00	-	-	117.951.191.565,00
2.1	Bangunan Pasar dan Terminal	211.046.850,00	-	-	211.046.850,00
2.2	Bangunan Pasar dan Renovasi Terminal Wangon	904.718.615,00	-	-	904.718.615,00
2.3	Kolam Renang Langen Tirta Kembar	34.972.600.000,00	-	-	34.972.600.000,00
2.4	Bangunan Kompleks Kebondalem	72.985.149.000,00	-	-	72.985.149.000,00
2.5	Tanah untuk bangunan HGB Pasar Wage	8.877.677.100,00	-	-	8.877.677.100,00
3	Aset Tidak Berwujud	488.232.775,00	2.287.450.674,00	-	2.775.683.449,00
3.1	*Software*	488.232.775,00	2.287.450.674,00	-	2.775.683.449,00
4	Aset Lain-lain	10.847.931.208,00	126.875.528.036,82	5.392.241.874,00	132.331.217.370,82
4.1	Belanja modal untuk perolehan tanah yang masih dalam proses	-	-	-	-
4.2	Kendaraan Hilang	-	-	-	-
4.3	Aset Tetap Rusak	10.847.931.208,00	-	5.392.241.874,00	5.455.689.334,00
4.4	Aset Tetap SMA/SMK yang akan diserahkan ke Provinsi	-	-	-	-
4.5	Reklasifikasi Menjadi Aset Lainnya	-	126.875.528.036,82	-	126.875.528.036,82
	JUMLAH	129.287.355.548,00	129.162.978.710,82	5.392.241.874,00	253.058.092.384,82

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I.9
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Dalam Rupiah

No.	Kode Kegiatan	Jadwal Kegiatan	Jumlah realisasi tahun 2017, 2018, dan 2019			Jumlah akumulasi realisasi s.d. akhir tahun 2019	Jumlah yang dianggarkan dalam APBD tahun berikutnya
			Realisasi tahun 2017	Realisasi tahun 2018	Realisasi tahun 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH			-	-	-	-	-

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I.10
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN
ANGGARAN 2019

Dalam Rupiah

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentuan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH			-	-	-	-	-	-

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I.11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Dalam Rupiah

No.	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp/Valas)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman (%)	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun ini		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH			-	-		-	-	-	-	-	-

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

NERACA

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Dalam Rupiah

	Catatan	31 Desember 2019 (Audited) Rp	31 Desember 2018 (Audited) Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah	5.3.A.1	203.378.045.136,00	258.189.729.189,83
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.A.2	66.419.848,00	281.963.893,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.A.3	151.925.856,00	86.952.299,00
Kas di BLUD	5.3.A.4	34.228.662.958,00	29.499.893.898,40
Kas Lainnya	5.3.A.5	5.667.834.908,00	2.943.214.259,00
Investasi Jangka Pendek	5.3.A.6	-	-
Piutang			
Piutang Pendapatan	5.3.A.7	183.419.387.107,50	159.946.912.399,35
Piutang Lain-lain		-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	5.3.A.8	(78.637.250.873,25)	(76.026.615.867,07)
Jumlah Piutang (Bersih)		104.782.136.234,25	83.920.296.532,28
Beban Dibayar di Muka	5.3.A.9	33.450.000,00	56.972.500,00
Persediaan	5.3.A.10	45.194.874.103,59	46.152.945.489,47
Jumlah Aset Lancar		**393.503.349.043,84**	**421.131.968.060,98**
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Non Permanen	5.3.B.1		
Dana Bergulir		8.825.605.435,00	7.231.396.285,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	5.3.B.2	(3.339.340.927,45)	(3.014.020.955,50)
Jumlah Investasi Non Permanen (Bersih)		5.486.264.507,55	4.217.375.329,50
Investasi Permanen	5.3.B.3	334.229.733.585,32	300.000.312.646,32
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**339.715.998.092,87**	**304.217.687.975,82**
ASET TETAP			
Tanah	5.3.C.1	3.111.132.568.046,00	3.034.902.309.299,00
Peralatan dan Mesin	5.3.C.1	999.660.908.976,13	914.531.634.533,45
Gedung dan Bangunan	5.3.C.1	1.615.403.164.161,56	1.576.643.570.027,56
Jalan, Jaringan dan Instalasi	5.3.C.1	2.336.298.143.598,00	2.125.880.392.701,00
Aset Tetap Lainnya	**5.3.C.1**	**102.399.853.759,86**	109.033.835.397,36
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.C.1	46.779.359.223,00	20.233.549.923,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.C.2	(2.887.785.245.543,40)	(2.206.253.734.580,45)
Jumlah Aset Tetap		**5.323.888.752.221,15**	**5.574.971.557.300,92**
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		-	-
Jumlah Dana Cadangan		-	-
ASET LAINNYA			
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		-	-
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.D.1	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.D.2	97.060.888.565,00	117.951.191.565,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.D.3	322.499.375,00	488.232.775,00
Aset Lain-lain	5.3.D.4	132.331.217.370,82	10.847.931.208,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.D.5	(60.170.289.156,00)	(9.743.516.432,00)
Jumlah Aset Lainnya		**169.544.316.154,82**	**119.543.839.116,00**
JUMLAH ASET		**6.226.652.415.512,68**	**6.419.865.052.453,72**

	Catatan	31 Desember 2019 (Audited) Rp	31 Desember 2018 (Audited) Rp
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.E.1.a	543.554.646,00	467.202.961,00
Utang Bunga		-	-
Utang Pajak		-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.E.1.b	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.E.1.c	1.160.892.742,25	1.468.880.768,00
Utang Beban	5.3.E.1.d	34.804.861.200,00	30.516.311.240,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.E.1.e	13.200.000,00	3.632.055.459,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**48.022.508.588,25**	**47.584.450.428,00**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri	5.3.E.2	-	-
Utang Luar Negeri		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		**48.022.508.588,25**	**47.584.450.428,00**
EKUITAS			
EKUITAS	5.3.F	6.178.629.906.924,43	6.372.280.602.025,72
JUMLAH EKUITAS		**6.178.629.906.924,43**	**6.372.280.602.025,72**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**6.226.652.415.512,68**	**6.419.865.052.453,72**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purwokerto, 2020

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Dalam Rupiah

	Catatan	Tahun 2019 (Audited) Rp	Tahun 2018 (Audited) Rp
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.A.1	229.377.285.773,00	211.550.291.844,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.A.1	32.859.905.780,00	32.535.266.255,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahka	5.5.A.1	12.907.559.398,00	24.789.507.343,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.A.1	410.567.494.748,17	379.113.210.738,83
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.A.1	27.188.633.700,00	41.388.138.494,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.5.A.1	1.467.574.212,00	1.520.017.322,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.A.1	1.437.036.239.000,00	1.373.971.809.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.A.1	474.659.908.721,00	477.533.051.326,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.A.1	44.828.869.000,00	34.250.000.000,00
Penerimaan Dana Desa	5.5.A.1	360.743.521.000,00	295.876.047.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	5.5.A.1	215.847.778.602,00	211.522.699.165,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	5.5.A.1	-	-
Penerimaan Hibah	5.5.A.1	167.439.942.427,00	169.332.334.519,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya	5.5.A.1	18.908.016.315,00	12.205.641.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**3.433.832.728.676,17**	**3.265.588.014.006,83**
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai	5.5.A.2	1.317.180.709.881,00	1.279.343.072.051,00
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.A.2	949.470.698.650,40	844.054.267.149,00
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah	5.5.A.2	40.857.344.650,00	77.228.833.298,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.A.2	13.859.458.800,00	14.968.241.200,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.A.2	631.809.266.871,00	558.608.984.906,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.A.2	533.870.074,00	130.545.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.A.2	21.915.000.000,00	16.957.392.011,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.A.2	3.126.355.300,00	2.352.483.814,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		**2.978.752.704.226,40**	**2.793.643.819.429,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**455.080.024.449,77**	**471.944.194.577,83**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Arus Masuk Kas			
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.B.1	1.115.636.672,00	129.640.000,00
Penerimaan penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.B.1	179.613.000,00	219.950.000,00
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.B.1	13.561.000,00	50.000.000,00
Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		**1.308.810.672,00**	**399.590.000,00**

	Catatan	Tahun 2019 (Audited) Rp	Tahun 2018 (Audited) Rp
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Perolehan Tanah	5.5.B.2	8.168.354.576,00	23.525.790.031,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.B.2	93.368.565.888,00	79.351.637.733,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.B.2	112.662.636.972,00	136.742.721.339,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.B.2	263.219.979.395,00	279.281.890.886,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.B.2	1.377.960.440,00	6.514.899.625,00
Perolehan Aset Lainnya		-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.5.B.2	23.435.000.000,00	43.184.920.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**502.232.497.271,00**	**568.601.859.614,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(500.923.686.599,00)**	**(568.202.269.614,00)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.C	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.5.C	-	6.123.649.529,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**-**	**6.123.649.529,00**
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pokok Utang	5.5.C	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.C	1.581.000.000,00	1.775.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**1.581.000.000,00**	**1.775.000.000,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		**(1.581.000.000,00)**	**4.348.649.529,00**
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.D.1	86.997.351.359,00	85.709.325.780,00
Arus Kas Masuk Transitoris Lainnya	5.5.D.1	23.310.597.876,00	918.436.699,00
Penerimaan Kembali Sisa Uang Persediaan Tahun Lalu	5.5.D.1	77.828.314,00	494.938.757,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**110.385.777.549,00**	**87.122.701.236,00**
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.D.2	86.949.047.832,00	85.709.201.550,00
Arus Kas Keluar Transitoris Lainnya	5.5.D.2	23.302.837.915,00	949.535.856,00
Sisa Uang Persediaan Tahun Berjalan	5.5.D.2	122.599.215,00	77.526.160,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**110.374.484.962,00**	**86.736.263.566,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**11.292.587,00**	**386.437.670,00**
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(47.413.369.562,23)	(91.522.987.837,17)
Saldo Awal Kas Daerah, BLUD dan Dana BOS		290.443.701.985,23	381.966.689.822,40
Saldo Akhir Kas Daerah, BLUD, dan Dana BOS		243.030.332.423,00	290.443.701.985,23
Kas di Bendahara Penerimaan		66.419.848,00	281.963.893,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		151.925.856,00	86.952.299,00
Kas Lainnya		244.210.579,00	189.135.362,00
Saldo Akhir Kas		**243.492.888.706,00**	**291.001.753.539,23**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purwokerto, 2020

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2019 pada hakikatnya merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Mekanisme penyusunan dan penyampaian laporan keuangan secara umum merupakan pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD tersebut kemudian dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan SAP tersebut, laporan keuangan disusun menggunakan basis akrual, yang pada pemerintah Kabupaten Banyumas diterapkan mulai TA 2014.

Pemerintah Kabupaten Banyumas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

   Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi

   Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2019 yang disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrual terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAK), yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi aset nonkeuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Melalui LKPD Kabupaten Banyumas, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. LKPD Kabupaten Banyumas memuat informasi mengenai:

1. informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. informasi mengenai informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

5. informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2019 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap.
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Banyumas, Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD, menjelaskan tentang Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas.

Bab VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup.

BAB VII

PENUTUP

LKPD Kabupaten Banyumas TA 2019 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas TA 2019 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 31 Desember 2019. Selanjutnya informasi dalam LKPD ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2019. Melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Purwokerto, 2020

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

Lampiran V5 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana Desa Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019

No.	Desa	Kecamatan	Anggaran	Penggunaan							Sisa Anggaran
				Bidang Penyelenggaran Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bidang Tidak Terduga	Pembiayaan	Total	
1	Cirahab	Lumbir	1.534.733.000,00	-	1.335.776.000,00	141.000.000,00	15.000.000,00	-	-	1.491.776.000	42.957.000,00
2	Canduk	Lumbir	1.208.729.000,00	-	926.587.400,00	91.938.229,00	155.497.000,00	-	-	1.174.022.629	34.706.371,00
3	Parungkamal	Lumbir	1.391.912.000,00	14.927.000,00	880.691.050,00	98.285.000,00	63.878.000,00	-	-	1.057.781.050	334.130.950,00
4	Besuki	Lumbir	1.300.069.000,00	108.940.136,00	976.753.175,00	117.064.250,00	47.311.439,00	-	50.000.000,00	1.300.069.000	-
5	Karanggayam	Lumbir	1.242.982.000,00	-	1.056.963.000,00	73.214.000,00	102.805.000,00	-	-	1.232.982.000	10.000.000,00
6	Cidora	Lumbir	1.322.488.000,00	-	1.018.710.150,00	224.985.500,00	78.369.300,00	-	-	1.322.064.950	423.050,00
7	Lumbir	Lumbir	1.842.982.000,00	8.300.000,00	1.426.580.470,00	226.346.000,00	58.084.000,00	-	100.000.000,00	1.819.310.470	23.671.530,00
8	Dermaji	Lumbir	1.435.387.000,00	30.997.400,00	1.159.938.539,00	48.000.000,00	106.490.000,00	-	-	1.345.425.939	89.961.061,00
9	Kedunggede	Lumbir	1.464.745.000,00	128.116.000,00	525.259.843,00	335.712.300,00	258.591.500,00	-	-	1.247.679.643	217.065.357,00
10	Cingebul	Lumbir	1.677.316.000,00	-	1.426.984.900,00	90.955.000,00	71.036.700,00	-	-	1.588.976.600	88.339.400,00
11	Randegan	Wangon	1.456.484.000,00	-	523.597.884,00	845.500.000,00	42.380.000,00	-	-	1.411.477.884	45.006.116,00
12	Rawaheng	Wangon	1.510.675.000,00	-	1.120.888.900,00	261.552.000,00	72.573.500,00	-	-	1.455.014.400	55.660.600,00
13	Pengadegan	Wangon	1.434.678.000,00	-	902.175.000,00	390.862.876,00	137.698.026,00	3.026.242,00	-	1.433.762.144	915.856,00
14	Klapagading	Wangon	1.344.726.000,00	-	776.000.834,00	457.539.000,00	66.880.000,00	1.666.000,00	-	1.302.085.834	42.640.166,00
15	Wangon	Wangon	1.234.467.000,00	-	651.863.500,00	530.454.500,00	49.664.000,00	-	-	1.231.982.000	2.485.000,00
16	Banteran	Wangon	1.013.095.000,00	-	694.204.600,00	135.900.000,00	116.000.000,00	-	-	946.104.600	66.990.400,00
17	Jambu	Wangon	1.191.396.000,00	19.975.000,00	1.011.339.150,00	82.094.000,00	23.443.000,00	-	27.000.000,00	1.163.851.150	27.544.850,00
18	Jurangbahas	Wangon	1.005.385.000,00	-	782.229.900,00	7.000.000,00	154.526.162,00	-	56.585.017,00	1.000.341.079	5.043.921,00
19	Cikakak	Wangon	1.524.639.000,00	-	1.085.664.000,00	28.899.400,00	75.466.000,00	39.159.500,00	194.500.000,00	1.423.688.900	100.950.100,00
20	Wlahar	Wangon	1.332.729.000,00	38.000.000,00	1.051.274.225,00	31.337.000,00	-	-	100.000.000,00	1.220.611.225	112.117.775,00
21	Windunegara	Wangon	1.270.677.000,00	-	1.072.611.500,00	35.998.500,00	44.985.900,00	2.611.500,00	-	1.156.207.400	114.469.600,00
22	Klapagading Kulon	Wangon	1.344.541.000,00	87.043.000,00	759.984.895,00	225.850.000,00	154.964.000,00	-	-	1.227.841.895	116.699.105,00
23	Gunung Wetan	Jatilawang	1.399.597.000,00	251.746.500,00	529.675.000,00	292.432.000,00	110.000.000,00	30.000.000,00	182.343.500,00	1.396.197.000	3.400.000,00
24	Pekuncen	Jatilawang	1.232.540.000,00	156.316.264,00	923.018.053,00	101.935.250,00	37.245.000,00	8.566.500,00	-	1.227.081.067	5.458.933,00
25	Karanglewas	Jatilawang	1.056.727.000,00	81.599.600,00	745.375.000,00	149.975.000,00	4.000.000,00	129.400,00	59.500.000,00	1.040.579.000	16.148.000,00
26	Karanganyar	Jatilawang	1.003.904.000,00	-	503.872.000,00	252.390.489,00	164.592.819,00	-	47.686.350,00	968.541.658	35.362.342,00
27	Margasana	Jatilawang	844.048.000,00	-	671.878.387,00	24.225.000,00	40.817.000,00	-	-	736.920.387	107.127.613,00
28	Adisara	Jatilawang	1.231.118.000,00	25.894.000,00	1.010.393.500,00	58.618.400,00	49.966.000,00	-	50.000.000,00	1.194.871.900	36.246.100,00
29	Kedungwringin	Jatilawang	1.301.513.000,00	-	1.013.495.507,00	-	49.194.482,00	-	-	1.062.689.989	238.823.011,00
30	Bantar	Jatilawang	1.439.324.000,00	94.331.971,00	856.404.291,00	147.157.871,00	311.260.250,00	1.737.500,00	-	1.410.891.883	28.432.117,00
31	Tinggarjaya	Jatilawang	1.464.985.000,00	-	1.067.900.900,00	94.381.500,00	21.645.100,00	-	-	1.183.927.500	281.057.500,00
32	Tunjung	Jatilawang	1.489.221.000,00	-	1.412.735.000,00	71.750.000,00	-	-	-	1.484.485.000	4.736.000,00
33	Gentawangi	Jatilawang	1.082.881.000,00	39.480.000,00	855.072.535,00	185.800.700,00	-	-	-	1.080.353.235	2.527.765,00
34	Losari	Rawalo	1.328.973.000,00	10.200.000,00	895.042.000,00	254.426.300,00	47.888.000,00	-	-	1.207.556.300	121.416.700,00
35	Menganti	Rawalo	1.003.694.000,00	-	764.829.000,00	67.546.000,00	34.640.000,00	-	-	867.015.000	136.679.000,00
36	Banjarparakan	Rawalo	1.189.219.000,00	136.183.292,00	778.373.800,00	140.964.600,00	10.674.000,00	2.160.000,00	-	1.068.355.692	120.863.308,00
37	Rawalo	Rawalo	1.182.062.000,00	35.000.000,00	732.745.200,00	41.413.200,00	222.265.000,00	-	-	1.031.423.400	150.638.600,00
38	Tambaknegara	Rawalo	1.340.744.000,00	5.850.000,00	581.545.000,00	599.440.000,00	149.530.000,00	-	-	1.336.365.000	4.379.000,00
39	Sidamulih	Rawalo	1.334.931.000,00	-	1.239.196.087,00	75.506.000,00	-	-	20.228.913,00	1.334.931.000	-
40	Pesawahan	Rawalo	929.990.000,00	20.550.000,00	766.388.466,00	81.152.000,00	36.363.400,00	-	-	904.453.866	25.536.134,00
41	Tipar	Rawalo	1.277.926.000,00	3.849.000,00	937.456.700,00	121.019.975,00	3.710.000,00	-	-	1.066.035.675	211.890.325,00

No.	Desa	Kecamatan	Anggaran	Penggunaan							Sisa Anggaran
				Bidang Penyelenggaran Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bidang Tidak Terduga	Pembiayaan	Total	
42	Sanggreman	Rawalo	1.220.041.000,00	18.984.000,00	933.844.150,00	172.611.496,00	10.000.000,00	-	-	1.135.439.646	84.601.354,00
43	Adisana	Kebasen	1.335.017.000,00	-	1.164.463.958,00	108.000.000,00	62.547.000,00	-	-	1.335.010.958	6.042,00
44	Bangsa	Kebasen	1.240.804.000,00	2.036.000,00	836.021.000,00	220.426.000,00	115.007.000,00	-	-	1.173.490.000	67.314.000,00
45	Karangsari	Kebasen	1.291.279.000,00	-	1.077.684.485,00	39.606.000,00	24.812.000,00	-	6.690.000,00	1.148.792.485	142.486.515,00
46	Randegan	Kebasen	1.115.724.000,00	-	771.651.750,00	-	-	-	-	771.651.750	344.072.250,00
47	Kaliwedi	Kebasen	1.378.046.000,00	-	1.151.767.000,00	27.315.250,00	50.000.000,00	-	-	1.229.082.250	148.963.750,00
48	Sawangan	Kebasen	986.927.000,00	-	661.847.200,00	80.265.500,00	157.560.200,00	2.928.000,00	-	902.600.900	84.326.100,00
49	Kalisalak	Kebasen	1.626.947.000,00	-	1.443.622.000,00	49.512.500,00	45.849.000,00	-	-	1.538.983.500	87.963.500,00
50	Cindaga	Kebasen	1.649.705.000,00	-	1.530.427.000,00	-	57.970.224,00	-	-	1.588.397.224	61.307.776,00
51	Kebasen	Kebasen	1.222.760.000,00	-	654.462.100,00	392.138.500,00	176.159.400,00	-	-	1.222.760.000	-
52	Gambarsari	Kebasen	971.271.000,00	-	749.463.000,00	134.942.000,00	49.810.000,00	10.000.000,00	-	944.215.000	27.056.000,00
53	Tumiyang	Kebasen	939.762.000,00	-	848.154.522,00	12.692.000,00	63.005.900,00	-	-	923.852.422	15.909.578,00
54	Mandirancan	Kebasen	997.734.000,00	-	594.491.697,00	-	215.606.150,00	-	100.000.000,00	910.097.847	87.636.153,00
55	Grujugan	Kemranjen	967.521.000,00	-	609.730.070,00	175.419.000,00	105.688.000,00	-	-	890.837.070	76.683.930,00
56	Sirau	Kemranjen	1.087.610.000,00	22.200.000,00	758.179.496,00	21.089.000,00	71.223.000,00	-	200.000.000,00	1.072.691.496	14.918.504,00
57	Sibalung	Kemranjen	1.214.987.000,00	16.175.000,00	1.086.640.775,00	-	111.596.500,00	-	-	1.214.412.275	574.725,00
58	Sibrama	Kemranjen	1.220.644.000,00	-	1.152.057.000,00	-	68.587.000,00	-	-	1.220.644.000	-
59	Kedungpring	Kemranjen	1.025.323.000,00	-	688.612.300,00	-	195.825.500,00	-	110.000.000,00	994.437.800	30.885.200,00
60	Kecila	Kemranjen	1.095.022.000,00	-	786.727.675,00	44.234.000,00	253.884.100,00	-	-	1.084.845.775	10.176.225,00
61	Nusamangir	Kemranjen	1.011.019.000,00	-	923.857.550,00	7.048.000,00	35.107.150,00	-	13.000.000,00	979.012.700	32.006.300,00
62	Karangjati	Kemranjen	829.831.000,00	350.000,00	790.845.705,00	-	29.840.000,00	-	-	821.035.705	8.795.295,00
63	Kebarongan	Kemranjen	1.120.212.000,00	-	920.861.000,00	-	125.335.000,00	-	-	1.046.196.000	74.016.000,00
64	Sidamulya	Kemranjen	1.016.714.000,00	-	891.044.250,00	-	72.402.000,00	-	-	963.446.250	53.267.750,00
65	Pageralang	Kemranjen	1.427.188.000,00	-	1.281.557.000,00	109.800.000,00	35.000.000,00	-	-	1.426.357.000	831.000,00
66	Alasmalang	Kemranjen	1.025.859.000,00	-	729.364.000,00	19.285.000,00	216.771.500,00	-	-	965.420.500	60.438.500,00
67	Petarangan	Kemranjen	1.364.598.000,00	-	1.318.396.500,00	-	46.002.700,00	-	-	1.364.399.200	198.800,00
68	Karanggintung	Kemranjen	1.415.103.000,00	-	1.233.585.000,00	-	16.235.000,00	-	50.000.000,00	1.299.820.000	115.283.000,00
69	Karangsalam	Kemranjen	1.418.606.000,00	-	1.041.771.550,00	109.717.500,00	260.146.000,00	-	-	1.411.635.050	6.970.950,00
70	Nusadadi	Sumpiuh	983.008.000,00	-	677.255.500,00	37.650.000,00	190.448.000,00	-	-	905.353.500	77.654.500,00
71	Selandaka	Sumpiuh	1.061.191.000,00	-	689.309.540,00	168.500.000,00	4.250.000,00	-	-	862.059.540	199.131.460,00
72	Karanggedang	Sumpiuh	966.594.000,00	-	850.740.950,00	-	94.511.000,00	-	20.000.000,00	965.251.950	1.342.050,00
73	Kemiri	Sumpiuh	1.074.891.000,00	-	782.490.700,00	35.662.271,00	195.276.500,00	-	-	1.013.429.471	61.461.529,00
74	Pandak	Sumpiuh	1.005.944.000,00	-	614.587.350,00	-	364.219.000,00	16.304.000,00	-	995.110.350	10.833.650,00
75	Kuntili	Sumpiuh	1.042.139.000,00	-	984.701.000,00	-	50.000.000,00	-	-	1.034.701.000	7.438.000,00
76	Lebeng	Sumpiuh	1.046.440.000,00	-	857.787.001,00	39.418.000,00	37.473.975,00	3.375.000,00	-	938.053.976	108.386.024,00
77	Selanegara	Sumpiuh	1.268.837.000,00	15.656.000,00	1.097.825.000,00	65.100.000,00	20.102.000,00	-	-	1.198.683.000	70.154.000,00
78	Bogangin	Sumpiuh	1.327.191.000,00	-	1.113.300.100,00	180.741.500,00	4.621.000,00	5.000.000,00	-	1.303.662.600	23.528.400,00
79	Banjarpanepen	Sumpiuh	1.447.277.000,00	-	1.081.880.000,00	24.497.000,00	150.000.000,00	8.368.000,00	50.000.000,00	1.314.745.000	132.532.000,00
80	Ketanda	Sumpiuh	1.457.200.000,00	-	830.345.600,00	14.910.000,00	403.462.600,00	-	200.000.000,00	1.448.718.200	8.481.800,00
81	Plangkapan	Tambak	1.206.856.000,00	-	794.534.250,00	210.809.000,00	139.046.000,00	-		1.144.389.250	62.466.750,00
82	Gumelar Lor	Tambak	969.845.000,00	-	663.431.000,00	77.700.000,00	140.763.425,00	-		881.894.425	87.950.575,00
83	Gumelar Kidul	Tambak	1.034.366.000,00	-	563.485.200,00	212.001.250,00	229.014.250,00	-		1.004.500.700	29.865.300,00
84	Karangpetir	Tambak	1.109.070.000,00	-	532.550.000,00	-	576.520.000,00	-		1.109.070.000	-
85	Gebangsari	Tambak	997.998.000,00	39.667.000,00	687.763.770,00	-	154.611.636,00	-		882.042.406	115.955.594,00
86	Prembun	Tambak	1.216.898.000,00	-	1.158.012.084,00	-	18.292.000,00	-		1.176.304.084	40.593.916,00

No.	Desa	Kecamatan	Anggaran	Penggunaan							Sisa Anggaran
				Bidang Penyelenggaran Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bidang Tidak Terduga	Pembiayaan	Total	
87	Buniayu	Tambak	1.234.263.000,00	-	908.680.500,00	99.348.000,00	103.529.510,00	-		1.111.558.010	122.704.990,00
88	Pesantren	Tambak	911.596.000,00	-	758.748.950,00	-	152.225.000,00	-		910.973.950	622.050,00
89	Karangpucung	Tambak	929.129.000,00	10.000.000,00	590.153.300,00	44.831.200,00	34.080.500,00	-		679.065.000	250.064.000,00
90	Kamulyan	Tambak	1.216.736.000,00	-	1.214.917.580,00	-	1.320.000,00	-		1.216.237.580	498.420,00
91	Purwodadi	Tambak	1.138.504.000,00	-	1.133.574.000,00	1.325.000,00	-	-		1.134.899.000	3.605.000,00
92	Watuagung	Tambak	1.793.992.000,00	-	1.536.275.620,00	-	-	-		1.536.275.620	257.716.380,00
93	Tanggeran	Somagede	1.277.873.000,0000	-	1.060.351.408,0000	-	10.000.000,0000	-	154.200.000,0000	1.224.551.408	53.321.592,00
94	Sokawera	Somagede	1.495.842.000,00	-	974.363.500,00	192.754.500,00	84.831.000,00	-	100.000.000,00	1.351.949.000	143.893.000,00
95	Somagede	Somagede	1.177.329.000,00	-	878.909.010,00	-	220.958.500,00	-	-	1.099.867.510	77.461.490,00
96	Klinting	Somagede	1.119.106.000,00	-	745.346.000,00	-	5.194.000,00	-	333.000.000,00	1.083.540.000	35.566.000,00
97	Kemawi	Somagede	1.432.238.000,00	8.100.000,00	966.324.900,00	30.166.000,00	8.855.000,00	-	200.000.000,00	1.213.445.900	218.792.100,00
98	Piasa Kulon	Somagede	1.066.918.000,00	-	953.157.247,00	-	-	340.000,00	100.000.000,00	1.053.497.247	13.420.753,00
99	Kanding	Somagede	1.286.941.000,00	-	878.825.750,00	120.691.000,00	-	-	150.000.000,00	1.149.516.750	137.424.250,00
100	Somakaton	Somagede	1.208.144.000,00	-	829.354.200,00	-	15.378.000,00	-	-	844.732.200	363.411.800,00
101	Plana	Somagede	1.369.779.000,00	-	566.283.233,00	-	167.573.000,00	-	65.000.000,00	798.856.233	570.922.767,00
102	Srowot	Kalibagor	1.167.289.000,00	-	851.403.000,00	68.123.000,00	-	-	-	919.526.000	247.763.000,00
103	Suro	Kalibagor	1.249.133.000,00	-	1.084.652.750,00	23.500.000,00	19.500.000,00	-	-	1.127.652.750	121.480.250,00
104	Kaliori	Kalibagor	1.622.759.000,00	15.807.000,00	1.310.902.485,00	38.500.000,00	216.480.000,00	-	-	1.581.689.485	41.069.515,00
105	Wlahar Wetan	Kalibagor	1.071.230.000,00	656.669.883,00	324.950.700,00	46.600.000,00	41.075.500,00	-	-	1.069.296.083	1.933.917,00
106	Pekaja	Kalibagor	1.213.170.000,00	4.357.000,00	763.323.000,00	67.505.997,00	215.820.810,00	-	-	1.051.006.807	162.163.193,00
107	Karangdadap	Kalibagor	1.162.082.000,00	-	1.035.277.320,00	20.602.500,00	19.780.000,00	-	-	1.075.659.820	86.422.180,00
108	Kalibagor	Kalibagor	1.096.850.000,00	-	991.769.750,00	-	38.102.125,00	-	-	1.029.871.875	66.978.125,00
109	Pajerukan	Kalibagor	1.211.908.000,00	-	992.542.750,00	-	74.985.250,00	-	-	1.067.528.000	144.380.000,00
110	Petir	Kalibagor	1.018.770.000,00	-	580.349.050,00	16.190.500,00	192.567.000,00	-	-	789.106.550	229.663.450,00
111	Kalicupak Kidul	Kalibagor	951.804.000,00	-	483.032.000,00	60.078.000,00	164.888.250,00	-	-	707.998.250	243.805.750,00
112	Kalicupak Lor	Kalibagor	944.829.000,00	3.120.000,00	541.750.500,00	129.701.000,00	182.505.500,00	-	-	857.077.000	87.752.000,00
113	Kalisogra Wetan	Kalibagor	899.114.000,00	-	636.861.000,00	28.200.000,00	90.420.000,00	-	-	755.481.000	143.633.000,00
114	Binangun	Banyumas	1.239.101.000,00	17.950.000,00	967.468.035,00	22.163.800,00	221.519.000,00	-	-	1.229.100.835	10.000.165,00
115	Pasinggangan	Banyumas	1.767.398.000,00	-	1.688.229.600,00	-	39.054.000,00	-	-	1.727.283.600	40.114.400,00
116	Kedunggede	Banyumas	1.068.907.000,00	4.425.000,00	1.012.729.974,00	-	34.000.000,00	-	-	1.051.154.974	17.752.026,00
117	Karangrau	Banyumas	1.390.777.000,00	7.374.250,00	1.103.810.400,00	236.227.500,00	16.649.000,00	-	-	1.364.061.150	26.715.850,00
118	Kejawar	Banyumas	986.716.000,00	-	678.659.500,00	-	267.124.000,00	-	-	945.783.500	40.932.500,00
119	Danaraja	Banyumas	838.593.000,00	-	706.679.102,00	-	49.511.550,00	-	-	756.190.652	82.402.348,00
120	Kedunguter	Banyumas	880.163.000,00	-	849.881.150,00	4.000.000,00	-	-	-	853.881.150	26.281.850,00
121	Sudagaran	Banyumas	801.055.000,00	-	606.679.950,00	10.000.000,00	174.237.550,00	-	-	790.917.500	10.137.500,00
122	Pekunden	Banyumas	934.168.000,00	-	768.418.290,00	-	89.390.500,00	-	-	857.808.790	76.359.210,00
123	Kalisube	Banyumas	1.006.408.000,00	5.000.000,00	591.768.000,00	2.000.000,00	368.779.000,00	-	-	967.547.000	38.861.000,00
124	Dawuhan	Banyumas	1.023.384.000,00	-	827.834.500,00	-	57.543.000,00	-	36.000.000,00	921.377.500	102.006.500,00
125	Papringan	Banyumas	1.119.586.000,00	-	1.028.632.000,00	33.961.500,00	5.451.000,00	-	-	1.068.044.500	51.541.500,00
126	Wlahar Kulon	Patikraja	999.049.000,00	-	433.567.217,00	225.280.000,00	335.838.500,00	-	-	994.685.717	4.363.283,00
127	Sokawera	Patikraja	1.016.079.000,00	-	960.346.123,00	19.595.000,00	6.950.000,00	-	-	986.891.123	29.187.877,00
128	Pegalongan	Patikraja	941.521.000,00	-	683.808.750,00	136.255.000,00	88.307.500,00	-	-	908.371.250	33.149.750,00
129	Patikraja	Patikraja	964.080.000,00	-	869.100.000,00	63.480.000,00	28.500.000,00	-	-	961.080.000	3.000.000,00
130	Notog	Patikraja	1.314.420.000,00	-	1.222.452.100,00	72.392.500,00	19.575.400,00	-	-	1.314.420.000	-
131	Karangendep	Patikraja	1.524.770.000,00	-	1.177.817.333,00	40.600.000,00	306.352.667,00	-	-	1.524.770.000	-

No.	Desa	Kecamatan	Anggaran	Penggunaan							Sisa Anggaran
				Bidang Penyelenggaran Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bidang Tidak Terduga	Pembiayaan	Total	
132	Sawangan Wetan	Patikraja	1.670.651.000,00	-	1.603.736.127,00	19.821.500,00	35.298.000,00	-	-	1.658.855.627	11.795.373,00
133	Kedungwuluh Kidul	Patikraja	1.212.386.000,00	-	1.108.744.849,00	-	84.369.400,00	-	18.000.000,00	1.211.114.249	1.271.751,00
134	Kedungrandu	Patikraja	1.231.128.000,00	-	1.229.653.000,00	-	1.475.000,00	-	-	1.231.128.000	-
135	Kedungwuluh Lor	Patikraja	1.104.839.000,00	-	1.065.544.000,00	-	29.784.500,00	-	-	1.095.328.500	9.510.500,00
136	Karanganyar	Patikraja	959.669.000,00	-	777.225.000,00	24.860.000,00	69.543.000,00	-	-	871.628.000	88.041.000,00
137	Sidabowa	Patikraja	1.074.146.000,00	37.458.750,00	827.535.433,00	165.728.489,00	30.000.000,00	-	-	1.060.722.672	13.423.328,00
138	Kedungwringin	Patikraja	1.064.702.000,00	-	849.588.250,00	33.539.200,00	55.817.150,00	-	-	938.944.600	125.757.400,00
139	Gerduren	Purwojati	1.227.156.000,00	-	1.105.957.000,00	40.900.000,00	64.000.000,00	9.485.150,00	-	1.220.342.150	6.813.850,00
140	Karangtalun Kidul	Purwojati	1.111.098.000,00	15.000.000,00	873.364.200,00	15.280.000,00	56.931.000,00	-	100.000.000,00	1.060.575.200	50.522.800,00
141	Kaliurip	Purwojati	921.905.000,00	-	769.539.500,00	12.780.000,00	80.242.400,00	-	-	862.561.900	59.343.100,00
142	Karangtalun Lor	Purwojati	910.510.000,00	-	761.323.500,00	18.859.000,00	124.092.250,00	-	-	904.274.750	6.235.250,00
143	Purwojati	Purwojati	1.063.654.000,00	-	835.018.000,00	41.782.500,00	125.936.000,00	-	-	1.002.736.500	60.917.500,00
144	Klapasawit	Purwojati	942.926.000,00	14.340.000,00	678.491.300,00	46.763.200,00	32.200.000,00	-	-	771.794.500	171.131.500,00
145	Karangmangu	Purwojati	1.127.837.000,00	44.961.535,00	870.608.172,00	24.675.000,00	35.230.000,00	-	-	975.474.707	152.362.293,00
146	Kaliputih	Purwojati	940.981.000,00	-	699.582.082,00	56.967.500,00	65.045.000,00	45.400.000,00	-	866.994.582	73.986.418,00
147	Kaliwangi	Purwojati	1.161.251.000,00	-	1.054.340.150,00	-	70.102.500,00	-	-	1.124.442.650	36.808.350,00
148	Kalitapen	Purwojati	1.403.922.000,00	7.800.000,00	1.286.030.000,00	69.000.000,00	39.400.000,00	-	-	1.402.230.000	1.692.000,00
149	Darmakradenan	Ajibarang	1.789.235.000,00	-	1.681.304.950,00	-	10.370.000,00	-	-	1.691.674.950	97.560.050,00
150	Tipar Kidul	Ajibarang	1.514.962.000,00	36.680.000,00	965.741.000,00	394.019.000,00	38.887.500,00	5.830.000,00	-	1.441.157.500	73.804.500,00
151	Sawangan	Ajibarang	1.537.974.000,00	40.999.500,00	1.194.844.428,00	-	97.785.000,00	-	-	1.333.628.928	204.345.072,00
152	Jingkang	Ajibarang	1.443.089.000,00	11.565.000,00	1.195.081.450,00	-	90.016.750,00	-	100.000.000,00	1.396.663.200	46.425.800,00
153	Banjarsari Kidul	Ajibarang	1.496.124.000,00	15.570.000,00	1.279.660.720,00	-	82.361.500,00	-	-	1.377.592.220	118.531.780,00
154	Kalibenda	Ajibarang	997.898.000,00	16.753.000,00	906.302.100,00	-	5.000.000,00	-	-	928.055.100	69.842.900,00
155	Pancurendang	Ajibarang	1.205.675.000,00	28.789.000,00	935.835.850,00	-	131.941.340,00	-	-	1.096.566.190	109.108.810,00
156	Pancasan	Ajibarang	1.337.451.000,00	-	807.928.500,00	-	348.888.807,00	-	-	1.156.817.307	180.633.693,00
157	Karangbawang	Ajibarang	1.236.346.000,00	-	996.829.000,00	-	156.770.000,00	-	-	1.153.599.000	82.747.000,00
158	Kracak	Ajibarang	1.659.766.000,00	-	1.378.502.000,00	-	168.180.900,00	-	-	1.546.682.900	113.083.100,00
159	Ajibarang Kulon	Ajibarang	993.543.000,00	129.962.773,00	392.645.200,00	5.565.000,00	115.885.650,00	-	290.000.000,00	934.058.623	59.484.377,00
160	Ajibarang Wetan	Ajibarang	953.554.000,00	-	897.656.500,00	-	12.590.000,00	-	-	910.246.500	43.307.500,00
161	Lesmana	Ajibarang	1.144.277.000,00	-	1.024.268.550,00	-	10.680.000,00	-	73.000.000,00	1.107.948.550	36.328.450,00
162	Pandansari	Ajibarang	990.403.000,00	42.549.787,00	387.382.450,00	387.382.450,00	405.086.900,00	-	-	1.222.401.587	(231.998.587,00)
163	Ciberung	Ajibarang	1.065.759.000,00	30.304.000,00	810.788.000,00	-	68.834.500,00	-	-	909.926.500	155.832.500,00
164	Karangkemojing	Gumelar	1.516.121.000,00	127.330.000,00	1.187.451.169,00	37.230.000,00	-	-	90.000.000,00	1.442.011.169	74.109.831,00
165	Paningkaban	Gumelar	1.401.037.000,00	-	936.000.600,00	370.648.000,00	22.961.500,00	3.755.000,00	20.000.000,00	1.353.365.100	47.671.900,00
166	Cihonje	Gumelar	1.582.096.000,00	-	1.258.520.500,00	224.571.000,00	87.029.500,00	4.490.000,00	-	1.574.611.000	7.485.000,00
167	Gancang	Gumelar	1.028.775.000,00	10.500.000,00	575.121.414,00	343.000.000,00	2.140.000,00	-	50.000.000,00	980.761.414	48.013.586,00
168	Kedungurang	Gumelar	1.358.165.000,00	-	1.254.445.900,00	26.961.000,00	46.830.838,00	-	-	1.328.237.738	29.927.262,00
169	Gumelar	Gumelar	1.424.404.000,00	-	806.518.500,00	124.610.500,00	447.318.500,00	-	-	1.378.447.500	45.956.500,00
170	Cilangkap	Gumelar	1.417.907.000,00	-	1.002.672.450,00	217.307.820,00	184.646.400,00	-	-	1.404.626.670	13.280.330,00
171	Tlaga	Gumelar	1.101.624.000,00	15.030.000,00	895.465.550,00	33.054.000,00	42.745.450,00	14.489.000,00	30.000.000,00	1.030.784.000	70.840.000,00
172	Samudra	Gumelar	1.773.861.000,00	15.038.250,00	1.644.574.700,00	94.706.500,00	-	-	17.947.775,00	1.772.267.225	1.593.775,00
173	Samudra Kulon	Gumelar	1.333.733.000,00	13.617.500,00	1.049.002.500,00	115.416.000,00	75.270.000,00	10.999.000,00	-	1.264.305.000	69.428.000,00
174	Cikembulan	Pekuncen	1.249.456.000,00	-	1.018.214.259,00	2.764.500,00	137.101.950,00	-	50.000.000,00	1.208.080.709	41.375.291,00
175	Candinegara	Pekuncen	1.090.891.000,00	-	926.937.509,00	2.595.000,00	88.912.150,00	1.200.000,00	13.500.000,00	1.033.144.659	57.746.341,00
176	Karangklesem	Pekuncen	1.159.339.000,00	14.000.000,00	797.605.825,00	116.132.250,00	182.080.000,00	-	-	1.109.818.075	49.520.925,00

No.	Desa	Kecamatan	Anggaran	Penggunaan							Sisa Anggaran
				Bidang Penyelenggaran Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bidang Tidak Terduga	Pembiayaan	Total	
177	Cikawung	Pekuncen	1.027.829.000,00	-	861.826.481,00	1.920.000,00	113.819.900,00	-	-	977.566.381	50.262.619,00
178	Cibangkong	Pekuncen	1.350.094.000,00	-	1.082.074.250,00	-	163.526.000,00	1.450.000,00	50.000.000,00	1.297.050.250	53.043.750,00
179	Petahunan	Pekuncen	1.347.365.000,00	-	1.106.306.250,00	-	114.921.000,00	800.000,00	-	1.222.027.250	125.337.750,00
180	Semedo	Pekuncen	1.347.555.000,00	-	950.567.000,00	-	392.924.100,00	-	-	1.343.491.100	4.063.900,00
181	Banjaranyar	Pekuncen	1.362.947.000,00	59.705.709,00	1.003.951.938,00	52.148.127,00	20.672.500,00	6.417.250,00	40.000.000,00	1.182.895.524	180.051.476,00
182	Pasiraman Lor	Pekuncen	956.745.000,00	-	734.435.463,00	150.201.000,00	27.517.500,00	-	41.482.074,00	953.636.037	3.108.963,00
183	Pasiraman Kidul	Pekuncen	880.938.000,00	-	756.766.425,00	2.500.000,00	87.775.500,00	-	9.711.250,00	856.753.175	24.184.825,00
184	Tumiyang	Pekuncen	1.322.124.000,00	-	1.050.886.964,00	174.176.000,00	33.640.000,00	1.000.000,00	60.000.000,00	1.319.702.964	2.421.036,00
185	Glempang	Pekuncen	1.050.139.000,00	17.233.500,00	714.086.500,00	122.615.000,00	35.023.000,00	-	100.000.000,00	988.958.000	61.181.000,00
186	Pekuncen	Pekuncen	1.296.685.000,00	-	1.156.672.500,00	46.706.000,00	90.216.000,00	-	-	1.293.594.500	3.090.500,00
187	Karangkemiri	Pekuncen	1.439.175.000,00	-	985.229.225,00	264.620.000,00	58.750.000,00	1.200.000,00	40.000.000,00	1.349.799.225	89.375.775,00
188	Kranggan	Pekuncen	1.074.840.000,00	1.010.000,00	936.864.460,00	25.606.500,00	109.625.000,00	-	-	1.073.105.960	1.734.040,00
189	Krajan	Pekuncen	1.411.426.000,00	-	1.359.953.481,00	-	2.975.000,00	-	2.071.461,00	1.364.999.942	46.426.058,00
190	Panusupan	Cilongok	1.636.134.000,00	-	1.488.205.856,00	-	74.126.450,00	-	50.000.000,00	1.612.332.306	23.801.694,00
191	Jatisaba	Cilongok	1.308.517.000,00	-	1.165.747.870,00	-	129.560.000,00	-	-	1.295.307.870	13.209.130,00
192	Kasegeran	Cilongok	1.343.391.000,00	-	1.270.913.500,00	-	22.755.000,00	-	7.255.000,00	1.300.923.500	42.467.500,00
193	Pejogol	Cilongok	1.200.150.000,00	-	1.174.033.000,00	-	7.180.000,00	-	-	1.181.213.000	18.937.000,00
194	Langgongsari	Cilongok	1.505.046.000,00	-	1.337.544.145,00	50.288.000,00	-	-	-	1.387.832.145	117.213.855,00
195	Pageraji	Cilongok	1.638.571.000,00	-	1.296.989.600,00	61.500.000,00	172.970.000,00	-	100.000.000,00	1.631.459.600	7.111.400,00
196	Sudimara	Cilongok	1.255.436.000,00	22.500.000,00	919.865.617,00	-	142.405.400,00	-	115.000.000,00	1.199.771.017	55.664.983,00
197	Batuanten	Cilongok	1.216.247.000,00	30.800.000,00	1.032.775.000,00	32.220.000,00	49.891.500,00	-	56.532.000,00	1.202.218.500	14.028.500,00
198	Cipete	Cilongok	1.296.253.000,00	35.214.000,00	1.161.349.410,00	30.820.000,00	28.980.000,00	3.000.000,00	-	1.259.363.410	36.889.590,00
199	Cilongok	Cilongok	1.295.907.000,00	-	1.035.671.900,00	238.300.000,00	-	-	-	1.273.971.900	21.935.100,00
200	Pernasidi	Cilongok	1.205.982.000,00	-	1.111.819.066,00	-	58.940.000,00	-	-	1.170.759.066	35.222.934,00
201	Cikidang	Cilongok	971.333.000,00	15.000.000,00	658.738.500,00	45.960.000,00	160.113.000,00	-	82.563.200,00	962.374.700	8.958.300,00
202	Karanglo	Cilongok	1.106.557.000,00	-	902.716.423,00	-	192.105.350,00	-	-	1.094.821.773	11.735.227,00
203	Kalisari	Cilongok	1.068.609.000,00	-	922.267.270,00	39.894.178,00	88.707.291,00	-	-	1.050.868.739	17.740.261,00
204	Karangtengah	Cilongok	1.669.387.000,00	-	1.360.366.850,00	236.388.800,00	39.813.800,00	-	-	1.636.569.450	32.817.550,00
205	Panembangan	Cilongok	1.199.158.000,00	-	1.071.060.700,00	56.720.000,00	67.020.000,00	-	-	1.194.800.700	4.357.300,00
206	Rancamaya	Cilongok	1.215.547.000,00	22.400.000,00	1.038.326.350,00	6.780.000,00	39.724.000,00	-	-	1.107.230.350	108.316.650,00
207	Sambirata	Cilongok	1.669.427.000,00	-	1.619.127.000,00	-	41.660.000,00	-	-	1.660.787.000	8.640.000,00
208	Gununglurah	Cilongok	1.792.157.000,00	-	1.679.923.000,00	4.500.000,00	45.755.000,00	-	-	1.730.178.000	61.979.000,00
209	Sokawera	Cilongok	1.779.531.000,00	-	1.467.183.550,00	-	247.375.000,00	-	-	1.714.558.550	64.972.450,00
210	Kediri	Karanglewas	1.155.221.000,00	-	772.669.800,00	214.075.600,00	154.662.500,00	-	-	1.141.407.900	13.813.100,00
211	Pangebatan	Karanglewas	1.172.945.000,00	-	835.487.353,00	-	2.445.000,00	-	-	837.932.353	335.012.647,00
212	Tamansari	Karanglewas	1.366.249.000,00	-	672.742.600,00	544.290.000,00	49.717.257,00	-	-	1.266.749.857	99.499.143,00
213	Karanglewas Kidul	Karanglewas	992.102.000,00	-	191.342.025,00	-	-	-	-	191.342.025	800.759.975,00
214	Karangkemiri	Karanglewas	1.164.200.000,00	-	1.062.778.795,00	15.000.000,00	77.310.000,00	-	-	1.155.088.795	9.111.205,00
215	Pasir Wetan	Karanglewas	981.112.000,00	-	861.808.900,00	43.925.000,00	63.418.000,00	-	-	969.151.900	11.960.100,00
216	Pasir Lor	Karanglewas	1.045.776.000,00	-	278.462.940,00	143.061.450,00	109.377.308,00	-	100.000.000,00	630.901.698	414.874.302,00
217	Pasir Kulon	Karanglewas	1.011.890.000,00	-	542.958.768,00	242.821.772,00	118.655.730,00	-	-	904.436.270	107.453.730,00
218	Jipang	Karanglewas	1.150.881.000,00	-	832.140.000,00	46.000.000,00	30.228.000,00	-	-	908.368.000	242.513.000,00
219	Karanggude Kulon	Karanglewas	1.135.650.000,00	-	961.410.450,00	-	10.262.300,00	-	-	971.672.750	163.977.250,00
220	Singasari	Karanglewas	1.091.019.000,00	1.470.000,00	793.539.250,00	9.157.500,00	111.019.610,00	-	-	915.186.360	175.832.640,00
221	Babakan	Karanglewas	1.258.552.000,00	-	947.754.000,00	9.000.000,00	118.655.000,00	-	105.000.000,00	1.180.409.000	78.143.000,00

No.	Desa	Kecamatan	Anggaran	Penggunaan							Sisa Anggaran
				Bidang Penyelenggaran Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bidang Tidak Terduga	Pembiayaan	Total	
222	Sunyalangu	Karanglewas	1.356.874.000,00	-	1.196.648.000,00	8.750.000,00	106.500.000,00	-	-	1.311.898.000	44.976.000,00
223	Kalikidang	Sokaraja	1.119.759.000,00	-	982.159.703,00	-	86.368.660,00	-	-	1.068.528.363	51.230.637,00
224	Wiradadi	Sokaraja	1.098.092.000,00	-	967.096.500,00	-	115.961.000,00	3.500.000,00	-	1.086.557.500	11.534.500,00
225	Karangkedawung	Sokaraja	904.721.000,00	-	559.372.651,00	92.260.000,00	95.991.000,00	-	132.072.250,00	879.695.901	25.025.099,00
226	Sokaraja Tengah	Sokaraja	991.630.000,00	25.000.000,00	665.527.878,00	160.550.000,00	31.032.500,00	-	50.000.000,00	932.110.378	59.519.622,00
227	Sokaraja Kidul	Sokaraja	944.110.000,00	-	943.209.180,00	-	-	-	-	943.209.180	900.820,00
228	Klahang	Sokaraja	1.031.396.000,00	-	754.317.660,00	-	271.574.000,00	-	-	1.025.891.660	5.504.340,00
229	Banjarsari Kidul	Sokaraja	942.425.000,00	-	842.085.000,00	-	100.340.000,00	-	-	942.425.000	-
230	Sokaraja Wetan	Sokaraja	985.234.000,00	-	665.747.090,00	34.600.000,00	284.886.910,00	-	-	985.234.000	-
231	Jompo Kulon	Sokaraja	874.932.000,00	10.220.000,00	557.826.150,00	-	224.301.000,00	-	-	792.347.150	82.584.850,00
232	Banjaranyar	Sokaraja	1.014.322.000,00	-	880.797.950,00	13.200.000,00	20.000.000,00	-	100.000.000,00	1.013.997.950	324.050,00
233	Lemberang	Sokaraja	1.224.179.000,00	-	1.144.466.000,00	-	53.644.500,00	-	-	1.198.110.500	26.068.500,00
234	Karangduren	Sokaraja	1.049.714.000,00	-	683.557.510,00	-	362.059.918,00	-	-	1.045.617.428	4.096.572,00
235	Sokaraja Lor	Sokaraja	957.182.000,00	14.577.450,00	777.433.000,00	44.690.000,00	120.481.550,00	-	-	957.182.000	-
236	Kedondong	Sokaraja	1.064.284.000,00	-	804.825.500,00	-	170.408.200,00	-	-	975.233.700	89.050.300,00
237	Pamijen	Sokaraja	960.762.000,00	-	905.634.145,00	-	35.874.450,00	-	-	941.508.595	19.253.405,00
238	Sokaraja Kulon	Sokaraja	979.930.000,00	77.400.000,00	341.210.000,00	-	53.763.200,00	-	250.000.000,00	722.373.200	257.556.800,00
239	Karangnanas	Sokaraja	1.551.606.000,00	-	1.166.000.750,00	-	179.300.500,00	-	200.000.000,00	1.545.301.250	6.304.750,00
240	Karangrau	Sokaraja	923.715.000,00	1.998.000,00	743.264.190,00	-	46.408.250,00	-	-	791.670.440	132.044.560,00
241	Ledug	Kembaran	1.223.059.000,00	-	931.448.800,00	-	18.557.000,00	-	250.000.000,00	1.200.005.800	23.053.200,00
242	Pliken	Kembaran	1.482.946.000,00	5.060.000,00	1.319.362.663,00	-	37.365.500,00	-	25.000.000,00	1.386.788.163	96.157.837,00
243	Purwodadi	Kembaran	921.887.000,00	-	431.301.000,00	-	470.586.000,00	-	20.000.000,00	921.887.000	-
244	Karangtengah	Kembaran	1.001.140.000,00	158.854.775,00	522.518.400,00	-	269.862.000,00	-	-	951.235.175	49.904.825,00
245	Kramat	Kembaran	946.265.000,00	17.956.000,00	561.468.550,00	-	129.215.000,00	-	-	708.639.550	237.625.450,00
246	Sambeng Wetan	Kembaran	904.392.000,00	-	343.931.538,00	44.170.000,00	386.233.750,00	11.647.000,00	-	785.982.288	118.409.712,00
247	Sambeng Kulon	Kembaran	995.682.000,00	-	783.943.110,00	17.957.250,00	132.942.240,00	-	-	934.842.600	60.839.400,00
248	Purbadana	Kembaran	1.050.114.000,00	7.440.000,00	544.429.600,00	6.448.000,00	153.733.200,00	-	132.182.205,00	844.233.005	205.880.995,00
249	Kembaran	Kembaran	1.216.602.000,00	-	952.992.608,00	-	223.395.750,00	-	-	1.176.388.358	40.213.642,00
250	Bojongsari	Kembaran	1.231.925.000,00	-	946.076.000,00	-	46.597.000,00	-	-	992.673.000	239.252.000,00
251	Karangsoka	Kembaran	938.436.000,00	25.310.828,00	539.745.527,00	-	373.379.645,00	-	-	938.436.000	-
252	Dukuhwaluh	Kembaran	1.233.568.000,00	-	934.302.100,00	-	287.715.000,00	-	-	1.222.017.100	11.550.900,00
253	Tambaksari Kidul	Kembaran	1.021.758.000,00	-	529.271.000,00	63.363.500,00	429.123.500,00	-	-	1.021.758.000	-
254	Bantarwuni	Kembaran	1.125.016.000,00	5.498.500,00	1.034.726.000,00	9.700.000,00	75.091.500,00	-	-	1.125.016.000	-
255	Karangsari	Kembaran	1.060.422.000,00	16.590.000,00	962.972.900,00	-	2.685.000,00	-	-	982.247.900	78.174.100,00
256	Linggasari	Kembaran	1.290.283.000,00	-	986.523.100,00	-	9.872.500,00	-	194.976.000,00	1.191.371.600	98.911.400,00
257	Silado	Sumbang	970.660.000,00	43.742.750,00	830.931.123,00	10.197.700,00	80.966.750,00	4.676.500,00	-	970.514.823	145.177,00
258	Karangturi	Sumbang	1.022.091.000,00	20.568.639,00	434.999.500,00	450.644.000,00	104.559.000,00	-	-	1.010.771.139	11.319.861,00
259	Karangcegak	Sumbang	1.023.697.000,00	7.695.000,00	774.199.700,00	19.789.000,00	184.385.000,00	-	-	986.068.700	37.628.300,00
260	Sumbang	Sumbang	1.431.291.000,00	17.468.643,00	666.839.745,00	11.478.600,00	636.677.500,00	-	-	1.332.464.488	98.826.512,00
261	Tambaksogra	Sumbang	1.241.983.000,00	-	794.224.680,00	165.754.500,00	148.288.061,00	-	130.000.000,00	1.238.267.241	3.715.759,00
262	Kebanggan	Sumbang	1.161.086.000,00	49.844.000,00	971.015.000,00	10.000.000,00	56.450.000,00	-	50.000.000,00	1.137.309.000	23.777.000,00
263	Kawungcarang	Sumbang	923.144.000,00	-	552.747.700,00	262.129.780,00	46.196.500,00	-	-	861.073.980	62.070.020,00
264	Karanggintung	Sumbang	1.170.099.000,00	2.200.000,00	1.053.810.125,00	49.072.300,00	39.570.000,00	-	6.968.000,00	1.151.620.425	18.478.575,00
265	Datar	Sumbang	1.083.589.000,00	28.800.000,00	831.196.100,00	150.500.000,00	35.763.000,00	-	-	1.046.259.100	37.329.900,00
266	Banjarsari Kulon	Sumbang	1.208.601.000,00	-	662.160.050,00	302.502.600,00	188.572.500,00	-	-	1.153.235.150	55.365.850,00

No.	Desa	Kecamatan	Anggaran	Penggunaan							Sisa Anggaran
				Bidang Penyelenggaran Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bidang Tidak Terduga	Pembiayaan	Total	
267	Banjarsari Wetan	Sumbang	1.104.364.000,00	13.765.600,00	913.818.500,00	42.520.000,00	63.761.500,00	4.000.000,00	-	1.037.865.600	66.498.400,00
268	Banteran	Sumbang	1.541.695.000,00	-	969.027.500,00	150.000.000,00	98.010.400,00	-	247.498.500,00	1.464.536.400	77.158.600,00
269	Ciberem	Sumbang	1.293.990.000,00	10.320.000,00	872.123.740,00	98.869.750,00	230.174.800,00	-	42.001.600,00	1.253.489.890	40.500.110,00
270	Susukan	Sumbang	1.247.514.000,00	51.877.700,00	798.479.650,00	-	70.520.500,00	-	137.694.305,00	1.058.572.155	188.941.845,00
271	Sikapat	Sumbang	1.377.177.000,00	1.500.000,00	1.053.750.700,00	-	-	-	-	1.055.250.700	321.926.300,00
272	Gandatapa	Sumbang	1.790.355.000,00	-	970.148.300,00	3.000.000,00	186.812.000,00	-	-	1.159.960.300	630.394.700,00
273	Kotayasa	Sumbang	2.002.787.000,00	25.246.000,00	1.641.283.575,00	89.379.800,00	245.101.000,00	-	-	2.001.010.375	1.776.625,00
274	Limpakuwus	Sumbang	1.723.846.000,00	332.632.694,00	1.251.381.250,00	-	56.600.000,00	-	-	1.640.613.944	83.232.056,00
275	Kedungmalang	Sumbang	938.222.000,00	-	609.331.150,00	8.589.476,00	319.457.558,00	-	-	937.378.184	843.816,00
276	Purwosari	Baturraden	998.230.000,00	-	297.612.000,00	-	293.871.650,00	-	-	591.483.650	406.746.350,00
277	Kutasari	Baturraden	1.056.069.000,00	-	516.617.000,00	-	530.793.914,00	-	-	1.047.410.914	8.658.086,00
278	Pandak	Baturraden	917.914.000,00	-	250.786.825,00	-	85.494.000,00	-	-	336.280.825	581.633.175,00
279	Pamijen	Baturraden	909.532.000,00	-	646.844.000,00	-	186.658.000,00	-	75.000.000,00	908.502.000	1.030.000,00
280	Rempoah	Baturraden	1.228.067.000,00	-	1.000.072.800,00	-	121.205.000,00	-	30.000.000,00	1.151.277.800	76.789.200,00
281	Kebumen	Baturraden	1.042.464.000,00	3.200.000,00	821.000.170,00	-	-	-	218.263.830,00	1.042.464.000	-
282	Karangtengah	Baturraden	1.423.567.000,00	-	1.351.571.725,00	-	17.790.000,00	-	-	1.369.361.725	54.205.275,00
283	Kemutug Kidul	Baturraden	1.133.420.000,00	-	1.107.965.089,00	-	25.170.000,00	-	-	1.133.135.089	284.911,00
284	Karangsalam Lor	Baturraden	1.012.733.000,00	-	880.974.768,00	-	107.453.460,00	-	5.000.000,00	993.428.228	19.304.772,00
285	Kemutug Lor	Baturraden	1.065.682.000,00	-	890.301.500,00	-	100.353.100,00	-	-	990.654.600	75.027.400,00
286	Karangmangu	Baturraden	850.998.000,00	-	479.308.725,00	26.730.000,00	231.499.000,00	-	-	737.537.725	113.460.275,00
287	Ketenger	Baturraden	990.466.000,00	-	853.299.000,00	-	131.258.400,00	-	-	984.557.400	5.908.600,00
288	Karangsalam Kidul	Kedungbanteng	922.996.000,00	-	451.100.588,00	49.610.000,00	215.411.000,00	-	-	716.121.588	206.874.412,00
289	Kebocoran	Kedungbanteng	1.193.747.000,00	-	806.644.250,00	-	235.164.000,00	-	-	1.041.808.250	151.938.750,00
290	Kedungbanteng	Kedungbanteng	1.058.072.000,00	111.186.000,00	734.420.825,00	-	170.076.700,00	-	-	1.015.683.525	42.388.475,00
291	Beji	Kedungbanteng	1.294.220.000,00	-	1.284.701.018,00	-	-	-	-	1.284.701.018	9.518.982,00
292	Karangnangka	Kedungbanteng	1.066.774.000,00	-	939.909.780,00	13.375.000,00	-	-	28.784.662,00	982.069.442	84.704.558,00
293	Keniten	Kedungbanteng	1.134.057.000,00	-	1.123.363.400,00	-	-	-	-	1.123.363.400	10.693.600,00
294	Dawuhan Wetan	Kedungbanteng	1.169.440.000,00	-	897.611.800,00	-	118.717.200,00	6.900.000,00	32.000.000,00	1.055.229.000	114.211.000,00
295	Dawuhan Kulon	Kedungbanteng	1.042.107.000,00	-	948.391.040,00	-	65.523.000,00	-	-	1.013.914.040	28.192.960,00
296	Basch	Kedungbanteng	1.209.550.000,00	343.937.350,00	719.887.100,00	-	70.959.000,00	-	20.000.000,00	1.154.783.450	54.766.550,00
297	Kalisalak	Kedungbanteng	1.120.853.000,00	-	1.085.417.114,00	-	-	-	-	1.085.417.114	35.435.886,00
298	Windujaya	Kedungbanteng	1.134.706.000,00	-	1.016.971.280,00	71.100.000,00	-	-	-	1.088.071.280	46.634.720,00
299	Kalikesur	Kedungbanteng	1.066.237.000,00	-	803.187.131,00	-	139.875.000,00	-	-	943.062.131	123.174.869,00
300	Kutaliman	Kedungbanteng	1.298.920.000,00	-	1.137.987.000,00	47.354.000,00	39.825.000,00	12.000.000,00	50.000.000,00	1.287.166.000	11.754.000,00
301	Melung	Kedungbanteng	1.095.388.000,00	-	773.715.500,00	-	234.347.500,00	-	87.325.000,00	1.095.388.000	-
		Jumlah	360.743.521.000,00	4.448.642.529	273.980.809.477	20.392.184.196	31.887.428.447,00	287.610.542,00	7.102.562.892,00	338.099.238.083	22.644.282.917,00

Purwokerto, 2020

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

	Catatan	2019 (Audited)	2018 (Audited)
		Rp	Rp
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL		290.345.329.675,23	382.315.707.328,40
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.A	290.345.329.675,23	382.315.707.328,40
Sub Total		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.B	242.705.123.481,00	290.345.329.675,23
Sub Total		242.705.123.481,00	290.345.329.675,23
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	5.2.C	**242.705.123.481,00**	**290.345.329.675,23**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purwokerto, 2020

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

	Catatan	2019 (Audited) Rp	2018 (Audited) Rp	Kenaikan/ (Penurunan) Rp	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.A.1.a	232.767.121.105,00	215.706.584.679,00	17.060.536.426,00	7,91
Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.A.1.b	33.518.616.198,75	32.342.492.788,00	1.176.123.410,75	3,64
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5 A.1.c	18.531.476.407,15	40.581.917.846,00	(22.050.441.438,85)	(54,34)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.4.A.1.d	423.496.165.484,17	386.868.465.623,96	36.627.699.860,21	9,47
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**708.313.379.195,07**	**675.499.460.936,96**	**32.813.918.258,11**	**4,86**
PENDAPATAN TRANSFER					
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan					
Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.A.2.a	47.040.923.562,00	40.672.552.049,00	6.368.371.513,00	15,66
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.4.A.2.a	2.066.107.794,00	2.188.277.298,00	(122.169.504,00)	(5,58)
Dana Alokasi Umum	5.4.A.2.a	1.441.765.282.000,00	1.373.971.809.000,00	67.793.473.000,00	4,93
Dana Alokasi Khusus	5.4.A.2.a	474.659.908.721,00	477.533.051.326,00	(2.873.142.605,00)	(0,60)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		**1.965.532.222.077,00**	**1.894.365.689.673,00**	**71.166.532.404,00**	**3,76**
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya					
Dana Otonomi Khusus		-	-	-	~
Dana Penyesuaian	5.4.A.2.b	44.828.869.000,00	34.250.000.000,00	10.578.869.000,00	30,89
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		**44.828.869.000,00**	**34.250.000.000,00**	**10.578.869.000,00**	**30,89**
Transfer Pemerintah Provinsi					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.A.2	210.472.276.602,00	222.423.842.811,00	(11.951.566.209,00)	(5,37)
Pendapatan Bagi Hasil lainnya	5.4.A.2	-	-	-	~
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi		**210.472.276.602,00**	**222.423.842.811,00**	**(11.951.566.209,00)**	**(5,37)**
Jumlah Pendapatan Transfer		**2.220.833.367.679,00**	**2.151.039.532.484,00**	**69.793.835.195,00**	**3,24**
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	5.4.A.3	207.012.438.750,00	198.770.319.706,00	8.242.119.044,00	4,15
Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	~
Pendapatan Lainnya	5.4.A.3	18.908.016.315,00	12.205.641.000,00	6.702.375.315,00	54,91
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		**225.920.455.065,00**	**210.975.960.706,00**	**14.944.494.359,00**	7,08
JUMLAH PENDAPATAN		**3.155.067.201.939,07**	**3.037.514.954.126,96**	**117.552.247.812,11**	**3,87**

	Catatan	2019 (Audited)	2018 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		Rp	Rp	Rp	
BEBAN					
Beban Pegawai	5.4.B.1	1.316.807.018.576,00	1.280.004.639.409,00	36.802.379.167,00	2,88
Beban Barang	5.4.B.2	941.301.287.064,28	831.043.384.316,51	110.257.902.747,77	13,27
Beban Bunga		-	-	-	~
Beban Subsidi		-	-	-	~
Beban Hibah	5.4.B.3	64.425.791.606,00	69.540.544.298,00	(5.114.752.692,00)	(7,36)
Beban Bantuan Sosial	5.4.B.4	13.914.127.800,00	14.968.241.200,00	(1.054.113.400,00)	(7,04)
Beban Penyusutan	5.4.B.5	467.516.047.676,95	284.052.056.372,00	183.463.991.304,95	64,59
Beban Penyisihan	5.4.B.6	2.676.763.045,18	16.875.237.326,16	(14.198.474.280,98)	(84,14)
Beban Transfer	5.4.B.7	296.107.101.171,00	280.746.719.931,00	15.360.381.240,00	5,47
Beban Lain-lain	5.4.B.8	325.319.971,95	1.991.679.445,35	(1.666.359.473,40)	(83,67)
JUMLAH BEBAN		**3.103.073.456.911,36**	**2.779.222.502.298,02**	**323.850.954.613,34**	**11,65**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI		**51.993.745.027,71**	**258.292.451.828,94**	**(206.298.706.801,23)**	**(79,87)**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	~
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	~
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	~
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	~
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.C	(6.000.559.192,00)	(1.497.936.489,00)	(4.502.622.703,00)	300,59
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		**(6.000.559.192,00)**	**(1.497.936.489,00)**	**(4.502.622.703,00)**	**300,59**
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		**45.993.185.835,71**	**256.794.515.339,94**	**(210.801.329.504,23)**	**(82,09)**
POS LUAR BIASA					
Pendapatan Luar Biasa		-	715.817.382.090,00	(715.817.382.090,00)	(100,00)
Beban Luar Biasa	5.4.C.D	533.870.074,00	29.487.799.208,00	(28.953.929.134,00)	(98,19)
Jumlah Pos Luar Biasa		**(533.870.074,00)**	**686.329.582.882,00**	**(686.863.452.956,00)**	**(100,08)**
SURPLUS/(DEFISIT)-LO		**45.459.315.761,71**	**943.124.098.221,94**	**(897.664.782.460,23)**	**(95,18)**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purwokerto, 2020

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

	Catatan	2019 (Audited)	2018 (Audited)
		Rp	Rp
EKUITAS AWAL	5.6.A	6.372.280.602.025,72	5.417.113.955.564,78
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.B	45.459.315.761,71	943.124.098.221,94
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:			
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Lain-lain	5.6.C	(239.110.010.863,00)	12.042.548.239,00
EKUITAS AKHIR		**6.178.629.906.924,43**	**6.372.280.602.025,72**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purwokerto, 2020

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau berwewenang meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Kinerja Intansi Pemerintah merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang diterapkan. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

No	Nilai KiInerja	Predikat Kinerja
1.	≥ 95 %	Sangat berhasil
2.	80 s/d <95%	Berhasil
3.	50 s/d <80%	Cukup berhasil
4.	0 s/d< 50%	Kurang berhasil

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hasil pengukuran atas indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

TUJUAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA
TUJUAN 1						
Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66	66,68	101,03	Sangat berhasil
TUJUAN 2						
Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat						
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,95	71,96	100,01	Sangat berhasil
TUJUAN 3						
Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan						
3.	Persentase penduduk miskin	%	12,51	12.53	99,84*	Sangat berhasil
4.	Indeks Gini	Indeks	0,308	0,31*	99,35*	Sangat berhasil
5.	Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,3416	0,5*	53,63*	Cukup berhasil
6.	PDRB per kapita	Juta Rp.	31.115	31,865	102,41	Sangat Berhasil

	TUJUAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALI-SASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA
TUJUAN 4						
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian						
7.	Persentase pertumbuhan PDRB	%	6,40	6,32*	98,75*	Sangat berhasil
8.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	100,83	107,76	106,87	Sangat berhasil
TUJUAN 5						
Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis						
9.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,00	73,99*	99,99*	Sangat berhasil
TUJUAN 6						
Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja						
10.	Persentase pertumbuhan nilai investasi daerah	%	2	2	100	Sangat berhasil
11.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	63,79	64,62	101,30	Sangat berhasil
TUJUAN 7						
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat						
12.	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Indeks	79,86	65,48	81,99	Berhasil
TUJUAN 8						
Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif						
13.	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata (wisaman dan wisnus)	%	25,36	51,53	203,19	Sangat berhasil
14.	Persentase pertumbuhan industri kreatif	%	0	0	0	-
15.	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,36	4,21	103,44	Sangat berhasil
TUJUAN 9						
Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat						
16.	Persentase penurunan konflik sosial	%	5	4,5	90	Berhasil
17.	Angka kriminalitas	Kasus	731	831	86,32	Berhasil
18.	Indeks Demokrasi	Indeks	77,83	74,46	95,67	Sangat berhasil
19.	Persentase pelestarian budaya Banyumas	%	32,87	32,87	100	Sangat berhasil
RATA-RATA CAPAIAN					101,32	Sangat berhasil

Dilihat dari tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2019 adalah sebesar 101,32% dengan predikat kinerja Sangat Berhasil. Berdasarkan data capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tersebut di atas, maka capaian kinerja dapat dikelompokkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2
Predikat Kinerja Tahun 2019

No.	Kriteria Penilaian Predikat Kinerja	IK	%
1	Sangat berhasil	14	77,78
2	Berhasil	3	16,67
3	Cukup berhasil	1	5,55
4	Kurang berhasil	-	-
	JUMLAH IKU	18	100

Keterangan :

Pada predikat kinerja tahun 2019 jumlah IKU hanya 18 indikator karena 1 indikator pada tahun 2019 tidak terdapat target dan realisasi sehingga tidak ikut diperhitungkan dalam capaian kinerja.

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

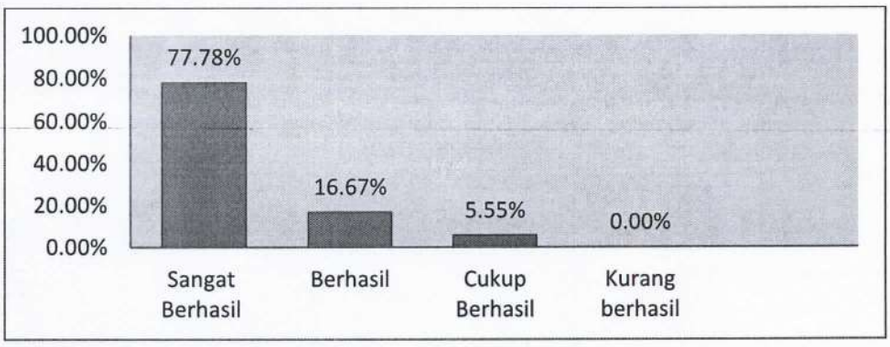
Dalam laporan ini Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja utama dan penilaian tingkat pencapaian target tujuan dari masing-masing indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 maupun RKPD Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2019.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Banyumas telah dapat melaksanakan tugas terutama dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Adapun capaian perjanjian kinerja tahun 2019 dengan rata-rata capaian sebesar 101,32 % dengan predikat Sangat Berhasil.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 sebagaimana grafik berikut ini :

Grafik 1.

Capaian Indikator Kinerja
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2019



Sumber : Bagian Organisasi (diolah)

Adapun pencapaian kinerja pada masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1: Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dalam rangka mempercepat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Daerah, maka perlu dilaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, selama telah mendapat perhatian besar dari Pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 disebutkan bahwa "Pembangunan aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Pusat maupun di Daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

Reformasi birokrasi dilaksanakan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Sesuai Peraturan Bupati Banyumas nomor 70 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 sasaran yang akan dicapai meliputi meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan serta meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik. Sasaran tersebut dijabarkan melalui delapan area perubahan yaitu : (1) manajemen perubahan; (2) penataan peraturan perundang-undangan; (3) penataan dan penguatan organisasi; (4) penataan tata laksana; (5) penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur; (6) penguatan pengawasan; (7) penguatan akuntabilitas kinerja dan (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam Misi pertama yaitu " Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integrotas birokrasi yang professional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat". Melalui misi pertama ini diharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif. Adanya keterbukaan informasi publik, transparani dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang didukung aparatur sipil Negara yang kompeten dan professional, akan tercipta kondisi peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan professional, lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan melalui ionvasi berbasis teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi.

Pada tahun 2019 telah dilakukan evaluasi atas implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas oleh tim dari Kemenpan dan RB, namun sampai dengan selesai disusunnya laporan kinerja ini belum ada hasil evaluasi yang diperoleh. Sehingga capaian indeks reformasi yang disajikan pada laporan ini merupakan hasil evaluasi tahun 2018. Secara lebih rinci realisasi capaian indeks reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Capaian Kinerja Tujuan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indikator Kinerja	Sat	Kondisi Awal		Capaian Tahun 2019			Target 2023 akhir RPJMD	Capaian %
		Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	%		
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	63,79	66,68	66	66,68	101,03	75	88,91
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan				66	66,68	101,03	75	88,91

Rata-rata capaian kinerja tujuan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 adalah sebesar 101,03%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 (akhir RPJMD) maka realisasi tahun 2019 ini baru mencapai 88,91%.

Terdapat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas. Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2017 sebesar 63,79 menjadi 66,68 di tahun 2018 termasuk kategori "B". Walaupun terdapat peningkatan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di tingkat Pemerintah Kabupaten Banyumas, masih perlu dilakukan perbaikan yang setara pada tingkat Perangkat Daerah. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 4
Rincian Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi
pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 - 2018

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			Tahun 2017	Tahun 2018
I	Komponen Pengungkit			
1.	Manajemen Perubahan	5,00	3,08	2,77
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,71	2,40
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,82	3,01
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	2,96	2,85
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	8,78	11,39
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,87	4,12
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	6,49	5,73
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,66	3,92
	Total Komponen Pengungkit (A)			
II.	Komponen Hasil			
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	7,51	8,43
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	5,12	4,74
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,92	5,92
4.	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5.	Suvei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	7,88	8,40
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	29,42	30,49
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	63,79	66,68

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu :

1. Cakupan implementasi reformasi birokrasi agar sampai dan terinternalisasi kepada seluruh perangkat daerah. Program-program yang menjadi percepatan reformasi birokrasi (*quick win)* hendaknya dikawal dan dapat diperoleh hasilnya sehingga dapat memantapkan dan mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Banyumas.
2. Menginternalisasi dan mensosialisasikan reformasi birokrasi ke perangkat daerah melalui media komunikasi dan pertemuan secara berkala sehingga anggota individu di unit organisasi mengetahui perkembangan reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan evaluasi kelembagaan yang berfokus kepada kinerja yang akan dihasilkan.
5. Menyusun peta proses bisnis dari level instansi hingga perangkat daerah sehingga dapat menggambarkan hubungan dan sinergitas antar perangkat daerah.

6. Meningkatkan pengelolaan sistem manajemen SDM antara lain melakukan *assessment* pegawai secara menyeluruh, dan menyempurnakan ukuran kinerja individu yang mengacu kepada kinerja organisasi.
7. Mengembangkan aplikasi manajemen kinerja secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja sehingga dapat menciptakan *performance based budgeting.*
8. Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi di setiap sub komponen pada area penguatan pengawasan, mulai dari penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System* (WBS) dan penanganan benturan kepentingan, sehingga dapat diukur tingkat efektivitas atas implementasi sub komponen pada area penguatan pengawasan tersebut. Selain itu pembangunan Zona Integritas perlu dioptimalkan agar banyak unit kerja di Pemerintah Kabupaten Banyumas yang berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
9. Melakukan reviu/perbaikan SOP pelayanan dan evaluasi terhadap penanganan keluhan/masukan terkait pelayanan, khususnya di tingkat perangkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah berkomitmen untuk melaksanakan impelentasi reformasi birokrasi sampai dengan perangkat daerah.

Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan 1 (satu) indikator utama, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 5
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja	Sat	Kondisi Awal		Capaian Tahun 2019			Target 2023 akhir RPJMD	Capaian %
		Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Reali-sasi	%		
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,75	70,49	71,95	71,96	100,01	74,35	96,78
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan		71,95		71,30*		100,01	74,35	96,78

Data BPS 2019

Rata-rata capaian kinerja tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia untuk tahun 2019 yaitu 71,96 , dari target sebesar 71,95 atau mencapai 100,01%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 (akhir RPJMD) maka realisasi tahun 2019 ini mencapai 96,78%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Mengutip isi *Human Development Report (HDR)* pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur pajang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Komponen Indeks Pembangunan Manusia :

a. Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir (*Expectation of life/Eo)*, merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi baru lahir pada tahun tersebut.
b. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) *Expected Years of Schooling* didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.
c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefiniskan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal atau rata-rata waktu yang ditempu penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal.
d. Pengeluaran perkapita yang disesuaikan.
   Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan oleh nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing power Parity-PPP)*. Rata-rata pengeluarna per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komiditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

Adapun komoditi kebutuhan pokok sebagai dasar penghitungan daya beli, meliputi :

Tabel. 6
Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli

Komoditi	Unit
1. Beras lokal	Kg
2. Tepung terigu	Kg
3. Singkong	Kg
4. Tuna/Cakalang	Kg
5. Teri	Ons
6. Daging Sapi	Kg
7. Ayam	Kg
8. Telur	Kg
9. Susu Kental Manis	397 gram
10. Bayam	Kg
11. Kacang Panjang	Kg
12. Tempe	Kg
13. Kacang Tanah	Kg
14. Jeruk	Kg

Komoditi	Unit
15. Pepaya	Kg
16. Kelapa	Butir
17. Gula	Ons
18. Kopi	Ons
19. Garam	Ons
20. Merica	Ons
21. Mie instan	80 Gram
22. Rokok kretek	10 batang
23. Listrik	Kwh
24. Air Minum	m^3
25. Bensin	Liter
26. Minyak Tanah	Liter
27. Sewa rumah	Unit

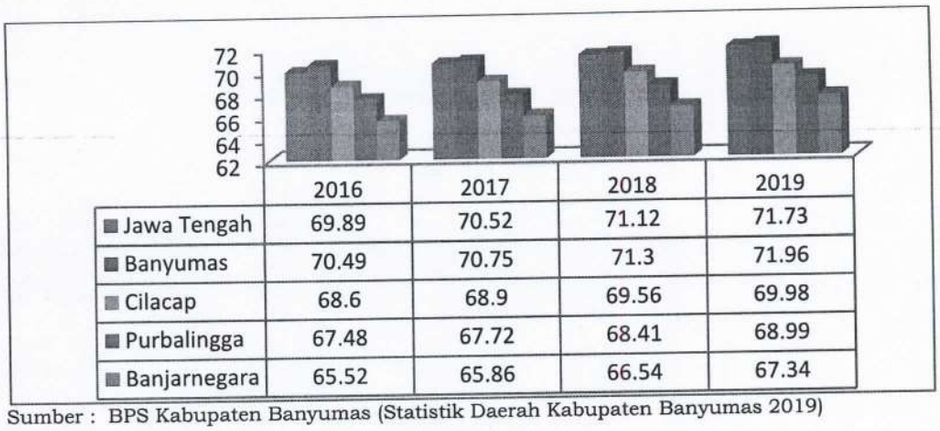
Adapun capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2019

Komponen IPM	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Angka harapan hidup saat lahir	72,92	73,12	73,23	73,33	73,45	73,55
Harapan Lama Sekolah	12,56	12,57	12,58	12,63	12,64	12,82
Rata-rata Lama Sekolah	7,31	7,31	7,39	7,40	7,41	7,42
Disparitas Daya Beli	9.580	10.104	10.554	10.713	11.240	11,703
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,25	69,89	70,49	70,75	71,30	71,96

Pembangunan daerah di Kabupaten Banyumas diorientasikan untuk pembangunan manusia, yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar semua masyarakat Kabupaten Banyumas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dan memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui pelayanan dan fasilitasi akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan. Hasil upaya tersebut dapat tergambarkan didalam perolehan Indeks Pembangunan Manusia. IPM Kabupaten Banyumas sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 selalu yang tertinggi di BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen) dan selalu lebih tinggi dari IPM Provinsi Jawa Tengah.

Grafik 2
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tetangga Tahun 2016 s.d 2019



	2016	2017	2018	2019
Jawa Tengah	69.89	70.52	71.12	71.73
Banyumas	70.49	70.75	71.3	71.96
Cilacap	68.6	68.9	69.56	69.98
Purbalingga	67.48	67.72	68.41	68.99
Banjarnegara	65.52	65.86	66.54	67.34

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas (Statistik Daerah Kabupaten Banyumas 2019)

Tujuan 3: Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan pembangunan yang beradilan, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) indikator utama, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 8
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2019			Target 2023 Akhir RPJMD	Capaian %
		Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Reali-sasi	%		
Persentase Penduduk Miskin	%	17,05	17,05	12,51	12,53	99,84	8,56	53,62
Indeks Gini	Indeks	0,310	0,31	0,308	0,31*	99,35	0,304	98,03
Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,3456	0,01	0,3416	0,5*	53,63	0,3256	46,44
PDRB Per Kapita	Juta Rp.	27.380	29.230	31.115	31,865	102,41	38.655	82,43
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan						88,81		70,13

Data BPS Tahun 2019

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial pada tahun 2019 adalah sebesar 88,81%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 (akhir RPJMD) maka realisasi tahun 2019 baru mencapai 70,13%. Untuk capaian indikator indeks gini dan Indeks Ketimpangan Williamson, masih menggunakan capaian tahun 2018, karena sampai dengan laporan ini disusun, capaian tersebut belum dirilis oleh BPS. Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Persentase Penduduk Miskin

Selama periode tahun 2015 – 2019, penduduk miskin di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang menggembirakan meskipun para pemangku kebijakan terlihat belum puas dengan capaian tersebut. Selama periode 2015 sampai 2017, angka kemiskinan turun tidak terlalu banyak di kisaran 17%. Tetapi untuk tahun 2018 kemiskinan turun menjadi 13,5 % dan kembali turun pada tahun 2019 menjadi 12,53 %. Turunnya angka kemiskinan menunjukkan bahwa berbagai program Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah cukup bagus dalam memberantas kemiskinan. Adapun jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagai berikut :

Tabel 9
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Banyumas dari Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2015	286,00	17,52
2016	283,90	17,23
2017	283,20	17,05
2018	226,2	13,5
2019	211,6	12,53

Garis kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perbupan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 garis kemiskinan di Kabupaten Banyumas sebesar Rp.320.585,00 kemudian meningkat sampai di tahun 2019 menjadi 385.140,00. Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun.

Indeks kedalaman kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Banyumas selama periode 2015 hingga 2019 cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari tingkat kedalaman kemiskinan yang mengalai penurunan. Indeks kedalamam kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 2,91% dan terus mengalami penurunan hingga di tahun 2019 sebesar 2,52%. Sementara untuk indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai

penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Tidak berbeda jauh dengan Indeks kedalamam kemiskinan, maka indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan, kecuali untuk tahun 2017 indeks keparahan kemiskinan tidak berubah dari tahun sebelumnya. Penurunan di tahun 2018 sebesar 0,15 poin, kemudian di tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebesar 0,03 poin sehingga indeks keparahan kemiskinan di tahun 2019 sebesar 0,67%. Adapun Garis Kemiskinan, Indeks Kedalamam Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2015 sampai dengan 2019.

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/ bulan)	320.585	344.514	357.748	366.442	385.140
Indeks Kedalamam Kemiskinan	2,91	3,08	3,19	2,6	2,52
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,71	0,85	0,85	0,7	0,67

Angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas selalu mengalami penurunan. Apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten tetangga adalah sebagai berikut :

Grafik 3
Perbandingan Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tetangga Tahun 2015 sampai tahun 2019



Sumber : BPS, Tahun 2019

Meskipun beberapa indikator kemiskinan menunjukkan hasil yang menggembirakan, namun masih perlu upaya penanggulangan kemiskinan

yang lebih diprioritaskan di daerah perdesaan untuk dapat membebaskan penduduk dengan kondisi miskin "terlalu dalam dan terlalu parah". Selain indikator garis kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga dan kondisi perumahan. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.

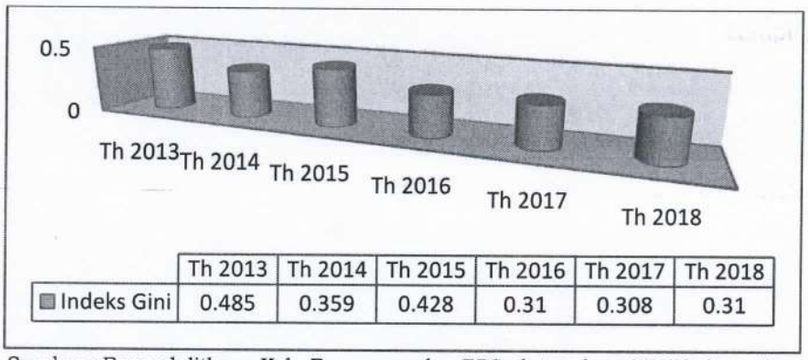
2. Capaian Kinerja Indikator Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai indeks gini mendekati nilai 0 (nol), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai indeks gininya mendekati 1 (satu).

Secara umum Rasio Gini Kabupaten Banyumas dalam dua tahun terakhir, yaitu tahun 2017 dan 2018 di Kabupaten Banyumas ketimpangan pendapatan yang terjadi termasuk dalam kategori rendah atau pemerataannya cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Gini Kabupaten Banyumas tahun 2018 yang mencapai sekitar 0,3132, sedikit menurun dibanding dengan tahun 2017. Rasio gini merupakan ukuran ketimpangan pengeluaran penduduk dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlu waktu yang lebih lama serta usaha yang besar untuk menurunkan angka rasio gini.

Perkembangan Indeks Gini di Banyumas dalam kurun waktu tahun 2015 s.d 2018 menunjukkan angka yang cenderung membaik. Realisasi Indeks Gini Kabupaten Banyumas tahun 2018 adalah sebesar 0,31 dari target sebesar 0,308 atau mencapai target 100,65%. Realisasi ini masih menggunakan realisasi tahun 2018, karena sampai dengan penyusunan LKjIP selesai, pihak BPS belum merilis indeks gini untuk tahun 2019. Indeks Gini Tahun 2013 sampai dengan 2018 cenderung fluktuasi, dimana tahun 2016 mengalami penurunan angka absolut dari tahun sebelumnya (Tahun 2015). Meskipun masih tergolong ke dalam ketimpangan distribusi sedang, namun hal tersebut mencerminkan distribusi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 lebih merata dibanding tahun 2017. Hal tersebut diindikasikan terjadi karena kondisi pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil ke Kabupaten Banyumas. Nilai Indeks Gini di Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Grafik 4
Indeks Gini Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018



	Th 2013	Th 2014	Th 2015	Th 2016	Th 2017	Th 2018
Indeks Gini	0.485	0.359	0.428	0.31	0.308	0.31

Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas dan BPS, data tahun 2019 belum rilis

Data di atas menunjukkan bahwa distribusi pendapatan perkapita per keluarga di Kabupaten Banyumas dalam keadaan cukup merata (ketimpangan sedang). Namun yang harus diperhatikan adalah secara runut waktu, dari tahun ke tahun Indeks Gini Kabupaten Banyumas masih fluaktif, namun secara umum menunjukkan tren menurun.

Penurunan indeks optimis tercapai karena penurunan angka kemiskinan pada tahun 2019, yaitu dari 17% menjadi 12,53%. Penurunan kemiskinan ini mengindikasikan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat atau semakin berkurangnya masyarakat miskin, sehingga kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat miskin dan kaya juga semakin menipis. kadang menunjukkan gejala naik.

Ada tiga kemungkinan penyebab meningkatnya Indeks Gini:

a. Meningkatnya jumlah penduduk.
b. Laju inflasi
c. Ketidakmerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Banyumas.

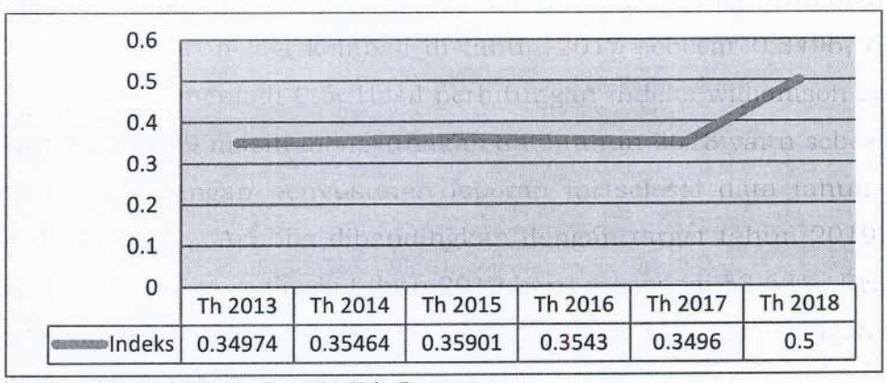
Untuk mengurangi pertumbuhan jumlah penduduk yang akan berpengaruh pada nilai indeks gini, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan salah satu upaya dengan membentuk Kampung KB. Di Kabupaten Banyumas telah terbentuk Kampung KB di 238 desa yang tersebar di 27 kecamatan. Kampung KB bertujuan untuk menggerakkan program Keluarga Berencana (KB). Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat Rukun Warga (RW), dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Berdasarkan hasil kajian penyusunan Indeks Gini Kabupaten Banyumas pada Tahun 2018, rekomendasi program dan kegiatan yang dilakukan antara lain pengurangan tingkat kemiskinan, optimalisasi pemasaran penanaman modal, perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

3. Capaian Kinerja Indikator Indeks Ketimpangan Willamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Ketimpangan pembangunan antar daerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografis yang terdapat pada masing-masing daerah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat daerah maju dan daerah terbelakang. Terjadinya ketimpangan antar daerah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar daerah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pengukuran tingkat ketimpangaan antar wilayah di Kabupaten Banyumas menggunakan Indeks Williamson. Indeks williamson memberikan gambaran tentang kondisi dan keberhasilan pembangunan ditinjau dari aspek penyebaran hasil pembangunan. Angka indeks Williamson yang semakin kecil menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin kecil. Hasil perhitungan indeks Williamson Kabupaten Banyumas tahun 2013 mencapai 0,34974, tahun 2014 meningkat mencapai 0,35464 dan tahun 2015 meningkat sampai dengan 0,35901 dan tahun 2016 menurun mencapai 0,3543 dan menurun lagi kembali di tahun 2017 sebesar 0,3496, dan di tahun 2018 naik menjadi 0,5. Hasil perhitungan indeks williamson sampai dengan tahun 2019 masih menggunakan data tahun 2018 yaitu sebesar 0,5 karena sampai dengan penyusunan laporan ini selesai data tahun 2019 belum dirilis BPS . Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu sebesar 0,3416 maka realisasi tahun 2019 baru mencapai 53,63%. Realisasi indeks ketimpangan antar wilayah dari tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut:

Grafik 5
Indeks Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2018



	Th 2013	Th 2014	Th 2015	Th 2016	Th 2017	Th 2018
Indeks	0.34974	0.35464	0.35901	0.3543	0.3496	0.5

Sumber : Bappedalitbang dan BPS Kab. Banyumas

Faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah antara lain

1. Migrasi penduduk produktif yang memiliki skill / terdidik ke daerah-daerah yang telah berkembang, karena disana mereka dapat memperoleh upah/gaji yang lebih besar dan kesempatan merubah masa depan yang lebih baik.
2. Investasi cenderung berlaku di daerah yang telah berkembang karena faktor market, lokasi, dan kesempatan kerja, dimana keuntungan relative lebih besar, demikian pula resiko kerugian relative lebih kecil pada umumnya.
3. Kebijakan pemerintah cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya sosial dan ekonomi capital di daerah yang telah berkembang karena kebutuhan yang lebih besar dan sebagai pusat pemerintahan.

Kebijakan dan upaya untuk menanggulangi ketimpangan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh faktor yang menentukan terjadinya ketimpangan tersebut. Ketimpangan yang dimaksud disini adalah merupakan upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan ketimpangan pembangunan antar daerah dalam suatu wilayah. Upaya-upaya tersebut meliputi :

1) Penyebaran pembangunan prasarana perhubungan.
2) Pengembangan pusat pertumbuhan

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Pembangunan Kabupaten Banyumas beberapa tahun belakangan terbilang sangat pesat. Munculnya beberapa hotel dilatarbelakangi Banyumas sebagai pusat konferensi baik dari Kabupaten/Kota eks Karesidenan Banyumas level provinsi bahkan nasional mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Banyumas. Kinerja perekonomian Kabupaten Banyumas selama tahun 2018 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 6,45%, meningkat dibanding laju pertumbuhan tahun 2017 sebesar 6,34%. Nilai tambah yang tercipta tahun 2018 di wilayah Banyumas sebesar 49,89 trilyun rupiah, sementara menuruh harga konstan 2010 angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tercatat sebesar 37,41 trilyun rupiah. Laju pertumbuhan tertinggi ada pada kategori informasi jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,51%.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan

mempengaruhi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kepala atau per satu orang penduduk selama satu tahun.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2015 hingga 2018 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tercatat sebesar 23,72 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 mencapai 29,72 juta rupiah. Kenaikan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Banyumas yang sudah tidak terpengaruh oleh inflasi dapat dilihat pada Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan. Sejak tahun 2015 hingga 2018 juga senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan tercatat sebesar 19,05 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 mencapai 22,28 juta rupiah

Tabel 11
Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2018

Tahun	PDRB Perkapita Adhb (Juta)	PDRB Perkapita Adhk (Juta)
2015	23,72	19,05
2016	25,46	20,03
2017	27,38	21,11
2018	29,72	22,28

Capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita atas dasar harga berlaku di eks Karesidenan Banyumas tahun 2017 sampai 2018 dapat terlihat sebagai berikut :

Tabel. 12
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku (juta Rp/tahun) Tahun 2017-2018

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Cilacap	60,94	64,51
2.	Banyumas	27,38	29,72
3.	Purbalingga	23,39	25,07
4.	Banjarnegara	20,34	21,87
5.	Jawa Tengah	34,22	36,78

Pembangunan secara menyeluruh dapat dikatakan berhasil apabila dinilai dengan suatu indikator dan memiliki keterbandingan dengan wilayah lainnya. Penilaian dapat didasarkan pada indikator sosial, indikator ekonomi dan indikator social ekonomi. Indikator social diantaranya adalah data kependudukan, data ketenagakerjaan dan data kemiskinan. Jawa Tengah merupakan wilayah dengan jumlah penduduk ketiga terbesar di Indonesia, dan 4,87% diantaranya mendiami wilayah Kabupaten Banyumas. Angka rasio ketergantungan Banyumas tahun 2018 (49,77) masuk dalam kategori rendah karena dibawah 50%, tetapi masih di atas rasio ketergantungan Provinsi Jawa Tengah (47,63). Semakin rendah angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin rendaghnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Ekonomi Banyumas di tahun 2018 memperoleh prestasi yang memuaskan, yaitu pertumbuhan ekonomi nomor dua dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah. Selain dari pertumbuhan ekonomi, keberhasilan pembangunan di suatu wilayah secara umum juga dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator sosial ekonomi yang mencerminkan pencapaian pembangunan dalam 3 dimensi yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Tujuan 4: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Non Pertanian

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan dengan kondisi perekonomian didalam suatu negara secara berkesinambungan yang menuju pada keadaan yang lebih baik selama dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat dimaksud juga dengan proses kenaikan kapasitas produksi pada suatu perekonomian yang dibentuk kedalam kenaikan pendapatan nasional. Terbentuknya pertumbuhan ekonomi adalah indikasi keberhasilan pada pembangunan ekonomi didalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Rata-rata capaian kinerja tujuan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 13
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Non Pertanian

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Tahun 2019			Target 2023 akhir RPJMD	Capaian %
		Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Reali-sasi	%		
Persentase Pertumbuhan PDRB	%	6,34	6,45	6,40	6,32*	98,75	6,65	95,04
Nilai Tukar Petani	Indeks	100,08	100,33	100,83	107,76 *	106,87	102,86	104,76
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan						102,81		99,9

Rata-rata capaian kinerja tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian pada tahun 2019 adalah sebesar 102,81%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 (akhir RPJMD) maka realisasi tahun 2019 baru mencapai 99,9%. Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial adalah sebagai berikut :

1. Persentase Pertumbuhan PDRB

   Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi dimana meningkatnya pendapatan karena terjadi peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan pendapatan tersebut tidak dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dan dapat dilihat dari output yang meningkat, perkembangan teknologi dan berbagai inovasi di bidang sosial.

   Kinerja perekonomian Kabupaten Banyumas selama tahun 2018 menunjukan pertumbuhan positif sebesar 6,45%, meningkat dibanding laju pertumbuhan tahun 2017 sebesar 6,34%. Nilai tambah yang tercipta tahun 2018 di wilayah Kabupaten Banyumas sebesar 49,89 trilyun rupiah, sementara menurut harga konstan 2010 angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tercatat sebesar 37,41 trilyun rupiah. Laju pertumbuhan tertinggi ada pada kategori informasi Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,51%. Adapun rincian persentase kontribusi lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyumas, tahun 2017 s.d 2018 sebagai berikut :

Tabel 14
Persentase Kontribusi Lapangan Usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas

No	Kategori	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,15	12,73
2.	Pertambangan dan Penggalian	5,56	5,72
3.	Industri Pengolahan	24,32	24,34
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07
6.	Konstruksi	12,82	13,25
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,19	15,28
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,56	3,49
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,38	3,30
10.	Informasi dan Komunikasi	4,67	4,66
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,31	3,22
12.	Real Estate	2,23	2,20
13.	Jasa Perusahaan	0,31	0,31
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,19	3,06
15.	Jasa Pendidikan	5,40	5,51
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,98	1,00
17.	Jasa lainnya	1,78	1,75

Sumber : Data BPS 2018, Tahun 2019 belum dirilis

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten di wilayah Barlingmascakeb, maka Kabupaten Banyumas di tiga tahun terakhir menduduki pertumbuhan yang paling tinggi. Adapun rincian laju pertumbuhan PDRB selama lima tahun terakhir dari masing-masing Kabupaten di wilayah Barlingmascakeb adalah sebagai berikut :

Tabel 15
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten di Wilayah Barlingmascakeb Tahun 2014 – 2018

Kabupaten	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Cilacap	2,92	5,96	5,09	2,59	3,05
Banyumas	5,67	6,12	6,05	6,34	6,45
Purbalingga	4,85	5,47	4,85	5,37	5,42
Banjarnegara	5,31	5,47	5,44	5,65	5,67
Kebumen	5,79	6,18	5,01	5,13	5,52

Sumber : Data BPS Thn 2018, Tahun 2019 belum dirilis

2. Nilai Tukar Petani

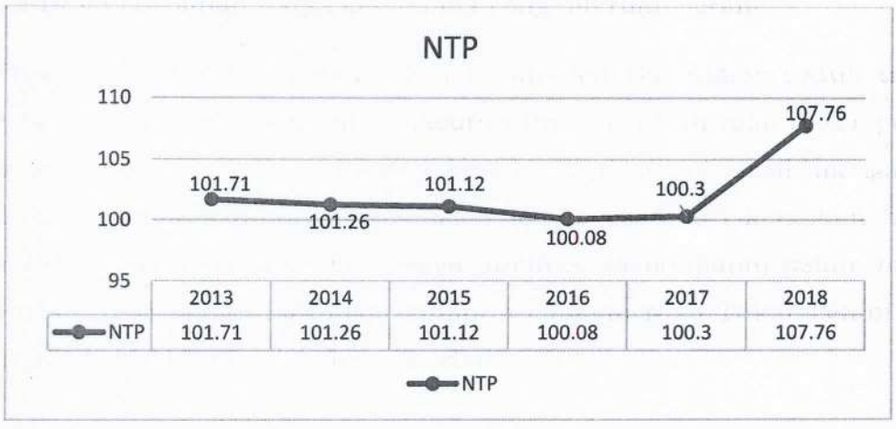
Nilai Tukar Petani (NTP) adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil

produksi petani. Indeks harga yang dibayar petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk proses produksi pertanian.
Secara umum ada tiga macam pengertian NTP yaitu:

1. NTP > 100, berarti secara umum rata-rata perubahan harga komoditas yang diterima petani mengalami pergerakan yang lebih cepat daripada rata-rata perubahan harga barang dan jasa yang dibayar petani baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk biaya produksi pertanian.
2. NTP = 100, berarti secara umum rata-rata perubahan harga komoditas yang diterima petani sama dengan rata-rata perubahan harga barang dan jasa yang dibayar petani baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk biaya produksi pertanian.
3. NTP < 100, berarti secara umum rata-rata perubahan harga barang dan jasa yang dibayar petani baik untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi pertanian mengalami pergerakan yang lebih cepat daripada rata-rata perubahan harga komoditas yang diterima petani.

Capaian Nilai Tukar Petani pada Kabupaten Banyumas untuk tahun 2019 belum rilis, sehingga dalam laporan ini tercantum nilai tukar petani tahun 2018 yaitu sebesar 107,76. Hal ini berbarti petani masih mengalami surplus, atau harga produksinya masih lebih besar dari kenaikan harga barang dan jasa konsumsi serta biaya produksi (pendapatan petani masih lebih besar dari pengeluarannya). Adapun capaian Nilai Tukar Petani dari tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Grafik 6
Nilai Tukar Petani Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
NTP	101.71	101.26	101.12	100.08	100.3	107.76

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait dengan Nilai Tukar Petani adalah rendahnya Nilai Tukar Petani. Dalam mengatasi hal ini, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

1. Meningkatkan penyediaan sarana produksi, pengendalian OPT, dan penerapan teknologi budidaya pertanian, komoditas unggulan pertanian.
2. Meningkatkan penyediaan sarana produksi budidaya, optimalisasi pembenihan ikan, serta meningkatkan keterampilan pembudidaya ikan dalam penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) komoditas unggulan perikanan.
3. Mengembangkan usaha agribisnis hasil pertanian dan hasil peternakan agar memiliki nilai tambah ekonomi.
4. Meningkatkan pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani, dan pembinaan terhadap petani penderes agar menerapkan standar keselamatan.
5. Meningkatkan jumlah pelaku ekspor gula kelapa.
6. Meningkatkan kualitas dan jumlah produk gula kelapa sesuai standar ekspor.
7. Meningkatkan keselamatan petani penderes dengan safety belt.

Tujuan 5: Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Sektor Agribisnis

Hasil kegiatan di sektor pertanian adalah penghasil pangan dan sekaligus sebagai penyedia bahan baku di sektor industri. Hal ini dilematis dengan kondisi lahan yang sekarang sudah semakin tergeser oleh pembangunan perumahan. Oleh karena itu peningkatan produktivitas hasil pertanian dengan intensifikasi merupakan salah satu jalan memenuhi kebutuhan pangan. Penggunaan lahan di Banyumas yaitu 70,69% dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sedangkan sisanya sebanyak 29,31% merupakan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan pertanian dibagi menjadi dua yaitu lahan sawah sebanyak 34,37% lahan bukan sawah sebesar 65,63%. Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis maka ditetapkan satu indikator yaitu indeks ketahanan pangan. Adapun capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 16
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ketahanan Pangan
Melalui Sektor Agribisnis

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal		Tahun 2019			Target 2023 akhir RPJMD	Capaian %
		Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Reali-sasi	%		
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	NA	73,99	74	73.99*	99,99	74,04	99,93
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan						99,99		99,93

Rata-rata capaian kinerja tujuan meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis pada tahun 2019 adalah sebesar 99,99%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 (akhir RPJMD) maka realisasi tahun

2019 telah mencapai 99,93%. Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis adalah sebagai berikut :

Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan data tingkat Kabupaten/Kota. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakam turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP) didasarkan pada (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global, (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; (iv) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu (bulanan/tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota. Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah sebagai berikut :

a. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih.
b. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
c. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran dari ketahanan pangan rumah tangga.
d. Persentase rumah tangga tanpa askes listrik.
e. Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun.
f. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.
g. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk.
h. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*).
i. Angka harapan hidup pada saat lahir.

Capaian indikator indeks ketahanan pangan Kabupaten Banyumas masih menggunakan capaian tahun 2018, karena sampai dengan selesainya penyusunan LKjIP, capaian tahun 2019 belum dirilis oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Adapun capaian indeks ketahanan pangan tahun 2018 untuk Kabupaten Banyumas adalah sebesar 73,99. Capaian ini berada pada kelompok IKP tingkat 5 dengan range >67,75 -75,68. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan kedalam kelompok berdasarkan cut *off point* IKP. *Cut Off Point* IKP merupakan penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikatir individu dengan c*ut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100). *Cut off point* indikator individu disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 17
Cut Off Point Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota
1	<= 41,52	<=28,84
2	>41,52 – 51,42	>28,84 – 41,44
3	>51,42 – 59,58	>41,44 – 51,29
4	>59,58 – 67,75	>51,29 – 61,13
5	>67,75 – 75,68	>61,13 - 70,64
6	>75,68	>70,64

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok diatasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

Masalah yang berkaitan dengan pangan di masa mendatang memiliki multidimensi baik yang bersifat luntas bidang, lintas komoditas, lintas daerah dan lintas penduduk. Berdasar kenyataan tersebut untuk mendukung ketahanan pangan, maka strategi pemantapan ketahanan pangan di masa depan perlu mengantisipasi berbagai kondisi tersebut. Pendekatan pembangunan ketahanan pangan dimasa depan perlu memprioritaskan ketahanan pangan tingkat rumah tangga/individu. Dalam hal ini peran serta pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci utama strategi peningkatan dan pemantapan ketahanan pangan rumah tangga dan wilayah. Sementara itu pemerintah daerah lebih berperan sebagai fasilitator dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan ketahanan pangan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan tersebut adalah melalui pemberdayaan kelembagaan lokal seperti lumbung desa dan peningkatan peran masyakarat dalam penyediaan pangan.

Strategi yang dikembangkan dalam upaya pembangunan ketahanan pangan antara lain melalui peningkatan kapasitas produksi pangan secara berkelanjutan serta pengembangan kebijakan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian pangan yang melindungi pelaku bisnis pangan .

Tujuan 6: Perwujudan Pembangunan Kawasan Industri dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja

Pembangunan kawasan industri merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik berinvestasi. Dengan dibangunnya kawasan industri diharapkan dapat memberikan dampak sebagai berikut :

1. Memberi kemudahan bagi dunia usaha untuk memperoleh kaveling industri siap bangun yang sudah dilengkapi berbagai infrastruktur yang memadai.

2. Memberi kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa aman bagi dunia usaha.
3. Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengendalikan masalah dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri.

Pembangunan kawasan industri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, bertujuan untuk :

1. Mengendalikan pemanfaatan ruang.
2. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.
3. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah.
4. Meningkatkan daya saing industri.
5. Meningkatkan daya saing investasi.
6. Memberikan jaminan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar sektor terkait.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Perwujudan Pembangunan Kawasan Industri dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja, maka ditetapkan dua indikator dengan capaian sebagaimana tersebut dibawah ini.

Tabel 18
Capaian Kinerja Tujuan Perwujudan Pembangunan Kawasan Industri dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2019			Target 2023 akhir RPJMD	Capaian %
		Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Reali-sasi	%		
Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	%	2	2	2	2	100	10	20
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	NA	64,81	63,79	64,62	101,30	64,15	100,73
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan						100,65		60,37

Rata-rata capaian kinerja tujuan perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja pada tahun 2019 adalah sebesar 100,65 Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 (akhir RPJMD) maka realisasi tahun 2019 telah mencapai 60,37%. Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial adalah sebagai berikut :

Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 278 menyatakan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sector swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah. Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Banyumas dari tahun 2014 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel. 19
Pertumbuhan Nilai Investasi di Kabupaten Banyumas
dari tahun 2014 – 2019

TW	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
I	114.747.450.239	169.576.774.759	112.814.028.632	44.202.980.000	178.562.500.000	174.475.470.048
II	86.319.410.748	104.309.494.164	120.953.286.770	149.889.870.000	333.733.758.234	209.076.041.748
III	81.639.338.500	65.642.520.955	102.266.881.857	19.537.830.000	98.104.720.014	174.269.585.197
IV	77.605.240.842	270.006.455.714	109.620.425.890	294.065.470.000	14.579.221.752	203.800.287.880
Total	360.321.440.329	609.535.145.592	445.654.623.149	507.696.150.000	625.000.200.000	761.621.384.575

Perkembangan investasi di Kabupaten Banyumas mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Dilihat dari pertumbuhan nilai investasi untuk tahun 2019 dari tahun 2018 adalah sebesar 2%. Adapun faktor yang mempengaruhi investasi di Kabupaten Banyumas terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, dengan rincian sebagai berikut :

1. Lingkungan internal yang menghambat investasi diantaranya adalah tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah dibidang investasi serta kebijakan antara sektor. Belum mantapnya pelaksanan program desentralitasi mengakibatkan kesimpangsiuran kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, semua itu mengakibatkan ketidakpastian kebijakan investasi nasional, sehingga menurunkan niat untuk berinvestasi.
2. Lingkungan eksternal yang menghambat investai diantaranya adalah ketidakpastian ekonomi global.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan jumlah investasi di Kabupaten Banyumas antara lain :

1. Mengembangkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dengan adanya Mal Pelayanan Publik.
2. Menyusun Peraturan Kepala Daerah terkait dengan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Banyumas.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka menjelaskan kondisi kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Banyumas, maka telah disusun Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2019 sebagai gambaran kondisi lingkungan hidup Kabupaten Banyumas terkini. Laporan ini juga memberikan gambaran tentang tekanan terhadap lingkungan sebagai akibat timbulnya perubahan media lingkungan (air, udara, tutupan lahan) akibat dari kegiatan manusia. Selain itu juga menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah administrasi Kabupaten Banyumas. Diharapkan informasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyusun/pengambil kebijakan dan perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Target IKLH pada tahun 2019 untuk Provinsi Jawa Tengah adalah 66,69. Berdasar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, pada tanggal 27 Februari 2019 di Jakarta, dimana seluruh pemerintah daerah dan seluruh pihak bersinergi untuk meningkatkan kualitas udara, air, dan tutupan lahan dengan target pencapaian pada tahun 2019 adalah 66,5 – 68,6.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas mempunyai ruang lingkup yaitu :

a. Konsep IKLH hanya mengambil 3 (tiga) indikator kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara ambien, dan tutupan lahan selama 1 (satu) tahun dengan sumber data tahun 2018.
b. Pembanding atau target untuk setiap indikator adalah standar atau ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti ketentuan baku mutu air sungai dan baku mutu udara ambien.
c. Analisis data yang digunakan untuk menghitung IKLH menggunakan kriteria, yaitu : (1) kualitas air yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD. Total Fosfat, Fecall Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas udara yang diukur berdasarkan parameter-parameter SO2 dan NO2 ; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang dikur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019 dihitung berdasarkan hasil pantauan kualitas air sungai prioritas, hasil pantauan kualitas udara ambient pada kawasan-kawasan transportasi, pemukiman, industri, dan komersial serta hasil analisis tutupan lahan dan dinamika vegetasi tahun terakhir.

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Kualitas air diindikasikan dari pengelolaan sumber daya air, termasuk dalam mencegah dan menanggulangi tingkat terjadinya pencemaran air dan sumber air. Air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya, karena dijadikan sebagai sumber air minum. Selain itu, air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri pertanian dan pembangkit tenaga listrik. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai didasarkan pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain adalah tentang penentuan status mutu air dengan Metoda Indeks Pencemaran (Pollution Index – PI). Didefinisikan bahwa "Pij" adalah indeks pencemaran bagi peruntukan" j " yang merupakan fungsi dari "Ci/Lij" , dimana "Ci" menyatakan konsentrasi parameter kualitas air " i " dan "Lij" menyatakan konsentrasi parameter kualitas air " i " yang dicantumkan dalam baku peruntukan air " j ". Dalam hal ini, peruntukkan yang akan digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Evaluasi terhadap PIj adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik, jika $0 < PIj \leq 1,0$
2. Tercemar ringan, jika $1,0 < PIj \leq 5,0$
3. Tercemar sedang, jika $5,0 < PIj \leq 10,0$
4. Tercemar berat, jika $PIj > 10,0$

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Banyumas, dilakukan di 30 titik pantauan yang berlokasi di 6 sungai, yaitu Sungai Cihaur Hulu, Sungai Tajum, Sungai Logawa, Sungai Pelus, Sungai Tipar, dan Sungai Ijo. Parameter yang dinilai dalam indeks kualitas air yaitu TSS, DO, BOD, COD, Fosfat, E.Coli/Fecal Coli, dan Total Coliform. Transformasi nilai PIj ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu.

Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Penentuan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang didasarkan pada nilai dari Plj sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 20
Nilai Indeks Kualitas Air berdasarkan nilai dari Plj

No	Nilai Plj	Nilai IKA	Keterangan
1.	$0 \leq Plj \leq 1$	70	Memenuhi
2.	$1,0 < Plj \leq 5$	50	Ringan
3.	$5 < Plj \leq 10$	30	Sedang
5.	> 10	10	Berat

Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut:

- 70 untuk memenuhi baku mutu,
- 50 untuk tercemar ringan,
- 30 untuk tercemar sedang, dan
- 10 untuk tercemar berat.

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dengan Metode Indeks Pencemaran Pollution Index – PI) dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 21
Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dengan Metode Indeks Pencemaran Pollution Index (PI)

No	Titik Pemantauan	Lokasi	Kelas	Indeks Pencemaran Air Sungai (Plj)	Mutu Air
	Pengukuran IKA di Sungai Cihaur Hulu				
1.	Sungai Cikopeng	Kedung Gede, Lumbir	II	5,38	Tercemar Sedang
2.	Sungai Canduk	Canduk, Lumbir	II	7,43	Tercemar Sedang
	Pengukuran IKA di Sungai Tajum				
3.	Sungai Tajum Hulu	Cihonje, Gumelar	II	5,64	Tercemar Sedang
4.	Sungai Arus	Legok, Pekuncen	II	4,26	Tercemar Ringan
5.	Sungai Tajum Tengah Cikakak	Cikakak, Wangon	II	5,34	Tercemar Sedang
6.	Sungai Tajum Tengah Gerduren	Gerduren, Purwojati	II	9,09	Tercemar Sedang
7.	Sungai Cibalung (Tajum Hilir)	Menganti, Rawalo	II	5,04	Tercemar Sedang
	Pengukuran IKA di Sungai Logawa				
8.	Sungai Logawa Hulu	Baseh. Kedungbanteng	II	5,14	Tercemar Sedang
9.	Sungai Mengaji Hulu	Gunung Lurah, Cilongok	II	3,31	Tercemar Ringan
10.	Sungai Cangkok Hulu	Kalikesur, Kedungbanteng	II	5,71	Tercemar Sedang
11.	Sungai Prukut Hulu /Curug Cipendok	Karangtengah, Cilongok	II	4,38	Tercemar Ringan
12.	Sungai Banjaran Hulu	Ketenger, Baturraden	II	3,09	Tercemar Ringan
13.	Sungai Kranji Hulu	Rempoah, Baturraden	II	4,03	Tercemar Ringan
14.	Sungai Jengok Hulu	Kutaliman, Kedungbanteng	II	5,79	Tercemar Sedang

No	Titik Pemantauan	Lokasi	Kelas	Indeks Pencemaran Air Sungai (Plj)	Mutu Air
15.	Sungai Mengaji Tengah	Jipang, Karanglewas	II	5,77	Tercemar Sedang
16.	Bendung Andong Bang	Karangtengah, Cilongok	II	4,92	Tercemar Ringan
17.	Sungai Banjaran Tengah	Kedungwuluh, Purwokerto Barat	II	5,78	Tercemar Sedang
18.	Sungai Kranji Tengah	Kranji, Purwokerto Timur	II	6,86	Tercemar Sedang
19.	Sungai Jengok Tengah	Rejasari, Purwokerto Barat	II	7,67	Tercemar Sedang
20.	Sungai Logawa Tengah	Jipang, Karanglewas	II	5,02	Tercemar Sedang
21.	Sungai Banjaran Hilir	Sidabowa, Patikraja	II	6,81	Tercemar Sedang
	Pengukuran IKA di Sungai Pelus				
22.	Sungai Telaga Sunyi	Limpakuwus, Sumbang	II	3,01	Tercemar Ringan
23.	Sungai Pelus Tengah	Dukuhwaluh, Kembaran	II	6,87	Tercemar Sedang
24.	Sungai Bener	Kranji, Purwokerto Timur	II	7,00	Tercemar Sedang
25.	Sungai Berem	Banjarsari Kidul, Sokaraja	II	6,75	Tercemar Sedang
	Pengukuran IKA di Sungai Tipar				
26.	Sungai Tipar Hulu	Alas Malang, Kemranjen	II	9,97	Tercemar Sedang
27.	Sungai Tipar Tengah	Kecila, Kemranjen	II	7,45	Tercemar Sedang
	Pengukuran IKA di Sungai Ijo				
28.	Sungai Cawang	Banjarpanepen, Sumpiuh	II	6,09	Tercemar Sedang
29.	Sungai Gumelar	Watu Agung, Tambak	II	6,09	Tercemar Sedang
30.	Sungai Sengon	Kebokura, Sumpiuh	II	8,73	Tercemar Sedang

Sumber : UPTD Laboratorium Lingkungan, DLH, Banyumas, 2019

Hasil transformasi nilai Plj ke dalam Indesk Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Tabel 22 menjelaskan tentang hasil transformasi nilai Plj ke dalam Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) untuk Kabupaten Banyumas Tahun 2019. Terlihat bahwa Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) Kabupaten Banyumas tahun 2019 adalah 34,67 sebagaimana data pada table 22.

Tabel 22
Indeks Kualitas Air Kabupaten Banyumas Tahun 2019

No	Status Mutu Air	Jumlah	Persen	Bobot	Nilai
1	Memenuhi Baku Mutu	0,00	0 %	70	0,00
2	Tercemar Ringan	7,00	23 %	50	11,67
3	Tercemar Sedang	23,00	77 %	30	23,00
4	Tercemar Berat	0,00	0 %	10	0,00
	Jumlah	30,00			34,67

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Kualitas udara ambient di Kabupaten Banyumas sangat dipengaruhi oleh kegiatan industry, perkantoran, pemukiman, dan transportasi. Dimana sumber pencemaran udara berasal dari sumber bergerak yang sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan bakar dan pembakaran mesin. Beberapa polutan yang dihasilkan oleh kegiatan pabrik, kegiatan di pemukiman, perkantoran, dan transportasi berupa senyawa CO, HC, SO2,NO2, dan partikulat. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pertumbuhan jumlah industri, pertumbuhan jumlah pemukiman dan perkantoran yang berakibat pada peningkatan kegiatan yang berpotensi menimbulkan polusi, serta peningkatan jumlah kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Banyumas.

Dalam rangka pengendalian pencemaran udara, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan pemantauan kualitas udara dengan menggunakan metode Passive Sampler,yang dilakukan di 4 lokasi sampling, yaitu area transportasi, industri, dan 2 area komersial yaitu area pemukiman/pemukiman dan perkantoran/perdagangan. Kategori dari nilai Indeks Kualitas Udara, dibedakan menjadi 7 (tujuh) kategori yaitu :

- X > 90 dengan kategori unggul
- 82 < x ≤90 dengan kategori sangat baik
- 74 < x ≤ dengan kategori baik
- 66 ≤ x ≤74 dengan kategori Cukup
- 58 ≤ x ‹ 66 dengan kategori Kurang
- 50 ≤ x < 66 dengan kategori Sangat Kurang
- X < 50 dengan kategori Waspada

Dalam pengukuran indeks kualitas udara, maka dilakukan pengukuran pada 2 (dua) periode, dimana titik pemantauan dilaksanakan di 4 (empat) lokasi, yaitu kawasan padat lalu lintas, kawasan industri, kawasan perkantoran/komersial, dan kawasan lingkungan pemukiman, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 23
Nilai Rata-rata SO_2 dan NO_2 untuk Periode I dan II Tahun 2019

No	Lokasi	SO_2	NO_2
1.	UPT Pembibitan Jl. Suwatio Purwokerto (Transportasi)	5,11	13,7
2.	Kantor Lurah Berkoh, Jl. Gerilya Timur Purwokerto (Industri)	15,07	14,32
3.	Kantor UPTD Labling DLH Banyumas, Jl Warga Bhakti No. 3 Purwokerto (Perkantoran)	6,34	12,35
4.	Perum Bantasoka No. 85 Jl. Sokajati Kelurahan Bantarsoka Purwokerto (Permukiman)	11,43	15,32
Rata-Rata		9,49	13,92

Sumber : UPTD Laboratorium Lingkungan, DLH, Banyumas, 2019

Berdasar pada hasil perhitungan nilai rata-rata SO2 atau NO2 untuk periode I dan II seperti yang tertulis pada Tabel 24, maka dapat ditentukan Indeks Kualitas Udara ambien di wilayah Kabupaten Banyumas pada periode I dan periode II tahun 2018 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 25. Diketahui bahwa nilai referensi EU telah ditentukan dan tidak dapat diubah, yaitu 40 untuk parameter NO2 dan 20 untuk parameter SO2. Berdasar tabel 25, terlihat bahwa angka Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU) Kabupaten Banyumas adalah 82,71 dan termasuk dalam kategori Sedang.

Tabel 24
Indeks Kualitas Udara di Wilayah Kabupaten Banyumas

Parameter	Rerata Pemantauan	Referensi EU	Indeks
NO2	13,92	40,00	0,3480
SO2	9,49	20,00	0,4743
Indeks Udara			0,4111
Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Banyumas			82,71
Kategori Kualitas Udara			Sangat Baik

Sumber : UPTD Laboratorium Lingkungan, DLH, Banyumas, 2019

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Banyumas tahun 2019 merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015, yaitu dengan menggabungkan beberapa parameter utama yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi, dan karateristik wilayah secara spasial yang disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Metode perhitungan IKTL ini dengan cara menjumlahkan nilai dari 5 (lima) indeks penyusunan yang telah diberikan bobot, yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKTL = 0{,}23\ ITH + 0{,}24\ IPH + 0{,}30\ IKT + 0{,}15\ IKBA + 0{,}08\ IKH$$

Dimana, IKTL adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan, ITH adalah Indeks Tutupan Hutan, IPH adalah Indeks Performance Hutan, IKT adalah Indeks Kondisi Tutupan Tanah, IKBA adalah Indeks Konservasi Badan Air, dan IKH adalah Indeks Kondisi Habitat. Berdasarkan hasil perhitungan dari 5 (lima) parameter IKTL diatas, maka perhitungan IKTL Kabupaten Banyumas Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 25
Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

No	Jenis Indeks Penyusunan IKTL	Bobot	Hasil Pengukuran	(Bobot)*(hasil pengukuran)
1.	Indeks Tutupan Hutan (ITH)	0,23	74,2634	17,0806
2.	Indeks Performance Hutan (IPH)	0,24	88,6625	21,2790
3.	Indeks Kondisi Tutupan Tanah (IKT)	0,3	66,7614	20,0284
4.	Indeks Konservasi Badan Air (IKBA)	0,15	50,3660	7,5549
5.	Indeks Kondisi Habitat (IKH)	0,08	94,6549	7,5724
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)				73,5153

Berdasarkan perhitungan 3 (tiga) komponen yang menjadi komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), maka perhitungan angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dilakukan dengan menggunakan formulasi yang telah diterapkan secara nasional, yaitu :

IKLH = (IKA x 30%) + (IKU x 30%) + (IKTL x 40%)

Dengan rumus tersebut maka diperoleh perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

Tabel 26
Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
di Kabupaten Banyumas Tahun 2019

Indeks Pengukuran	Hasil Pengukuran	Bobot	Nilai
IKA (Indeks Kualitas Air)	34,67	30%	10,401
IKU (Indeks Kualitas Udara)	82,71	30%	24,813
IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	73,5153	40%	29,406
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			64,620

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas yaitu 64,62, terletak antara nilai 60 sampai dengan 70, sehingga disimpulkan bahwa indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2019 termasuk dalam kategori Cukup Baik. Namun Nilai IKLH Kabupaten Banyumas masih dibawah nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Tengah yaitu 66,88 dan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Nasional yaitu 65,15, maka terdapat perbaikan yang harus dilaksanakan antara lain :

1. Perlu disusun suatu perencanaan yang terkoordinasi dan terpadu antar OPD teknis, termasuk dalam hal ini adalah pemutakhiran data dan informasi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Perlu melakukan pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya ruang terbuka hijau dan lahan pertanian produktif agar tidak dikonversi untuk pengembangan fungsi selain lahan hijau dan produksi pangan.
3. Perlu komitmen semua pemangku kepentingan dalam penegakan regulasi tentang tata ruang dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Hutan primer dan hutan sekunder perlu dipertahankan untuk menghindari menurunnya keanekaragaman hayati dan spesies di masa yang akan datang.
5. Mengintensifkan frekuensi sosialisasi dan pembinaan berwawasan lingkungan hidup kepada seluruh masyarakat.
6. Perlu melibatkan masyarakat dalam penyusunan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hayati.
7. Meningkatkan anggaran terkait fungsi, pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup.
8. Peningkatan sarana dan prasarana yang berupa adanya laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi.
9. Melengkapi data hasil pengujian kualitas air untuk parameter fecal coli dalam rangka perhitungan IKA.
10. Meningkatkan program pengendalian pencemaran air diantaranya dengan meningkatkan kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dengan melibatkan berbagai instansi sektor terkait, mengingat IKA di Kabupaten Banyumas menunjukkan angka 34,67 dan sebagian besar titik pantau (23 dari 30 titik pantau) termasuk dalam kategori Tercemar Sedang.
11. Menambahkan parameter PM 2,5 pada perhitungan IKU sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 660.1/3038 tanggal 14 November 2019 perihal Penambahan Parameter PM 2,5 untuk Perhitungan IKU.
12. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan, agar memiliki sertifikasi khusus terkait pengelolaan lingkungan.

Tujuan 7: Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat, maka ditetapkan satu indikator dengan capaian sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel 27
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ketersediaan dan
Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satu-an	Kondisi Awal		Tahun 2019			Target 2023 akhir RPJMD	Capaian %
		Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Reali-sasi	%		
Indeks daya Saing Infrastruktur	Indeks	NA	70,88	79,86	65,48	81,99	82,56	79,31
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan						81,99		79,31

Rata-rata capaian kinerja tujuan meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat pada tahun 2019 adalah sebesar 81,99%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 (akhir RPJMD) maka realisasi tahun 2019 telah mencapai 79,31%. Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut :

Indeks Daya Saing Infrastruktur

Indeks Daya Saing infrastruktur merupakan suatu indeks yang menggambarkan tentang kondisi infrastruktur di suatu daerah dengan capaian dari masing-masing komponen. Indeks Daya Saing Infrastruktur tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap

Kinerja makro urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dan panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Persentase kondisi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik terus meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yaitu dari sebesar 50,977% menjadi 60,443%, Sedangkan pada tahun 2016 kinerja panjang jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 30,28% dan mengalami kenaikan lagi menjadi 34,96% di tahun 2017. Hal ini didasarkan pada penambahan ruas jalan kabupaten sesuai dengan SK Bupati Banyumas Nomor 620/302 Tahun 2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Banyumas sebagai Ruas-Ruas Jalan Kabupaten. Berdasarkan SK tersebut panjang jaringan jalan Kabupaten Banyumas mulai tahun 2016 menjadi 1.508 km dari sebelumnya 804,784 km. Sebagian besar penambahan ruas jalan kabupaten merupakan jalan yang menghubungkan antar desa yang kondisinya sebagian besar rusak. Pada tahun 2019 panjang jalan

dalam kondisi baik menjadi 41,94 %, sementara yang rusak sedang sebesar 23,20%, sehingga kondisi panjang jalan dalam kondisi mantap menjadi sebesar 65,14%. Secara rinci capaian kinerja panjang jalan dalam kondisi mantap dari tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 28
Capaian Kinerja Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap
Dari Tahun 2014-2019

Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun (%)					
	Tahu 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Panjang jalan kabupaten	804,784	804,784	1.508	1.508	1.508	1.508
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	59,421	60,443	30,28	34,96	43,06	41,94
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang (%)	15,064	15,388	21,42	20,95	16,91	23,20
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak (%)	25,515	24,169	48,30	44,09	40,03	34.85

Sumber : DPU Kabupaten Banyumas

Untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan bidang urusan pekerjaan umum beberapa hal menjadi perhatian di Kabupaten Banyumas yaitu, pengingkatan jalan yang rusak berat, perbaikan jalan menjadi baik sehingga akan meningkatkan kemantapan kondisi jalan, serta perbaikan bangunan irigasi yang rusak dalam rangka menunjang peningkatan produksi pertanian.

Persentase rumah tinggal pengguna air bersih dan rumah tangga bersanitasi

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas, berdampak terhadap peningkatan permukiman, meliputi rumah dan perumahan, peningkatan kebutuhan pelayanan air minum dan sanitasi. Berdasarkan Data BPS Tahun 2015 menunjukkan bahwa angka backlog kepemilikan di Kabupaten Banyumas sejumlah 21.384 unit. Di samping permasalahan ketersediaan perumahan Kabupaten Banyumas juga menghadapi permasalahan banyaknya rumah tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh. Dari sisi pelayanan air bersih dan sanitasi cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih meningkat namun capaiannya baru mencapai sebesar 70,54% pada tahun 2017. Cakupan rumah tangga bersanitasi juga mengalami peningkatan, namun sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 75,33%. Cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi tersebut masih lebih rendah dari target *universal access* sebesar 100% cakupan akses air bersih dan 100% cakupan akses sanitasi pada tahun 2019. Selengkapnya capaian perkembangan kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 29
Perkembangan Kinerja Jumlah Rumah Tangga Pengguna
Air Bersih dan Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Bersih
Tahun 2014 – 2019

No	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun					
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	277.920	303.139	311.139	322.466	331.360	398.611
2.	Persentase rumah tangga memiliki akses air bersih (%)	63,05	67,97	68,91	70,54	72,67	87.79
3.	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	55,55	66,72	67,96	75,33	66,49	87,79

Secara umum terdapat gap yang cukup besar antara target indikator kinerja terkait pembangunan air minum, sanitasi, dan kawasan kumuh dalam RPJMD Kabupaten Banyumas dengan target *universal access* 100-0-100 RPJMN 2015-2019, dikarenakan target dalam RPJMD Kabupaten Banyumas telah disusun lebih dahulu dan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Lebih lanjut pembangunan air minum, sanitasi, dan kawasan kumuh tidak hanya untuk memenuhi target *universal access* tetapi juga untuk memenuhi target tujuan pembangunan berkelanjutan/SDG's.

Sarana Perhubungan (Terminal)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan SK Bupati Banyumas Nomor 480/324/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Wangon dan Terminal Penumpang Ajibarang sebagai Terminal Penumpang Tipe C, di Banyumas terdapat infrastruktur perhubungan darat yang terdiri dari 1 unit Terminal Tipe A dan 2 unit Terminal Tipe C. Pembangunan terminal khususnya Tipe C terus dilakukan untuk memberi pelayanan akses transportasi masyarakat yang ada di wilayah untuk melakukan aktivitasnya. Kebutuhan terminal yang ada di Kabupaten Banyumas sejumlah 8 unit, namun baru terealisasi sebanyak 3 unit, atau capainnya mencapai 37,5%. Adapun fasilitas terminal yang ada di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Tabel 30
Fasilitas Terminal di Kabupaten Banyumas

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah	Lokasi
1.	Jumlah Terminal Kelas A (unit)	1	Purwokerto
2.	Jumlah Terminal Kelas B (unit)	-	-
3.	Jumlah Terminal Kelas C (unit)	2	Wangon, Ajibarang

Permasalahan terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyumas diantaranya adalah Cakupan pelayanan infrastruktur dasar di Kabupaten Banyumas belum menjangkau seluruh penduduk. Untuk itu diperlukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar guna memberikan akses menyeluruh air minum, sanitasi, dan perumahan layak huni bagi peduduk Kabupaten Banyumas. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar menjadi semakin penting karena merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan upaya perbaikan kualitas lingkungan permukiman untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur meliputi :

a. Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan kegiatan ekonomi masyarakat
b. Mengembangkan sistem jaringan air limbah dan drainase.
c. Meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu.
d. Mengembangkan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan
e. Mengembangkan dan meningkatkan sarana transportasi wilayah dengan membangun terminal penumpang.
f. Meningkatkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air.
g. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan serta penataan saluran drainase, revitalisasi jaringan irigasi dan embung.
h. Membangun pusat kantor pemerintahan terpadu .
i. Meningkatkan penataan lingkungan permukiman kumuh, dan penyediaan sarana sanitasi dan air minum.
j. Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu .
k. Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana, SDM dan manajemen transportasi umum yang terintegrasi.
l. Meningkatkan dukungan pembiayaan infrastruktur jalan dan irigasi dari dana di luar APBD kabupaten.
m. Melakukan penyusunan regulasi untuk pembiyaan infrastruktur melalui anggaran desa.

Tujuan 8: Menumbuhkan dan Mengembangkan Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka mewujudkan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi , maka ditetapkan 3 (tiga) indikator dengan capaian sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel 31
Capaian Kinerja Tujuan Menumbuhkan dan Mengembangkan
Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2019			Target 2023 akhir RPJMD	Capaian %
		Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Reali-sasi	%		
Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (Wisman dan Wisnus)	%	NA	11,91	25,36	51,53	203,19	48,48	106,29
Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif	%	NA	NA	0	0	0	15	0
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,62	4,49	4,36	4,21	103,44	3,76	88,03
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan						153,31		97,16

Rata-rata capaian kinerja tujuan menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2019 adalah sebesar 153,31%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 (akhir RPJMD) maka realisasi tahun 2019 telah mencapai 97,16%. Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut :

Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (Wisman dan Wisnus)

Kinerja makro urusan pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu dari kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas cukup banyak dan beragam jenisnya, dan umumnya mudah dijangkau karena didukung sarana dan prasarana yang memadai. Namun demikian, masih terdapat beberapa obyek wisata yang belum tergarap secara optimal dan membutuhkan investasi untuk pengembangannya. Obyek wisata tersebut antara lain Wisata Kalibacin, Curug Ceheng, dan Nirwana Manggala. Di samping obyek wisata tersebut Kabupaten Banyumas juga memiliki berbagai potensi pariwisata yang belum dikembangkan antara lain: wisata edukasi geologi di Kawasan Wisata Baturraden, wisata alam air terjun di beberapa kecamatan, wisata budaya dan heritage di Kawasan Kota Lama Banyumas, wisata alam Sungai Serayu.

Wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Banyumas terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Dalam kurun waktu tahun 2013-2017 jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai obyek wisata di Kabupaten Banyumas menunjukkan peningkatan fluktuatif, dengan kunjungan obyek wisata terbanyak pada obyek wisata Baturraden.

Dilihat dari lamanya waktu berkunjung, rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara hanya satu hari, tidak mengalami perubahan selama kurun waktu tahun 2013-2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas memerlukan penanganan yang lebih serius untuk dapat menambah lama tinggal wisatawan, sehingga dapat lebih lama membelanjakan uangnya di Kabupaten Banyumas

Infrastruktur pendukung pariwisata seperti perhotelan sudah cukup memadai di Kabupaten Banyumas. Wisatawan tidak akan kesulitan dalam menemukan akomodasi karena beragamnya jenis hotel yang tersedia. Perkembangan jumlah wisatawan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 32
Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Banyumas
Tahun 2014 - 2019

Uraian	Satuan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah Kunjungan wisata	orang	1.954.873	1.784.378	2.013.992	2.111.865	2.363.002	880.743
a. Wisatawan Nusantara	orang	1.953.248	1.784.018	2.013.544	2.111.367	2.362.794	3.580.485
b. Wisatawan Mancanegara	orang	1.625	360	448	498	208	258

Berdasarkan data jumlah kunjungan wisata tersebut dapat dikatakan bahwa pertumbuhan jumlah wisatawan mengalami peningkatan menjadi sebesar 203,19%. Selain terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, obyek wisata di Kabupaten Banyumas juga berkembang dengan pesat, dari sebanyak 20 obyek di tahun 2018 menjadi 51 obyek di tahun 2019. Adapun data obyek wisata sebagi berikut :

1. Taman Rekreasi Andhang Pangrenan
2. Taman Balai Kamambang
3. THR Pangsar Sudirman
4. Kalibacin
5. Baturraden
6. Dreamland
7. Palawi Wanawisata
8. Palawi P3
9. Palawi P7
10. Palawi Telaga Sunyi
11. Small World
12. Curug Telu Karangsalam
27. Kph.T.C.Cipendok
28. Kph.T.C.Gomblang
29. Kph.T.klpgu.Jenggala
30. Kph.T.b.p.Munggang
31. Kph.T.C.Bayan
32. Kph.T.Limpakuwus
33. Kph.T.C.song
34. Kph wana pramuka
35. Kph. T. Kumpe
36. Outbond candi
37. G.W.Karangmangu
38. Curug Nangga

13. The Forest
14. Caping Park
15. The Village
16. Pereng
17. M. Sendang Mas
18. Watugede, Kalisalak
19. Wadas Tumpang
20. MSTB Cikakak
21. Batu Jonggol
22. Bukit Kendalisada
23. Bumper Kendalisada
24. Curug Gemawang
25. KphB.C Wanasuta
26. KphT. Watu Meja
39. Watu kumpul
40. Wisata Germanggis
41. K.R Karang Tirta
42. Prawita garden
43. Taman Otcha
44. Kaliung
45. Pertapan Gerduren
46. Greenstone karangsalam
47. C.A.U.B Karangsalam
48. Gn Laos
49. Paguyuban Melung
50. K.R. Sentana
51. Lorong Blothong

Meskipun terdapat peningkatan jumlah wisawatan dan obyek wisata, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki lagi yaitu :

1. Minimnya informasi destinasi wisata di Kabupaten Banyumas, atau meskipun ada tetapi hanya sebatas memberi informasi, belum memasarkan.
2. Belum adanya paket-paket wisata yang terintegrasi di setiap kawasan wisata, misalnya dari apa produk atau destinasi unggulannya, estimasi durasi waktu kunjungan dan perjalannya, moda transportasi yang melayani, dan sebagainya.
3. Kurangnya alternatif produk wisata jadi yang layak jual. Sejauh ini pariwisata di Kabupaten Banyumas masih bertumpu pada wisata alam. Potensi wisata lain seperti kekayaan budaya dan heritage belum tergarap maksimal, karena minimnya pembinaan sebagaimana nampak pada pembahasan pada aspek kebudayaan.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mendukung pencapaian indikator urusan pariwisata melalui pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2019 baru mencapai 8 (delapan) desa dari 301 desa yang ada.

Pengembangan desa wisata sangat potensial untuk meningkatkan jumlah kunjungan wsatawan yang akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa. Upaya ini telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023.

Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Dewasa ini, ekonomi berkembang tidak hanya melalui sektor yang besar seperti manufaktur, namun sudah jauh bergerak ke ranah yang lebih luas. Lebih jauh, sumber daya manusia yang termasuk di dalamnya ide dan gagasan kreatif

berkembang dan digunakan untuk menciptakan suatu produk yang dapat memiliki nilai tambah yang tinggi. Ekonomi kreatif saat ini mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Di sisi lain, perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia juga menyimpan beberapa permasalahan seperti penyebaran sumber daya yang belum merata, sulitnya menembus pasar internasional dan mendapatkan sumber pendanaan usaha, minimnya kontribusi dari pekerja berpendidikan tinggi, serta masalah lainnya seperti belum mendapatkan status hukum, legalitas, dan regulasi yang telah diatur oleh pemerintah.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Banyumas belum menargetkan persentase pertumbuhan industri kreatif, karena pada tahun 2019 baru dilaksanakan langkah-langkah agar ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas mengalami pertumbuhan. Adapun data industri kreatif yang ada di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 adalah sebanyak 1.080 jenis industri dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 33
Data Industri Kreatif di Kabupaten Banyumas Tahun 2019

No	Jenis Industri Kreatif	Jumlah
1.	Kerajinan Craft	950
2.	Pakaian/fashion	6
3.	Video/film/photografi	100
4.	Penerbitan dan percetakan	14
5.	Layanan komputer	10
	Jumlah	1.080

Sumber : Dinperindag, data diolah

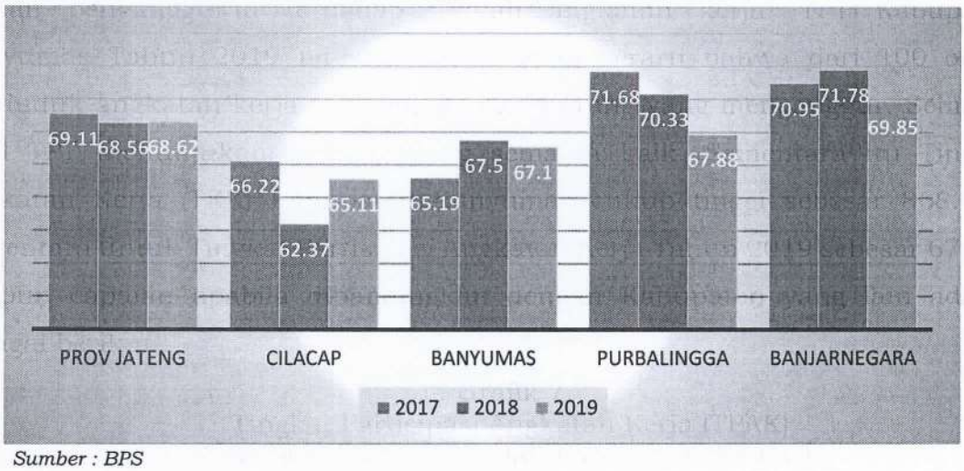
Meskipun pada tahun 2019 belum ditargetkan, namun Pemerintah Kabupaten Banyumas tetap melaksanakan prinsip pengembangan ekonomi kreatif dengan menggunakan prinsip-prinisip sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 meliputi :

a. Pemberdayaan sumber daya manusia kreatif untuk mewujudkan kreativitasnya menjadi produk dan/atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual.
b. Peningkatan literasi mengenai pola pikir desain bertujuan untuk mentransformasikan kreativitas menjadi inovasi.
c. Penciptaan karya kreatif menggunakan warisan budaya sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan keunikan dan memperkuat jati diri, persatuan dan kesatuan, serta eksistensi bangsa Indonesia di forum internasional.
d. Pengembangan dan pemanfaatan media sebagai saluran distribusi dan presentasi karya dan konten kreatif lokal yang berkualitas untuk meningkatkan apresiasi dan pengakuan masyarakat Indonesia dan dunia.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) memberi indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Banyumas Tahun 2019 tercatat 4,21% yang berarti bahwa dari 100 orang penduduk angkatan kerja terdapat sekitar 4 orang yang menganggur. Semakin kecil TPT menunjukan indikasi yang semakin baik. Sementara itu Tingkat Angkatan Kerja (TKK) Kabupaten Banyumas cukup tinggi sebesar 868.553. Sementara untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2019 sebesar 67,1%. Adapun capaian apabila dibandingkan dengan Kabupaten yang lain adalah sebagai berikut :

Grafik 7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tetangga
Tahun 2017 – 2019



Sumber : BPS

Sementara untuk jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tetangga dari Tahun 2017 – 2019, adalah sebagai berikut:

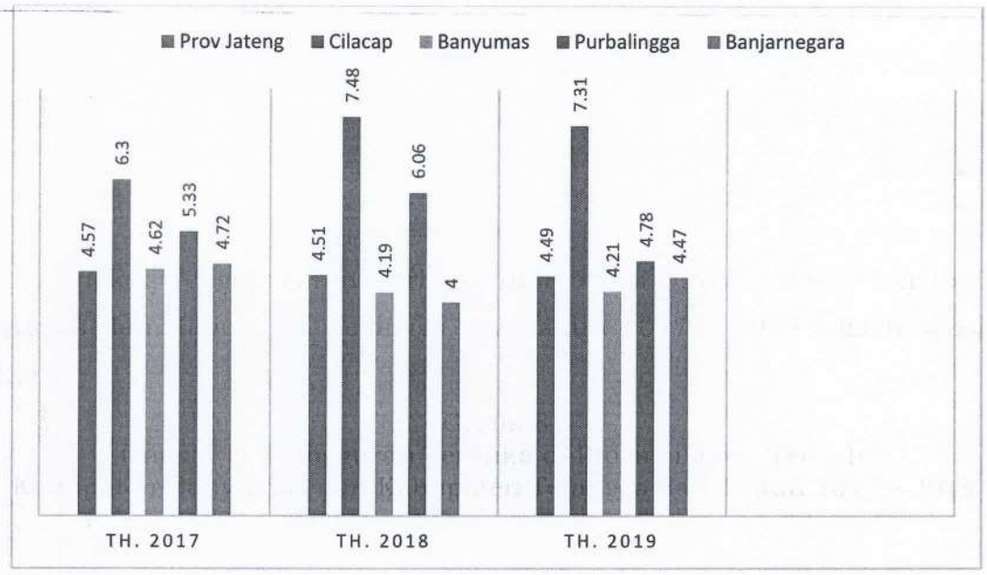
Tabel 34
Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas
dan Kabupaten Tetangga dari Tahun 2017 - 2019

Wilayah	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Jumlah Angkatan Kerja			Jumlah Angkatan Kerja			Jumlah Angkatan Kerja		
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Total Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Total Angkt. Kerja	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Total Angkatan Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prov Jateng	17.186.674	823.938	18.010.612	17.245.548	814.347	18.059.895	17.441.153	819.355	18.260.508
Cilacap	788.414	52.992	841.406	739.602	59.801	799.403	780.198	61.491	841.689
Banyumas	785.231	38.048	823.279	827.086	36.138	863.224	832.017	36.536	868.553
Purbalingga	463.809	26.138	489.947	457.918	29.522	487.440	454.098	22.798	476.896
Banjarnegara	464.432	23.025	487.457	478.171	19.915	498.086	467.345	21.876	489.221

Sumber : BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tetangga dari tahun 2017 – 2019 adalah sebagai berikut :

Grafik 8
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah,
Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tetangga dari Tahun 2017 - 2019



Sumber : BPS

Dalam rangka mengatasi tingkat pengangguran terbuka, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat yang sesuai dengan kemampuan kebanyakan masyarakat tersebut ditambah dengan sumberdaya yang tersedia. Selain itu diberikan modal yang akan digunakan untuk menunjang usaha tersebut.
2. Memperluas kesempatan kerja dengan cara memanfaatkan usaha-usaha yang mampu menampung pekerja yang banyak.
3. Mempermudah ijin usaha, terutama UMKM yang dimana saat ini masih sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat.

Tujuan 9: Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehiduan masyarakat, maka ditetapkan 4 (empat) indikator dengan capaian sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel 35
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2019			Target 2023 akhir RPJMD	Capaian %
		Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Reali-sasi	%		
Persentase Penurunan Konflik Sosial	%	NA	NA	5	4,5	90	25	18
Angka Kriminalitas	kasus	599	677	731	831	86,32	950	112,53
Indeks Demokrasi	indeks	NA	74.46	77,83	74,46	95,67	86	86,58
Persentase Pelestarian Budaya Banyumas	%	NA	NA	32.87	32,87	100	100	32,87
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan						93		62,49

Rata-rata capaian kinerja tujuan Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat pada tahun 2019 adalah sebesar 93%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 (akhir RPJMD) maka realisasi tahun 2019 telah mencapai 62,49%. Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut :

Persentase Penurunan Konflik Sosial

Pengertian dari konflik sosial dapat diartikan sebagai perubahan sikap dalam masyarakat yang mengakibatkan pada terkikisnya kesatuan (integrasi) social. Konflik ini tidak hanya datang dari dalam masyarakat, tetapi dapat juga dari luar masyarakat oleh karenanya banyak yang mengatakan bahwa konflik social adalah salah satu faktor pendorong perubahan social. Konflik sosial yang terjadi di masyarakat meliputi konflik SARA dan konflik IPOLEKSOS-BUDHANKAM.

Adapun penurunan angka konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 adalah sebesar 4,5% dari target sebesar 5% sehingga capaiannya adalah 90%. Adapun rincian angka konflik SARA dan angka konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM yang terjadi pada tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 36
Angka konflik SARA dan IPOLEKSOSBUDHANKAM
di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2019

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka konflik SARA	10 kasus	7 kasus	142 %	22 kasus	2 kasus	190,91%
2.	Angka konflik IPOLEKSOSBUD-HANKAM	12 kasus	8 kasus	150 %	14 kasus	12 kasus	114,29%
Rata-rata capaian				146 %			152,6 %

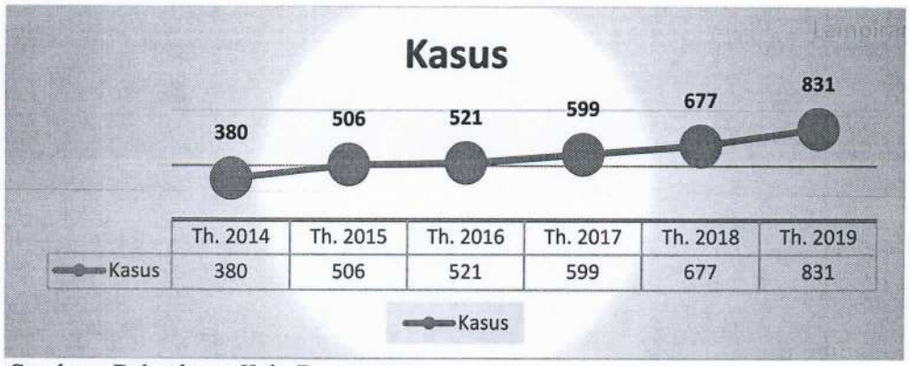
Pengendalian suatu konflik hanya mungkin dapat dilakukan apabila berbagai pihak yang berkonflik terorganisir secara jelas. Menekan sebuah konflik agar tidak berlanjut menjadi sebuah tindak kekerasan memerlukan strategi pendekatan yang tepat. Dalam rangka pengendalian konflik, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas mengambil langkah-langkah diantarnya meliputi :

1. Melakukan konsiliasi yang merupakan bentuk pengendalian konflik sosial melalui lembaga-lembaga tertentu misalnya lembaga perwakilan rakyat (DPRD) yang dapat memberikan keputusan yang adil. Dalam konsiliasi berbagai kelompok yang berkonflik duduk bersama mendiskusikan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan.
2. Melakukan Arbitrasi yang merupakan bentuk pengendalian konflik social melalui pihak ketiga dan kedua belah pihak yang berkonflik menyetujuinya. Keputusan-keputusan yang diambil pihak ketiga harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik.
3. Melakukan Mediasi yang merupakan bentuk pengendalian konflik sosial dimana pihak-pihak yang berkonflik sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.

Angka Kriminalitas

Keamanan dan ketertiban merupakan salah satu aspek pendukung iklim berinvestasi. Keamanan wilayah tercermin dari Angka kriminalitas yaitu banyaknya perkara pidana yang masuk di Pengadilan. Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2014-2019 mengalami fluktuasi dengan kasus terbanyak terjadi pada tahun 2012, yaitu sebanyak 467 kasus. Perkembangan jumlah kasus kriminalitas selama tahun 2012-2017 adalah terlihat pada tabel berikut:

Grafik. 9
Jumlah Kasus Kriminalitas di Kabupaten Banyumas Tahun 2014 – 2019



Sumber : Bakesbang Kab. Banyumas

Dalam rangka menurunkan angka kriminalitas, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan beberapa upaya diantaranya adalah:

1. Membangun pos keamanan lingkungan (poskamling).
2. Membentuk regu keamanan lingkungan.
3. Menambah jumlah anggota Hansip.
4. Memberlakukan aturan pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan.

Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi merupakan suatu indikator yang menunjukkan tingkat perkembangan demokarsi di suatu wilayah. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tigas aspek demokrasi yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Masing-masing ketiga aspek tersebut memiliki variabel yang berjumlah 11 yaitu :

A. Kebebasan Sipil, terdiri dari 4 (empat) variabel yaitu :
   1. Kebebasan berkumpul dan berserikat
   2. Kebebasan berpendapat
   3. Kebebasan berkeyakinan
   4. Kebebasan dari diskriminasi

B. Hak-hak politik, terdiri dari 4 (empat) variabel yaitu :
   1. Hak memilih dan dipilih
   2. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan
   3. Pemilu yang bebas dan adil
   4. Peran DPRD

C. Lembaga demokrasi, terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu :
   1. Peran Partai Politik
   2. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
   3. Peradilan yang independen

Metodologi penghitungan indeks demokrasi menggunakan 4 (empat) sumber data yaitu Review surat kabar lokal, Review dokumen (perda, perbup dan lain-lain), *Focus Group Discussion* FGD), Wawancana mendalam. Sementara klasifikasi tingkat demokarsi dikelompokan menjadi tiga kategori yakni baik (indeks>80), sedang (indeks 60-80) dan buruk (indeks<60). Indeks Demokrasi pada Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 adalah sebesar 74,46, sementara untuk tahun 2019 belum dirilis,sehingga belum dapat ditampilkan capaiannya pada laporan ini. Dengan indeks sebesar 74,46 maka indeks demokrasi di Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori "Sedang".

Dalam rangka meningkatkan nilai indeks demokrasi, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan langkah-langkah diantaranya dengan :

1. Tranparansi anggaran (APBD) dalam berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti website pemerintah dan sebagainya.
2. Membuat "Lapak Aduan" yang disediakan oleh Pemerintah dalam menggali aduan/usulan/pendapat masyarakat.
3. Mengurangi tingkat kekerasan/kerusuhan dalam demonstrasi (unjuk rasa oleh masyarakat) baik kekerasan yang dilakukan oleh aparat maupun oleh masyarakat pelaku demonstrasi.
4. Mengurangi penggunaan dana bantuan keuangan partai politik untuk operasional partai politik.

Persentase Pelestarian Budaya Banyumas

Sebagai tonggak penunjang berdirinya kebudayaan nasional di Indonesia, kebudayaan daerah seringkali dihadapkan pada permasalahan terkait eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang muncul antara lain semakin melunturnya nilai-nilai serta penghargaan terhadap kebudayaan daerah itu sendiri. Salah satu faktor yang menyebabkan semakin lunturnya minat masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal adalah minimnya usaha pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah, serta menguatnya gempuran budaya asing yang masuk melalui saluran teknologi informasi yang semakin bebas dan cepat. Pemerintah Kabupaten Banyumas mengantisipasi permasalahan tersebut dengan melakukan beberapa program kegiatan yang mengarah kepada pembinaan, pelestarian dan juga pembangunan sarana prasarana penyelenggaraan kebudayaan lokal beserta dengan unsur yang terbentuk di dalamnya.

Dalam rangka melestarikan kesenian dan kebudayaan dilakukan dengan penyelenggaran festival seni dan budaya yang rutin digelar setiap tahun. Penyelenggaran festival seni dan budaya antara lain menampilkan pagelaran kesenian buncis karawitan, calung dan macapat, serta beberapa kebudayaan lain seperti wayang kulit, lengger dan kesenian kenthongan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya meningkat cukup signifikan, namun kualitas pelaksanaannya

masih perlu ditingkatkan. Tema maupun isi setiap festival perlu dipertajam, sehingga jelas perbedaan antara masing-masing festival. Pemasaran untuk setiap event tersebut juga perlu dikoordinasi dengan lebih baik lagi, sehingga benar-benar mampu menarik wisatawan seluas-luasnya.

Dukungan pemerintah dalam rangka memberikan ruang untuk mengekpresikan bentuk kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan pembangunan dan penyediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya. Dalam rangka menjaga serta melestarikan beberapa benda bersejarah, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya. Hingga tahun 2016 tercatat 59 benda bersejarah, berupa benda, situs dan kawasan cagar budaya telah mendapatkan tindakan pelestarian/konservasi. Pembinaan terhadap unsur kebudayaan dan seni juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Jumlah kelompok kesenian di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2018 sebanyak 1702 jumlah kelompok.

Adapun persentase pelestarian budaya meliputi persentase pelestraian benda, situs dan kawasan cagar budaya sebesar 28% ditambah dengan persentase jenis kesenian yang ada sebesar 37,74%, sehingga total persentase rata-rata pelestarian budaya Banyumas sebesar 32,87%. Adapun gambaran pelestarian budaya dapat dilihat pada capaian indikator sebagai berikut :

Tabel. 38
Capaian Kinerja Pelestarian Budaya Banyumas dari Tahun 2014-2019

No.	Uraian	Capaian Kinerja					
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Penyelenggaraan budaya festival seni dan budaya (kali)	9	9	5	24	190	200
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budya (unit)	3	5	6	6	370	370
3.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	59	59	59	59	59	59
4.	Jumlah grup kesenian (kelompok	1.469	1.490	1.633	1.633	1.702	1.666
5.	Jumlah grup kesenian yang telah dibina (kelompok)	135	135	157	157	187	36
6.	Jumlah seniman (orang)						
	- Penari	1.501	1.529	1.529	1.529	1.680	8.520
	- Pemain Teater	249	900	900	900	950	7.400
	- Pelukis	10	112	112	112	124	112
	- Pemusik	3.705	5.983	5.983	5.983	6.300	6.300

Permasalahan yang terjadi terkait dengan pertumbuhan kelompok seni dan budaya tradisional, diantaranya karena masuknya budaya asing. Masuknya budaya asing ke suatu Negara sebenarnya merupakan hal yang wajar, asalkan budaya tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa. Namun pada kenyataannya budaya asing mulai mendominasi sehingga budaya lokal mulai dilupakan. Faktor

lain yang menjadi masalah adalah kurannya kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan dari budaya lokal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tugas utama yang perlu dibenahi adalah bagaimana mempertahankan, melestarikan, menjaga serta mewarisi budaya lokal dengan sebaik-baiknya agar dapat memperkokoh budaya bangsa yang akan mengharumkan nama daerah, dan agar budaya asli daerah tidak diklaim oleh daerah yang lain.

C. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019.

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 39
Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2019 (Audit BPK RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	Capaian (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	2.164.143.439.573,00	2.024.929.335.526,00	93,56
2.	Belanja Langsung	1.549.319.793.146,00	1.432.620.865.971,40	92,46
JUMLAH		3.713.463.232.719,00	3.457.550.201.497,40	93,10

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 40
Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah
Kabupaten Banyumas Per Tujuan Tahun 2019

NO	TUJUAN	RENCANA ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	62.975.565.914,00	55,111,467,303.00	87,51
2.	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	794.146.814.078,00	679.166.067.794,00	85,52
3.	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	19.509.995.000,00	13.418.581.462,00	68,78

NO	TUJUAN	RENCANA ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	31.190.951.214,00	27.478.453.136,00	88,10
5.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	1.175.000.000.00	1.164.379.300,00	99,10
6.	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	42.862.622.000,00	32.349.187.641,00	75,47
7.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	370.267.505.509,00	348.218.535.996,00	94,05
8.	Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	14.108.555.720,00	12.031.963.294,00	85,28
9.	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	45.444.544.713,00	41.989.641.654,00	92,40
JUMLAH		1.381.681.554.148,00	1.210.928.277.580,00	86,24

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Kinerja

Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2019, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 41
Efektivitas dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2019

No	Capaian Kinerja	Persentase rata-rata capaian kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran		Tingkat efektifitas dan Efisiensi
				(Rp.)	%	
	TUJUAN 1					
1.	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	101,03	62.975.565.914	55,111,467,303	87.51	13,79
	TUJUAN 2					
2.	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	100,01	794.146.814.078	679,166,067,794	85.52	14,49
	TUJUAN 3					
3.	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	88,81	19.509.995.000	13,418,581,462	68.78	20.03
	TUJUAN 4					
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	102,81	31.190.951.214	27,478,453,136	88.10	14,71
5.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	99,99	1.175.000.000	1,164,379,300	99.10	0,89
	TUJUAN 6					
6.	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	100,65	42.862.622.000	32,349,187,641	75.47	25,18
	TUJUAN 7					
7.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	81,99	370.267.505.509	348,218,535,996	94.05	-
	TUJUAN 8					
8.	Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	153,31	14,108,555,720	12,031,963,294	85.28	68.03
	TUJUAN 9					
9.	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	93	45,444,544,713	41,989,641,654	92.40	0,59
	JUMLAH	**102.40**	1,381,681,554,148	1,210,928,277,580	86,24	17,52

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) tujuan memperoleh hasil persentase rata-rata capaian kinerja melebihi realisasi persentase anggaran, sedangkan 1 (satu) tujuan masih kurang efektif dan kurang efisien, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Efektifitas dan efisiensi anggaran tertinggi dicapai pada tujuan ke delapan yaitu menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif, dimana dengan prosentase realisasi anggaran sebesar 85,28% dapat mencapai prosentase capaian kinerja sebesar 153,31 %.

   Efektifitas dan efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 didukung oleh hal-hal sebagai berikut :

   a. Dukungan dan peran serta pihak swasta terhadap kegiatan pembangunan yang berdampak juga terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.
   b. Adanya proses perencanaan dan penganggaran yang berorientasi kinerja/anggaran berbasis kinerja.
   c. Pengembangan kompentensi ASN yang bekerja sama dengan kementerian/lembaga/instansi pemerintah lainnya dan/atau swasta, sehingga mengurangi beban anggaran pada pemerintah daerah.
   d. Adanya penghematan anggaran, dimana proses pengadaan barang/jasa Pemerintah daerah dilakukan melalui *e-Purchasing*. Selain itu, proses pengadaan barang/jasa melalui proses negosiasi harga sehingga didapat harga yang terendah sehingga terjadi efisiensi anggaran.

2. Efektifitas dan efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 paling rendah pada tujuan ketujuh yaitu meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat, dimana prosentase realisasi anggaran sebesar 94,05% sedangkan prosentase rata-rata capaian kinerja sebesar 81,99%. Tujuan ketujuh didukung oleh indikator kinerja Indeks Daya Saing Infrastruktur.

   Adapun faktor yang mempengaruhi penurunan capaian kinerja pada tujuan ketujuh adalah adanya perbedaan hasil perhitungan data awal kondisi jalan yang dilakukan pada pertengahan tahun 2019 (sebagai syarat perolehan Dana Alokasi Khusus jalan) dengan perhitungan pada saat menentukan target di tahun 2018 (target Renstra 2018-2023) sebesar 48,06%, dimana perhitungan baru ini menggunakan metode survey terbaru (SDI). Dengan perhitungan menggunakan metode survey terbaru (SDI) diperoleh data kondisi jalan awal sebesar 35,473%, walaupun setelah dilakukan penghitungan capaian kinerja pada akhir tahun 2019 naik menjadi sebesar 37,865%. Namun karena target capaian kinerja awal sebesar 48,06% sehingga capaian kinerja menjadi rendah.

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan amanahnya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanannya Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tabel berikut:

Tabel 42
Data Prestasi dan Penghargaan
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2019

No	Nama Penghargaan	Dari	Penerima
1.	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit	Komisi Akreditasi Rumah Sakit	RSUD Banyumas
2.	Integrasi e-Planning dan SIPD	Kemendagri	Bapedalitbang
3.	Adipura	KLHK	DLH
4.	Sekolah Adiwiyata Mandiri 2019	KLHK dan Kemendikbud	SMPN I Baturraden
5.	Program Kampung Iklim Katagori Utama	KLHK	Desa Langgongsari
6.	Program Kampung Iklim Katagori Madya	KLHK	Desa Sambeng Wetan
7.	Program Kampung Iklim Katagori Madya	KLHK	Kelurahan Mersi
8.	Lomba Makanan Khas Kategori Menu Utama di TMII Jakarta	Kementan	Kabupaten Banyumas
9.	Lomba Cipta Menu Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal		TP PKK Kabupaten Banyumas (TP PKK Kecamatan Baturraden)
10.	Juara I Pasar Rakyat Pengelola Pasar Terbaik	Kementerian Perdagangan RI	Pasar Manis Purwokerto
11.	Penghargaan Primaniyatra Award 2019 (Exporter Berpretasi) di Kabupaten Banyumas	Kementerian Perdagangan RI	- PT Bio Takara (Bulu Mata) - CV Inagro Jinawi (Gula Kristal) - PT Coco Sugar (Gula Kristal) - PT Indesso Aroma (Minyak Atsiri)
12.	Piagam Penghargaan Pasar Tertib Ukur	Kementerian Perdagangan RI	Pasar Sangkal Putung
13.	Piagam Penghargaan Pasar Tertib Ukur	Kementerian Perdagangan RI	Pasar Sumpiuh
14.	Perencanaan Permbangunan Daerah	Provinsi Jateng	Bapedalitbang
15.	Juara II Lomba Desa mandiri Energi	Provinsi Jeteng	Desa Kotayasa

No	Nama Penghargaan	Dari	Penerima
16.	Sekolah Adiwiyata	Provinsi Jateng	SMP N 2 Purwojati
17.	Sekolah Adiwiyata	Provinsi Jateng	SMP N 2 Sokaraja
18.	Top 40 Inovasi Pelayanan Publik	Provinsi Jateng	Dinarprusda
19.	Juara Harapan II Lomba Perpustakaan SLTA	Provinsi Jateng	SMA N 1 Ajibarang
20.	Juara Harapan I Lomba Perpustakaan Desa	Provinsi Jateng	Desa Karanganyar
21.	Juara Harapan III Stand Terbaiak	Provinsi Jateng	Dinarprusda
22.	Juara Harapan II Lompa Arsip Daerah	Provinsi Jateng	Dinarprusda
23.	Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Kategori Pendamping Ketahanan Pangan	Provinsi Jateng	Anggoro Hendri Prasetyo, A.Md. (Penyuluh Pertanian Kegiatan lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kabupaten Banyumas)
24.	Kelembagaan Kelompok Tani Komoditas Cengkeh Tahun 2019	Provinsi Jateng	Kelompok Tani BANAR LESTARI MULYA Desa Kalisalak Kecamatan Kebasen
25.	Kelembagaan Kelompok Tani Komoditas Kelapa Tahun 2019	Provinsi Jateng	Kelompok Tani LEGEN ARDI MULYA Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen
26.	Lomba Penyuluhan Bidang Pertanian-Kategori THL-TBPP Teladan	Provinsi Jateng	ATUN YULIANI, SP. BPP Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas
27.	Lomba Penyuluhan Bidang Pertanian-Pos Penyuluhan Pedesaan Berprestasi	Provinsi Jateng	Posluhdes NGUDI UTAMA Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok
28.	Lomba Penyuluhan Bidang Pertanian-Kategori Kelompok Tani Aspek UPSUS Pajale Berprestasi-(UPSUS Kedelai)	Provinsi Jateng	SRI RAHAYU Desa Jambu Kecamatan Wangon
29.	Juara 1 Piagam Penghargaan Eksportir Tanggung untuk Kategori Perusahaan Kecil	Provinsi Jawa Tengah	CV. Inagro Jinawi (Gula Kristal)
30.	Stand terabit Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jateng	Kabupaten Banyumas
31.	Juara I Katagori Pmeran Produk Unggulan Potensi Daerah (batik dan Tenun)	Provinsi Jateng	Kabupaten Banyumas

No	Nama Penghargaan	Dari	Penerima
32.	Juara III Katagori Pmeran Produk Unggulan Potensi Daerah (Craft/kerajinan)	Provinsi Jateng	Kabupaten Banyumas
33.	Juara Harapan I Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi Jateng (Menu Keluarga)	Provinsi Jateng	Kabupaten Banyumas
34.	Juara I Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi Jateng (Menu Kudapan)	Provinsi Jateng	Kabupaten Banyumas
35.	Juara III Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi Jateng (Menu Balita)	Provinsi Jateng	Kabupaten Banyumas
36.	Juara I Kategori Unit Pembenihan Rakyat	Provinsi Jateng	Pokdakan Mina Usaha
37.	Juara I Kategori Pembudidaya Gurami	Provinsi Jateng	Pokdakan Mina Gule I
38.	Juara I Kategori Pembudidaya Ikan Hias	Provinsi Jateng	Pokdakan Fossil
39.	Juara III Evaluasi Paguyuban Peternak	Provinsi Jateng	Kelompok Banter Melayu
40.	Juara III Kelompok Tani Ternak	Provinsi Jateng	KTTI Subur
41.	Stand Terbaik Pameran Pangan Nusantara 2019- Jogya Expo Center	Feraco	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IX.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

KABUPATEN BANYUMAS
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

Dalam Rupiah

No	Perusahaan Daerah Tahun	Sumber	Status	Pendapatan	Biaya	Pajak	Laba
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bidang Penvediaan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2019	*LK*	-	80.976.822.921,13	74.216.981.059,60	2.163.087.000,00	4.596.754.861,53
	Sub Total (1)			80.976.822.921,13	74.216.981.059,60	2.163.087.000,00	4.596.754.861,53
2	Bidang Aneka Industri PT. Banyumas Investama Java (Perseroda) Tahun 2019	*LK*	-	665.784.074,00	554.133.308,00	6.649.768,00	105.000.998,00
	Sub Total (2)			665.784.074,00	554.133.308,00	6.649.768,00	105.000.998,00
3.	Bidang Pengelolaan Pasar Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria Tahun 2019	*LK*	-	1.078.063.875,00	1.557.585.359,00	-	(479.521.484,00)
	Sub Total (5)			1.078.063.875,00	1.557.585.359,00	-	(479.521.484,00)
			Total Seluruh Bidang	171.010.365.996,13	130.715.772.810,60	10.587.562.106,00	29.707.031.078,53

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IX.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

KABUPATEN BANYUMAS
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AKTIVA,
KEWAJIBAN, DAN EKUITAS DANA

No	Perusahaan Daerah Tahun	Sumber	Status	Aktiva lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Kewajiban Lain-lain	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11	12:9+10+11	13	14	15	16	17	18
1	Bidang Penyediaan Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2019	LK	-	24.056.768.792,07	159.798.419.054,10	-	183.855.187.846,17	6.714.545.800,00	8.135.737.906,07	-	14.850.283.706,07	150.537.798.890,53			12.721.715.182,40	5.745.390.067,17	169.004.904.140,10
	Sub Total (1)			24.056.768.792,07	159.798.419.054,10	-	183.855.187.846,17	6.714.545.800,00	8.135.737.906,07	-	14.850.283.706,07	150.537.798.890,53	-	-	12.721.715.182,40	5.745.390.067,17	169.004.904.140,10
2	Bidang Aneka Industri PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) Tahun 2019	LK	-	636.900.997,00	28.317.611,00	2.694.406.785,00	3.359.625.393,00	548.857.207,00	91.666.666,00	482.864.526,00	1.123.388.399,00	2.010.000.000,00	-		121.235.996,00	105.000.998,00	2.236.236.994,00
	Sub Total (2)			636.900.997,00	28.317.611,00	2.694.406.785,00	3.359.625.393,00	548.857.207,00	91.666.666,00	482.864.526,00	1.123.388.399,00	2.010.000.000,00	-	-	121.235.996,00	105.000.998,00	2.236.236.994,00
3	Bidang Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria Tahun 2019	LK		1.747.111.678,00	584.722.320,00	-	2.331.833.998,00	834.040,00	-	-	834.040,00	3.070.920.000,00	-	-	(479.521.484,00)	(260.398.558,00)	2.330.999.958,00
	Sub Total (5)			1.747.111.678,00	584.722.320,00	-	2.331.833.998,00	834.040,00	-	-	834.040,00	3.070.920.000,00	-	-	(479.521.484,00)	(260.398.558,00)	2.330.999.958,00
	Total Seluruh Bidang Industri			26.440.781.467,07	160.411.458.985,10	2.694.406.785,00	189.546.647.237,17	7.264.237.047,00	8.227.404.572,07	482.864.526,00	15.974.506.145,07	155.618.718.890,53	-	-	12.363.429.694,40	5.589.992.507,17	173.572.141.092,10

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN